

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE,
PROFITABILITAS, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2020)**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Magister
Akuntansi (S2) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis Dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh:

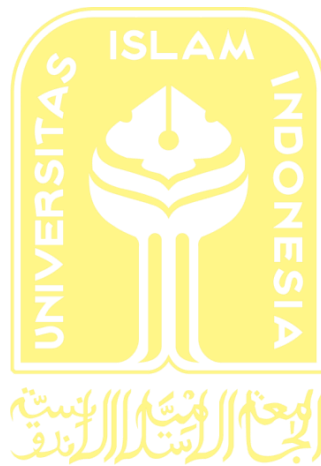
Khoirul Garda Wijaya

20919002

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 5 Desember 2022

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

KHOIRUL GARDA WIJAYA

No. Mhs. : 20919002

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE,
PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2020)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh

Tim Penguji, maka tesis tersebut

dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., CfrA.

Penguji II



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Garda Wijaya

NIM : 20919002

Judul Skripsi : PENGARUH KUALITAS AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul diatas adalah benar-benar asli karya tulis saya dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tesis ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan



Khoirul Garda Wijaya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak negatif dari Corporate Governance perusahaan, kualitas audit, profitabilitas, leverage perusahaan yang bertanggung jawab atas penghindaran pajak. Untuk menguji hipotesis penelitian, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan alat analisis SPSS dari sampel sebanyak 325 perusahaan manufaktur selama periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan Institusional, diversitas gender, independensi dewan direksi, dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: corporate governance; intensitas aset tetap; kualitas Audit; leverage; penghindaran pajak; profitabilitas; ukuran perusahaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the negative impact of corporate corporate governance and the audit quality of companies responsible for tax avoidance in a sample of 325 manufacturing companies from 2016 to 2020. To test the research hypothesis, the author uses a purposive sampling method using SPSS analysis tools from the sample. as many as 325 manufacturing companies during the 2016-2020 period. The results show that audit quality has a positive effect on tax avoidance practices, while institutional ownership, gender diversity in the board of directors, and independence of the board of directors have no effect on tax avoidance. In addition, it was also revealed that profitability and leverage also affect the practice of tax avoidance in manufacturing companies in Indonesia.

Keywords – Audit quality, corporate governance, firm size, profitability, leverage, fixed asset intensity, tax avoidance (BTD)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
BERITA ACARA UJIAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Teori Agensi.....	19
2.2 Teori Pemangku Kepentingan.....	23
2.3 Pajak	26
2.4 Penghindaran Pajak	28
2.5 Kualitas Audit	31
2.6 Corporate Governance	34
2.6.1 Kepemilikan Institusional	36
2.6.2 Diversitas Gender dalam dewan direksi	38
2.6.3 Independensi Dewan Direksi	40
2.7 Profitabilitas	43
2.8 Leverage.....	45

2.9 Perusahaan Manufaktur	48
2.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu	50
2.11 Kerangka Konseptual	53
2.12 Perumusan Hipotesis	55
2.12.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	55
2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	57
2.12.3 Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	59
2.12.4 Pengaruh Independensi Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	62
2.12.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	64
2.12.6 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak	66
2.12.7 Variabel Kontrol	68
2.12.7.1 Ukuran Perusahaan	69
2.12.7.2 Capital intensity	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
3.1 Pemilihan populasi, sampel, dan pengumpulan data	71
3.1.1 Populasi	71
3.1.2 Sampel	72
3.2 Variabel Penelitian	73
3.2.1 Variabel Dependen	73
3.2.2 Variabel Independen	76
3.2.2.1 Kualitas Audit	76
3.2.2.2 Corporate Governance	77
3.2.2.2.1 Kepemilikan Institusional	77
3.2.2.2.2 Diversitas Gender dalam Dewan direksi	78
3.2.2.2.3 Independensi Dewan Direksi	79
3.2.2.3 Profitabilitas	80
3.2.2.4 Leverage	81
3.2.3 Variabel Kontrol	81
3.2.3.1 Ukuran Perusahaan	81
3.2.3.2 Capital intensity	82
3.3 Alat Analisis	82
3.3.1 Analisis Deskriptif	83

3.3.2 Uji Normalitas	83
3.3.3 Uji Asumsi Klasik	84
3.3.3.1 Uji Multikolinearitas	84
3.3.3.2 Uji Autokorelasi	85
3.3.3.3 Uji heteroskedastisitas	87
3.3.4 Uji Goodness of Fit Suatu Model / Uji Ketepatan Model	87
3.3.4.1 Uji F	88
3.3.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)	88
3.3.4.3 Uji t	89
3.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda	91
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
4.1 Data Penelitian	93
4.1.1 Hasil Pemilihan Sampel	93
4.2 Analisis dan Hasil Penelitian	98
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	98
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	103
4.2.2.1 Uji Normalitas	103
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	106
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	107
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas	109
4.2.3 Uji Kelayakan Model	111
4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)	111
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	112
4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda	113
4.2.5 Uji t	116
4.2.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian	120
4.2.6.1 Hasil Pengujian Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	120
4.2.6.2 Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	122
4.2.6.3 Hasil Pengujian Pengaruh Diversiti Gender dalam Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	125
4.2.6.4 Hasil Pengujian Pengaruh Independensi Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak	128

4.2.6.5 Hasil Pengujian Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	130
4.2.6.6 Hasil Pengujian Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak	133
4.2.6.7 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	137
4.2.6.8 Hasil Pengujian Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
5.1 Kesimpulan	142
5.2 Keterbatasan.....	143
5.3 Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN 1.....	154
LAMPIRAN 2.....	155
LAMPIRAN 3.....	158
3.1 Data Kualitas Audit akhir tahun 2016-2020	158
3.2 Data Kepemilikan Institusional akhir tahun 2016-2020	167
3.3 Data Diversiti Gender dalam Dewan Direksi akhir tahun 2016-2020.....	176
3.4 Data Independensi Dewan Direksi akhir tahun 2016-2020	185
3.5 Data Ukuran Perusahaan akhir tahun 2016-2020.....	194
3.6 Data Profitabilitas akhir tahun 2016-2020	203
3.7 Data Leverage akhir tahun 2016-2020	212
3.8 Data Capital intensity akhir tahun 2016-2020	221
3.9 Data Penghindaran Pajak akhir tahun 2016-2020	230
LAMPIRAN 4.....	240
LAMPIRAN 5.....	253

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1Realisasi Penerimaan Negara (dalam triliun rupiah)	4
Tabel 2. 1 Industri Dasar dan Kimia.....	49
Tabel 2. 2 Konsumsi.....	50
Tabel 2. 3 Aneka Industri.....	50
Tabel 2. 4 Tinjauan Penelitian terdahulu	50
Tabel 3. 1 Durbin-Watson	86
Tabel 4. 1 Hasil Penentuan Sampel	94
Tabel 4. 2 Daftar Nama Perusahaan	96
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	
(Sebelum Menghapus Data Outlier)	99
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	
(Setelah Menghapus Data Outlier)	101
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas (Sebelum Menghapus Data Outlier).....	104
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas (Setelah Menghapus Data Outlier).....	105
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas	107
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	108
Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sebelum Transformasi)	110
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Setelah Transformasi)	111
Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)	112
Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	113
Tabel 4. 13 Hasil Analisis Regresi linear Berganda	114
Tabel 4. 14 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t).....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	54
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan penyusunan dan penetapan APBN bahwa yang termasuk sebagai pendapatan negara antara lain terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, hal ini sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak yaitu sebesar lebih dari 60%. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 hingga 2020. Penerimaan pajak meliputi pendapatan pajak yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri atau perdagangan internasional. Pada APBN 2019, 82,5 % dari total pendapatan negara berasal dari pendapatan pajak (Kemenkeu.co.id, 2019). Hal ini terlihat dari pendapatan APBN sebesar Rp.2.165 triliun, pendapatan pajaknya sebesar Rp. 1.784 triliun rupiah pada 2019 (Kemenkeu.go.id). Sama halnya yang terjadi di tahun 2020, pendapatan APBN sebesar Rp.2.233 triliun, pendapatan pajaknya sebesar Rp1.865 triliun rupiah pada 2020 (Kemenkeu.co.id, 2020). Melihat dari data tersebut, berdasar pada Informasi APBN (2018), pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2018 salah satunya adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan target penerimaan perpajakan yang realistis berdasarkan basis data terkini. Kebijakan-kebijakan yang dijalankan

oleh pemerintah khususnya yang terkait dalam hal perpajakan ini, tujuannya adalah untuk menjadikan pajak sebagai alat pemerintah untuk melakukan distribusi pendapatan sekaligus stimulus untuk memacu dunia usaha agar lebih kompetitif, dengan tujuan yang positif ini tentunya juga menjadi tantangan bagi pemerintah agar pendapatan negara bidang perpajakan yang ditargetkan terus naik setiap tahunnya dapat terealisasi untuk menerapkan beberapa kebijakan guna mencegah kecurangan.

Nurchalis (2018), Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No 16 Tahun 2009, 2009). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik demi menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi maupun badan hal tersebut karena penerimaan pajak yang sangat sentral bagi suatu negara (Mulyana et al., 2020).

Dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah

dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah merupakan pengertian dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Negara, tetapi bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Akbari et al., 2019).

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah mengharuskan pemerintah lebih harus mempunyai strategi agar tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Hoseini et al. (2019) berpendapat bahwa di sisi perusahaan, jumlah pajak yang akan dibayar kepada pemerintah akan diupayakan untuk diatur sedemikian rupa dengan cara meminimalkan biaya usaha perusahaannya dengan berbagai cara. Seorang manajer akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan maupun dengan cara yang lainnya. Wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pembayaran pajak baik legal maupun ilegal merupakan sebuah ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan mendorong (Akbari et al., 2019).

Sebagai salah satu negara pemungut pajak, di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Jumlah realisasi sumber pendapatan Indonesia yang bersumber dari pajak, sesuai dengan yang

tercantum dalam data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2017 - 2020 (dalam miliaran rupiah) dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1Realisasi Penerimaan Negara (dalam triliun rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1.618	1.784	1.865
Penerimaan Bukan Pajak	275	378	367
Total	1.893	2.162	2.232

Sumber: (Informasi APBN 2017-2020)

Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Efektivitas pemungutan pajak beberapa tahun terakhir yang mengalami penurunan ini terbukti. Berdasarkan laporan kinerja kementerian keuangan dari tahun 2016-2020 (Kementerian Keuangan, 2016-2020), di mana penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp1.105,81 triliun atau 81,6% dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Pada tahun 2017 penerimaan pajak sebesar Rp 1.147,5 triliun atau mencapai 89,4% dari target di tahun 2017 yaitu Rp 1.283,6 triliun. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 1.315,93 triliun atau 92,41% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2019 sebesar Rp 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Dan terakhir di tahun 2020 penerimaan pajak mencapai Rp 1.069,98 triliun atau

89,25% dari target APBN 2020 sebesar Rp1.652,57 triliun. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan namun penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan.

Kecurangan adalah salah satu alasan tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target. Jika melihat dari data di atas maka pemerintah belum mampu mewujudkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan. Kendala yang dihadapi pemerintah saat ini salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam hal usaha menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Salehi et al. (2020) Penghindaran pajak adalah berbagai kegiatan hukum yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kewajiban pajak yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Usaha pengurangan atau penghematan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara membayar sejumlah kecil pajak per dolar yang dilaporkan dengan tidak menentang ketentuan yang berlaku (Hoseini et al., 2019). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak melanggar perundang-undang perpajakan karena *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang

perpajakan tersebut yang akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Beebeejaun, 2020).

Denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas adalah salah satu akibat atau risiko dari kegiatan penghindaran pajak (Susanti, 2017). Jika terbukti melanggar aturan akan dikenakan denda dan kehilangan reputasi dan dalam jangka panjang, menghambat keberlanjutan bisnis (Bimo et al., 2019). Rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Banyak faktor yang memengaruhi adanya penghindaran pajak. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah kualitas audit (Dang & Nguyen, 2022). Standar Profesional Akuntan Publik, keahlian auditor dan kode etik profesi akuntan public adalah definisi dari kualitas audit . Laporan keuangan Perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap lebih berkualitas. *Big Four* memberikan kualitas layanan yang lebih baik karena mereka memiliki reputasi untuk dilindungi. Di satu sisi, KAP *Big Four* memiliki insentif yang lebih kecil untuk terlibat dalam penghindaran pajak, karena akan memiliki konsekuensi buruk pada reputasi mereka, dan mereka mungkin kehilangan kliennya, selain itu juga *Big Four* dapat membantu mengurangi aktivitas penghindaran pajak perusahaan melalui pemantauan yang ditingkatkan dan kualitas audit yang lebih tinggi (Gontara & Khlif, 2020). Dang & Nguyen (2022) dalam penelitiannya yang mengatakan

bahwa kualitas audit memiliki peran penting dalam menghambat perilaku penghindaran pajak yang nantinya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah manajemen laba. Selain itu, kualitas audit eksternal dapat meningkatkan kinerja internal perusahaan pemerintahan untuk itu dalam penelitiannya juga, mengatakan bahwa perusahaan besar harus fokus pada karakteristik komite audit dan mempertimbangkan untuk menggunakan layanan audit eksternal dengan kualitas yang baik.

Faktor kedua adalah corporate governance, tata kelola perusahaan memiliki andil yang penting dalam hal peningkatan kinerja perusahaan, , corporate governance adalah proses di mana perilaku perusahaan dikendalikan dan diawasi (Chouaibi, 2021). Zeng (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tata kelola perusahaan terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen. Manajemen menerapkan langkah-langkah berdasarkan keputusan yang sesuai untuk kepentingan perusahaan serta pemegang saham ketika suatu tata kelola perusahaan itu baik. Hal tersebut tentu dapat memengaruhi kontrol internal sehingga dalam mengelola perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Tata Kelola perusahaan merupakan salah satu hal yang utama bagi perusahaan karena peran ini sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kontra-produktif dari setiap individu (Chouaibi, 2021). Mengurangi tindakan pajak yang agresif dapat ditekan dengan diterapkannya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan tata kelola perusahaan dapat mengurangi tindakan memaksimalkan kepentingan manajer sehingga ruang geraknya dapat

dibatasi. Tata Kelola dalam penelitian ini diproksikan dengan 3 variabel yaitu kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi.

Kepemilikan institusional adalah proksi pertama pada penelitian ini, Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Pemantauan keputusan manajemen yang efektif yang berkaitan dengan penghindaran pajak merupakan definisi kepemilikan institusional yang dipandang sebagai kunci mekanisme tata kelola perusahaan baik (Dakhli, 2021). Marwat et al. (2021) Struktur kepemilikan juga merupakan salah satu penentu penghindaran pajak, lebih terkonsentrasinya kepemilikan menyebabkan perusahaan menjadi lebih menghindari praktik penghindaran pajak.

Proksi kedua adalah diversitas gender dalam dewan direksi, Jarboui et al. (2020) serta Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) teori agensi adalah salah satu teori terbanyak yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dampak keanekaragaman gender dalam dewan direksi pada kualitas informasi. Adanya direksi wanita pada sebuah perusahaan akan membawa berbagai perspektif, yang memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti mengurangi biaya agensi, penggelapan pajak meningkatkan nilai dan transparansi informasi perusahaan. Dewan direksi wanita memiliki tanggung jawab lebih tinggi dalam

proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu dalam penelitiannya mengatakan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi perusahaan akan membuat perusahaan tidak melakukan Praktik penghindaran pajak. Hoseini et al. (2019) bahwa praktik penghindaran pajak dapat ditekan dengan kehadiran perempuan di dewan direksi. Peran direktur wanita di dewan perusahaan karena dibanding laki-laki wanita adalah diyakini lebih efektif dalam memantau proses penyeimbangan antara kepentingan pemegang saham dan masyarakat.

Selain dari kedua proksi di atas, variabel corporate governance juga menggunakan satu proksi lagi yaitu, independensi dewan direksi. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Direksi juga berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Alkurdi & Mardini (2020) mencerminkan bahwa dewan dengan lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham yang lebih besar. Banyak literatur terkait telah mengeksplorasi apakah anggota independen di dewan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan penghindaran pajak, ditemukan bahwa kehadiran anggota independen mewakili persentase yang lebih tinggi dari jumlah keseluruhan anggota dewan mengarah pada penyediaan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengendalian untuk mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan. Chouaibi (2021) dewan direksi

adalah entitas penting dalam sebuah perusahaan, menciptakan hubungan antara pemegang saham dan manajer dan oleh karena itu memainkan peran dalam tata kelola suatu perusahaan.

Profitabilitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dicerminkan melalui rasio *Return on Asset*. Menurut teori agensi kondisi keuangan sangat mencerminkan bagaimana keadaan suatu perusahaan. Seperti profitabilitas sebagai dasar penilaian kondisi keuangan dan sebagai objek dari pajak. Jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan akan berusaha meminimalkan labanya untuk menghindari pajak adalah definisi laba sebagai suatu tolok ukur perusahaan dalam mengambil keputusan (Rifai & Atiningsih, 2019).

Faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. Penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan *adalah definisi dari leverage*. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. keuntungan yang maksimal dicapai Ketika beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak. Rifai & Atiningsih (2019) semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan

Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, Fungsi dari variabel kontrol ini adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias dan supaya lebih akurat untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol yang berpengaruh terhadap variabel bebas yang saya pilih adalah ukuran perusahaan dan capital intensity.

Indonesia pun tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak, banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan nasional maupun multinasional di antara nya yaitu pada tahun 2016 kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT RNI bidang jasa kesehatan yang perusahaannya terafiliasi dengan Singapura, perusahaan ini melakukan banyak aktivitas bisnis di Indonesia dan sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas, namun langkah yang digunakan untuk menghindari pajak yaitu dengan melakukan segala kegiatan melalui utang dari perusahaan afiliasi di Singapura, jadi perusahaan di Singapura selaku pemilik tidak menanamkan dalam bentuk modal tetapi seolah-olah memberikan dalam bentuk utang. Diberikan dalam bentuk utang agar PT RNI memiliki beban utang yang tinggi sehingga mengurangi labanya yang akan membuat pajak perusahaan rendah. Bahkan pemegang saham PT RNI asal Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007 hingga 2015 dan pemegang saham asal Singapura juga tidak membayar pajak padahal mendapatkan penghasilan dari Indonesia (Suryowati, 2016).

Penghindaran pajak kedua yang terjadi di Indonesia, Fasita & Firmansyah (2022) kasus penggelapan pajak yang mengurangi pajak global

oleh PT Adaro Energy sebesar menyesuaikan harga transfer melalui transfer keuntungan dari tambang batu bara di Indonesia ke surga pajak negara, Singapura, Mauritius, dan Labuan. Adaro mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan di Indonesia menjadi US\$125 juta.

Tidak berhenti disitu, Prima (2019) memberitakan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengalihkan sebagian pendapatan keluar dari Indonesia melalui dua acara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta.

Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Karena kejadian ini, menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Kedua,

melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. PT Bentoel mengambil pinjaman antara tahun 2013-2015 dari perusahaan yang ada di Belanda untuk pembiayaan ulang utang bank dan juga untuk membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per dolar.

Penelitian ini adalah pengembangan dari tiga penelitian sebelumnya, di mana Chouaibi (2021) mengambil variabel corporate governance dengan penggunaan proksi kepemilikan institusional, Diversitas Gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi. Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel corporate governance dengan proksi diversitas gender dalam dewan direksi, independensi dewan direksi, dan berdasarkan saran Alkurdi & Mardini (2020) bahwa untuk menambahkan variabel kepemilikan perusahaan untuk itu saya akan berfokus pada atribut kepemilikan institusional untuk mendapatkan bukti apakah atribut tersebut memengaruhi praktik penghindaran pajak. Saran ini sejalan dengan Gaaya et al. (2017) dalam penelitiannya juga menyarankan untuk menambah variabel struktur kepemilikan. Sama halnya dengan Bimo et al. (2019) menyatakan bahwa belum banyak penelitian tentang penghindaran pajak yang mempertimbangkan struktur kepemilikan.

Penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah penelitian yang dilakukan oleh Gaaya et al. (2017). Penggunaan

variabel kualitas audit ini karena ingin mengetahui tentang dampak atribut auditor terhadap penghindaran pajak. Jika perusahaan berusaha untuk menghindari membayar pajak yang besar namun secara bersamaan harus mematuhi hukum pajak yang berlaku, mereka pasti akan mencari nasihat dari konsultan pajak. Salehi et al. (2020) menyimpulkan bahwa sekitar 65 persen perusahaan menerima sebagian dari nasihat pajak dan layanan terkait lainnya dari auditor mereka. Seorang auditor yang memiliki lebih banyak keahlian dalam industri atau lebih banyak masa kerja pada klien perusahaan dapat memberikan saran yang lebih baik kepada klien tentang masalah pajak. Selain itu, mereka akan lebih cenderung meminta biaya yang lebih tinggi dari kliennya. Gaaya et al. (2017) mengatakan menurut perspektif teori keagenan, kualitas audit penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham eksternal. Kualitas audit adalah korporat fitur tata kelola yang mengontrol tindakan manajer dan mencegah manipulasi akuntansi dan semua kegiatan penipuan. Auditor eksternal diharapkan untuk menawarkan penilaian independen atas laporan keuangan perusahaan.

Pengukuran variabel penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan proksi *Book-Tax Difference* (BTD). Berdasarkan saran dari Ortas & Gallego-Álvarez (2020) dan Abid & Dammak (2021) untuk menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur tingkat penghindaran pajak, untuk itu dalam penelitian ini, proksi yang akan digunakan dalam melihat tingkat penghindaran pajak adalah proksi BTD. Untuk penelitian lebih lanjut penulis menyarankan agar book-tax difference (BTD) digunakan

sebagai proksi untuk penghindaran pajak karena dapat menggambarkan penghindaran pajak yang lebih baik (Rani et al., 2018) (Chytis et al., 2020). BTD adalah metode pengukuran perbedaan antara akuntansi dan perpajakan, yang biasa digunakan dalam variabel penghindaran pajak perusahaan (Abid & Dammak, 2021). Cabello et al. (2019) mengatakan dalam penelitiannya dalam penggunaan proksi BTD pengukurannya adalah dengan penghasilan sebelum pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak dibagi dengan total aset. Gaaya et al. (2017) Book-Tax Difference (BTD) yang biasa digunakan dalam literatur perpajakan yang mengacu pada pendapatan buku sebelum pajak perusahaan dikurangi taksiran pendapatan kena pajak yang diskalakan dengan total aset. Untuk menghitung BTD masing-masing perusahaan, pertama-tama diperkirakan dahulu penghasilan kena pajak berdasarkan beban pajak kini dibagi dengan tarif pajak menurut undang-undang yang berlaku pada setiap negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KUALITAS AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”** (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah kualitas audit, corporate governance,

profitabilitas, dan leverage memiliki pengaruh terhadap usaha penghindaran pajak?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kualitas audit, corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sarana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

2. Manfaat praktis

Bagi investor, kreditor maupun manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber, referensi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran secara bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan teori yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil dari analisis data berdasarkan data-data penelitian yang telah diperoleh dan dikumpulkan, beserta dengan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, dan saran-saran yang mungkin dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Teori mengenai hubungan *principal* dan *agen* di mana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agen* adalah definisi teori keagenan. Teori ini didefinisikan sebagai bentuk kontrak antara pemegang saham (prinsipal) dan agen (manajer), di mana pemegang saham menunjuk agen untuk mengelola perusahaan atas nama mereka. Marzuki & Syukur (2021) mengatakan teori dianggap lebih tepat digunakan pada lingkungan perusahaan karena hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agen* (manajemen). Penghindaran pajak mengarahkan agen, yang merupakan manajer, untuk menikmati keuntungan pribadi serta berwenang untuk mengambil keputusan dengan tidak merugikan diri sendiri. Dengan demikian keputusan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham tetapi mencakup semua pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan, kreditur dan masyarakat. Amidu et al. (2019) mengatakan bahwa pemangku kepentingan lainnya memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan organisasi dan karenanya kepentingan mereka harus diberikan relevansi yang sama seperti yang diberikan kepada pemegang saham.

Perusahaan yang diatur dengan baik lebih mungkin untuk memiliki mekanisme pengendalian internal untuk mencegah hal tersebut. Dalam penelitiannya mereka berasumsi bahwa perusahaan yang diatur dengan buruk tidak akan menggunakan insentif ekuitas untuk mendorong penghindaran pajak karena mereka tidak memiliki mekanisme tata kelola untuk mencegah pengalihan. Marzuki & Syukur (2021) Berdasarkan teori keagenan, karena oportunistis perilaku manajer, pemegang saham dapat dikenakan biaya keagenan seperti biaya pemantauan untuk mengawasi perilaku manajer untuk memastikan bahwa manajer akan bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Kepemilikan atau kepentingan dalam perusahaan merupakan salah satu mekanisme tata kelola internal perusahaan yang diberikan sebagai insentif untuk merangsang kinerja perusahaan yang baik. Masalah kepentingan anggota dewan perusahaan dalam kepemilikan saham telah menjadi subjek kepentingan dalam diskusi tata kelola perusahaan karena dapat menyebabkan potensi oportunisme dalam memanipulasi laporan keuangan.

Dewan direksi dianggap sebagai mekanisme penting untuk membatasi perilaku oportunistis manajer. Jadi, setiap bunga atau insentif diberikan kepada mereka di perusahaan harus mengarah pada keselarasan kepentingan yang lebih besar antara pemegang saham dan manajer. Direksi memiliki peran yang lebih signifikan untuk dimainkan dalam memantau manajemen mekanisme dalam tata kelola perusahaan. Manajemen yang mengelola perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*

mengenai berbagai kegiatan entitas yang dapat dicapai melalui pelaporan keuangan. Teori agensi menyiratkan bahwa perusahaan perlu membuat laporan untuk mengurangi asimetri informasi dengan pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Karena perusahaan berkewajiban untuk melaporkan pembayaran pajak mereka dalam laporan keuangan (Rudyanto & Pirzada, 2020).

Meningkatkan pendapatan dan kekayaan dengan mengharapkan pengembalian yang akan diberikan perusahaan dalam bentuk dividen serta dalam bentuk nilai saham adalah kepentingan dari para pemegang saham (prinsipal). Sedangkan pihak agen berkepentingan untuk menjalankan perusahaan serta berwenang untuk mengambil keputusan dengan tidak merugikan diri sendiri. Munculnya masalah keagenan (*agency problem*) dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Suatu keadaan tidak seimbangnnya informasi ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen tetapi agen memiliki informasi yang lebih banyak secara keseluruhan merupakan pengertian dari asimetri informasi.

Teori agensi menyatakan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Manajer perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan urusan perusahaan dan karena itu memiliki informasi menyeluruh tentang korporasi. Jika informasi tersebut tidak dibuat tersedia bagi para pemangku kepentingan akan menghasilkan

asimetri informasi. Informasi asimetri terjadi ketika manajer memiliki informasi yang tidak dimiliki pemangku kepentingan (Amidu et al., 2019). Informasi hak istimewa yang dimiliki oleh manajer meningkatkan kemampuan untuk mengeksploitasi manfaat dari pemangku kepentingan lain yang mengarah ke masalah keagenan. Merekayasa laba kena pajak melalui perencanaan pajak adalah salah satu cara yang ditempuh untuk memaksimalkan kepentingan. Diperlukan mekanisme untuk mengurangi serta mampu mengatasi konflik masalah keagenan yang timbul antara prinsipal dan agen.

Dalam hal peningkatan kinerja perusahaan, tata kelola perusahaan memiliki andil yang penting. Ketika suatu tata kelola perusahaan itu baik, maka dapat mendorong manajemen untuk menerapkan langkah-langkah berdasarkan keputusan yang sesuai untuk kepentingan perusahaan serta pemegang saham. Hal tersebut tentu dapat memengaruhi kontrol internal sehingga dalam mengelola perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Konflik kepentingan yang terjadi dalam teori agensi dapat diatasi dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Dang & Nguyen (2022) berdasarkan teori agensi, menunjukkan bahwa penghindaran pajak dikaitkan dengan tata kelola perusahaan karena manajer selalu memiliki insentif untuk meminimalkan biaya pajak dan membantu peningkatan nilai perusahaan. Untuk itu mengenai kegiatan penghindaran pajak, peneliti mengatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan umumnya berkontribusi untuk memecahkan

masalah agensi dan mengusulkan mekanisme tata kelola yang berbeda untuk membangun sebuah perusahaan agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Teori keagenan menunjukkan bahwa oportunisme manajerial dapat dikurangi dengan pemeriksaan auditor eksternal; namun, efisiensi audit dan kemampuannya untuk mencegah berbagai pilihan akuntansi yang agresif tergantung pada kualitas auditor eksternal atau kemungkinan bersama untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran pelaporan keuangan yang pada gilirannya sebagian tergantung pada independensi auditor eksternal (Zalata et al., 2020). Sejalan dengan Abid & Dammak (2021) yang mengatakan bahwa, menurut teori keagenan, audit eksternal adalah salah satu mekanisme kontrol yang efektif untuk membatasi perilaku oportunis dan untuk memberikan jaminan yang wajar pada kualitas pengungkapan perusahaan. Jarboui et al. (2020) menjelaskan baru-baru ini, teori keagenan adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dampak keragaman gender dewan pada kualitas informasi. Teori ini mendalilkan bahwa direktur dewan wanita membawa perspektif yang lebih luas, yang meningkatkan dewan kemandirian sementara juga mengurangi biaya agensi, penghindaran pajak dan, sebagai konsekuensinya, meningkatkan nilai perusahaan dan transparansi informasi.

2.2 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan berpendapat bahwa manajer memiliki moral kewajiban untuk mempertimbangkan dan harus secara tepat menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Teori ini menyoroti kebutuhan

manajer untuk bertanggung jawab atas pemangku kepentingan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dirugikan atau diuntungkan keputusan atau tindakan perusahaan. Sesuai dengan sudut pandang pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya memenuhi peran tradisional untuk memenuhi harapan pemegang saham tetapi juga memenuhi banyak harapan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar kinerja ekonomi atau keuangan. Teori ini masing-masing mendalilkan bahwa manajemen suatu perusahaan diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingannya dengan melakukan kegiatan yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan (Chouaibi, 2021).

Salehi et al. (2018) teori pemangku kepentingan, teori ini menyatakan keseimbangan antara kepentingan sah semua pemangku kepentingan dan bukan hanya kepentingan pemegang saham perusahaan. Sederhananya, teori pemangku kepentingan normatif adalah landasan pemangku kepentingan manajemen dan kredit semua pemangku kepentingan dengan kepentingan sah mereka dalam korporasi.

Stakeholder adalah mereka yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan harus mampu merespon berbagai peraturan yang disepakati dalam suatu perusahaan dan membangun dialog yang saling percaya, menarik, dan konstruktif dengan pemangku kepentingan mereka untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Dari perspektif teori pemangku kepentingan, dewan bertanggung

jawab untuk menyeimbangkan dan menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan saat memutuskan sebuah keputusan (Dakhli, 2021).

Teori pemangku kepentingan ini berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, dewan direksi Wanita. Dalam pandangan itu, dikatakan bahwa kehadiran direktur perempuan di ruang rapat dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dewan dan meningkatkan kemampuannya untuk secara efektif menangani masalah sosial. Hal ini karena mereka lebih sensitif tentang masyarakat, lingkungan dan etika, kehadiran perempuan di dewan meningkatkan efektivitas dewan dalam manajemen pemangku kepentingan dan mendorong perusahaan untuk bertindak lebih bertanggung jawab baik secara internal maupun eksternal. Hoseini et al. (2019) mengatakan, dengan berdasar dari teori pemangku kepentingan, dewan direksi ditetapkan untuk membuat keseimbangan informasi antara pemegang saham dan manajer, dan meningkatkan tingkat kepercayaan di antara pemegang saham, seseorang dapat mempertahankan bahwa kehadiran perempuan di dewan perusahaan membantu meningkatkan kinerja dewan direksi. Dewan direksi wanita tidak hanya menarik pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lain dari perusahaan. Teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan bagaimana keragaman gender dewan memberikan kinerja sosial. Dengan cara ini, penggabungan direktur wanita di dewan perusahaan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Jarboui et al., 2020).

Selain berhubungan dengan variabel dewan direksi wanita, teori pemangku kepentingan ini juga berkaitan dengan variabel kepemilikan institusional, Hoseini et al. (2019) mekanisme kepemilikan merupakan alat pengendali utama dalam tata kelola perusahaan. Beberapa dari insentif pemilik dipengaruhi oleh teori pemangku kepentingan. Dengan demikian, karena masyarakat membuka cara bagi perusahaan untuk melanjutkan operasi mereka untuk jangka waktu yang tidak terbatas, mereka memutuskan untuk mengompensasi keuntungan ini dengan membayar pajak mereka.

2.3 Pajak

Sebelum mendalami konsep penghindaran pajak, perlu dijelaskan terlebih dahulu penjelasan istilah perpajakan. Berdasarkan *Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan KUP No. 28 Tahun 2007* (2007) Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah definisi dari pajak yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,”. OECD pada tahun 1996 juga telah menyoroti kewajiban sifat pajak tetapi juga mendefinisikan pajak sebagai pembayaran yang tidak berbalas kepada pemerintah. Kata-kata “tidak terbalas” digunakan oleh OECD untuk menunjukkan bahwa manfaat oleh pemerintah yang disediakan untuk membayar pajak biasanya tidak sebanding dengan pembayaran pajak mereka.

Beebeejaun (2018) mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib yang harus dibayar oleh pemerintah oleh unit ekonomi kepada pemerintah tanpa hak yang sesuai untuk menerima quid pro quo yang pasti dan langsung dari pemerintah. Definisi seperti itu dapat secara argumentatif dipertanyakan karena, di satu sisi, perpajakan dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan dengan melayani mereka yang kurang mampu, sementara di sisi lain, perpajakan dapat menjadi faktor demotivasi bagi penduduk yang bekerja, terutama dalam sistem pajak progresif karena pendapatan yang lebih tinggi berarti kewajiban pajak yang lebih tinggi untuk dibayarkan kepada pemerintah tanpa menerima manfaat yang sesuai.

Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan KUP No. 28 Tahun 2007 (2007) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 12 ayat 1 Sistem pemungutan dengan *self assessment system* telah diatur dalam UU tersebut yang menyebutkan “*Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.*” Dengan kata lain, sistem ini lebih cenderung menitikberatkan pada peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajak. Mengurangi beban pajak adalah alasan diberlakukannya sistem tersebut untuk menjadikan manajemen perusahaan memiliki peluang untuk memilih strategi perpajakan. Telah menjadi sesuatu yang umum dilakukan ketika pajak menjadi hal yang sangat diperhatikan sebab memiliki hubungan langsung dengan jumlah laba yang dihasilkan. Perencanaan pajak

(*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya upaya dalam penghematan beban pajak.

2.4 Penghindaran Pajak

Salehi et al. (2020) dalam pengertian luas, penghindaran pajak adalah berbagai kegiatan hukum yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan pembayaran pajak kepada pemerintah. Oleh karena itu, penghindaran pajak telah menjadi fokus perhatian dalam penelitian keuangan karena mencakup banyak tindakan yang mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak, yang didefinisikan sebagai metode hukum untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh orang pribadi atau bisnis, dianggap sebagai kegiatan hukum. Digunakan untuk mencari keuntungan entitas, memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah salah satu kriteria utama manajer. Oleh karena itu, ketika menghadapi tujuan kinerja bisnis serta kebutuhan modal, penghindaran pajak sangat diperlukan dalam strategi manajemen, karena dari perspektif bisnis, pajak adalah beban (Dang & Nguyen, 2022).

Selama bertahun-tahun, penghindaran pajak telah menjadi sorotan oleh pemerintah, media dan masyarakat pada umumnya, dan dalam beberapa tahun terakhir, perjuangan melawan praktik penghindaran pajak telah menjadi salah satu hak prerogatif utama pemerintah, terutama bagi mereka di negara berkembang yang menderita akibat buruk dari penghindaran pajak. Pemeran utama yang bersangkutan adalah pembayar pajak, penasihat dan otoritas pendapatan yang beroperasi di pajak domestik dan global yang kompleks

lingkungan yang menimbulkan ketidakpastian, perbedaan interpretasi atas ketentuan perpajakan dan eksploitasi celah-celah sistem perpajakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Beebejaun (2018) Istilah "penghindaran pajak" tidak memiliki definisi yang pasti, dan tidak ada konsensus umum tentang makna yang tepat, meskipun pengadilan telah menafsirkan beberapa praktik yang mungkin diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak dalam kasus hukum. Definisi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipandang oleh beberapa orang sebagai efektif dalam mengamankan manfaat pajak yang dicari. Perbedaan utama antara penghindaran pajak yang boleh dan yang tidak boleh adalah yang pertama halal, sedangkan yang kedua halal ilegal, meskipun keduanya dianggap sebagai praktik yang tidak bermoral.

Penghindaran pajak mengacu pada penggunaan undang-undang perpajakan dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh pemerintah. Ini adalah cara untuk meminimalkan jumlah pajak atau menghindari pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak memiliki definisi yang luas dan sempit. Secara garis besar, penghindaran pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar sejumlah kecil pajak per dolar yang dilaporkan pendapatan akuntansi keuangan sebelum pajak. Menurut definisi ini, semua transaksi yang memengaruhi kewajiban pajak perusahaan adalah jenis penghindaran pajak. Penggelapan pajak adalah aktivitas ilegal, sedangkan penghindaran pajak terjadi sesuai dengan undang-undang perpajakan, dan dengan demikian tidak

meninggalkan ruang bagi wajib pajak untuk khawatir ketahuan (Hoseini et al., 2019).

Bimo et al. (2019) berpendapat bahwa penghindaran pajak harus dicegah, dan jika terbukti melanggar aturan akan dikenakan hukuman dan kehilangan reputasi dan dalam jangka panjang, menghambat keberlanjutan bisnis. Dari perspektif teori keagenan, perencanaan pajak memerlukan pertimbangan manajemen dan perkiraan. Dalam pelaksanaannya, manajemen dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas dan kebijaksanaan. Melalui kebijaksanaan ini, manajemen memiliki insentif untuk melaksanakan perencanaan pajak yang menguntungkan manajemen melalui peningkatan kompensasi dengan mengorbankan pemegang saham.

Penghindaran pajak secara luas didefinisikan "sebagai pengurangan pajak eksplisit" Salhi, Riguen, et al. (2020). Kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin termasuk dalam wilayah abu-abu dan kegiatan yang ilegal. Dengan demikian, aktivitas penghindaran pajak pajak tidak serta merta menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dalam penelitiannya juga mendefinisikan Manajemen pajak, perencanaan pajak, penghindaran pajak atau perlindungan pajak sebagai wajib pajak yang mengeksploitasi ketidakpastian dalam undang-undang perpajakan untuk memilih metode yang menguntungkan dalam pelaporan pajak yang memengaruhi kewajiban pajak mereka.

2.5 Kualitas Audit

Kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, keahlian auditor dan kode etik profesi akuntan publik adalah definisi dari kualitas audit adalah. Baik buruknya kualitas auditor dapat dilihat dari bagaimana auditor melaksanakan proses audit, prinsip auditor untuk berpegang teguh pada kode etik profesi akuntan publik, dan kesesuaiannya dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Opini yang diberikan auditor itu harus memberikan keyakinan dan terhindar dari salah saji yang bersifat material berdasar prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah tugas utama seorang auditor dalam menyampaikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Marzuki & Syukur (2021) audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four* dianggap lebih berkualitas, hal tersebut dikarenakan KAP *The Big Four* berafiliasi dengan berbagai KAP di seluruh dunia sehingga lebih mengetahui teknik audit dan bisnis klien. Auditor *The Big Four* lebih mungkin untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan dan meningkatkan pemantauan dari perusahaan audit non-*The Big Four*. Selain itu, auditor *The Big Four* memiliki keahlian dan penilaian, kemampuan yang lebih luar biasa untuk melawan tekanan klien dan lebih memperhatikan reputasi. Mereka juga memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih berkembang dan strategi dan proses audit yang sistematis. Kurniawati et al. (2020) Menurut peraturan Indonesia, sebuah perusahaan audit internasional yang bermitra dengan perusahaan lokal harus menyediakan program pelatihan, menerapkan

standar pada pengendalian mutu dan melakukan pengendalian mutu secara berkala. Perusahaan audit Big 4 menggunakan prosedur seleksi dan evaluasi yang ketat dalam memilih mitra lokal. Evaluasi mitra bisnis lokal mencakup faktor-faktor seperti: kepatuhan perusahaan terhadap standar profesional, rencana bisnisnya, kelengkapan layanan profesional yang ditawarkan, kuantitas dan kualitas staf profesional dan struktur organisasi dan infrastruktur yang tersedia.

Oliviana & Muid (2019) dalam penelitiannya yang menggunakan variabel kualitas audit menyatakan bahwa adanya praktik penghindaran pajak berpengaruh positif dengan kualitas audit. Kualitas auditor berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Audit yang berkualitas akan mampu menekan perilaku pajak agresif perusahaan. Sehingga perusahaan akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Untuk menjaga bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut tetap menjadi pilihan bagi perusahaan maka Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam *Big Four* memiliki kompetensi untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pelaporan, serta menjamin integritas proses audit serta bukti atas tuntutan transparansi atas kinerja perusahaan.

Ocak & Can (2019) Studi tentang pengalaman auditor menunjukkan kepada kita bahwa auditor berpengalaman memiliki lebih banyak pengetahuan tentang prosedur audit, dan mereka memiliki lebih banyak keterampilan yang terkait dengan proses audit. Ketika dihadapkan dengan tugas audit yang kompleks, mereka dapat dengan mudah dan berhasil mengatasinya. Mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan dan salah saji materi

tertentu, dan cenderung sedikit melakukan jenis kesalahan. Mereka lebih percaya diri, dan kepercayaan diri ini membuat mereka lebih akurat dalam penilaian dan lebih mandiri karena kurang dipengaruhi oleh manajemen, dengan hal ini memungkinkan auditor berpengalaman memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. Hubungan kualitas audit dengan perusahaan dapat digambarkan oleh *agency theory*. Auditor akan berusaha untuk membuat laporan keuangan dengan transparansi tinggi sedangkan perusahaan akan berusaha untuk menutupi beberapa aktivitas internal (Doho, 2020). Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang mencakup mutu profesional, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit dan auditor independen maka audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas, (Zoebar & Miftah, 2020).

Kurniawati et al. (2020) beliau menyatakan bahwa secara regulasi, perusahaan audit asing hanya dapat memasuki pasar audit Indonesia melalui kerja sama dengan perusahaan audit lokal. Selain itu, satu firma audit asing hanya dapat bekerja sama dengan satu firma audit lokal. Sehingga dalam penelitiannya tersebut beliau mengidentifikasi audit lokal perusahaan yang berafiliasi dengan Big 4, yaitu Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi dengan *Ernst & Young*; Siddharta, Widjaja bermitra dengan KPMG; Satrio, Bing, Eny dan rekan yang bermitra dengan Deloitte; dan Tanudiredja,

Wibisana, Rintis yang bermitra dengan PwC. Marzuki & Syukur (2021) firma empat besar adalah sebagai berikut:

1. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*)
2. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*
3. KAP *Price Waterhouse Coopers*
4. KAP *Ernst & Young*

2.6 Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mendorong jajaran direksi dan manajemen memutuskan strategi yang lebih tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kemudian, penerapan tersebut mampu mencegah dan mengurangi konflik kepentingan dalam teori agensi. Termasuk juga mengenai tindakan agresif terhadap pajak serta pelaporan keuangan yang dapat dicegah dengan tata kelola perusahaan yang baik. Salhi et al. (2020) Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam hubungan antara perusahaan tata kelola dan penghindaran pajak perusahaan. Bahkan, tata kelola perusahaan melindungi kepentingan pemegang saham, memastikan pemisahan keputusan manajemen dan kontrol dalam sebuah organisasi. Khususnya, dewan direksi memiliki kekuatan untuk merekrut, memecat, dan menggabungkan manajer keputusan tingkat atas, dan untuk meratifikasi dan memantau keputusan penting dalam perusahaan.

Tata kelola perusahaan sangat bervariasi antar negara dan antar perusahaan. Lingkungan kelembagaan memaksakan praktik tata kelola

perusahaan melalui mekanisme formal, seperti undang-undang dan peraturan dan proses informal seperti: standar dan konvensi. Hasil kinerja dewan direksi, konsentrasi kepemilikan dan eksekutif insentif mungkin berbeda tergantung pada sistem hukum dan karakteristik kelembagaan di negara tertentu (Salhi, Riguen, et al., 2020).

Zeng (2019) yang menyatakan bahwa sejumlah besar studi pajak mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan penghindaran pajak, dan literatur menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan adalah terkait dengan tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan, insentif eksekutif, jasa auditor dan kualitas dan tanggung jawab sosial, di antara faktor-faktor lain. Karena penghindaran pajak adalah keputusan yang dibuat oleh manajemen, maka penghindaran pajak mencerminkan rasa tanggung jawab dan kewajiban manajemen. Ini juga mencerminkan persepsi wajib pajak tentang keadilan dalam sistem perpajakan, dan kepercayaan mereka pada pemerintah dan sistem politik. Dengan kata lain, lingkungan politik, hukum, dan kelembagaan suatu negara memengaruhi perilaku penghindaran pajak wajib pajak.

Sejumlah besar dan berkembang literatur telah menyelidiki hubungan antara corporate governance dan penghindaran pajak. Salhi et al. (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa corporate governance yang baik lebih mungkin untuk memiliki mekanisme pengendalian internal untuk mencegah penghindaran pajak. Untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan anggota Dewan Direksi yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan independen, serta yang tidak

memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dan Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa ukuran tata kelola perusahaan adalah terkait dengan berbagai proxy yang dimaksudkan untuk menangkap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga proksi untuk mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan yaitu, kepemilikan institusional, diversitas Gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi.

2.6.1 Kepemilikan Institusional

Alkurdi & Mardini (2020) berpendapat bahwa karena perilaku dan ambiguitas struktur perusahaan dapat menyebabkan kemungkinan perilaku manajerial oportunistis, yang membuat pemegang saham tidak mungkin mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer. Dalam hal ini, pemantauan eksternal diperlukan untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari penghindaran pajak dan, karenanya, insentif struktur kepemilikan adalah terkait dengan pengurangan kepentingan pribadi manajer dengan mengarahkan kontrol atas operasi perusahaan. Dari alasan ini, salah satu struktur kelas kepemilikan yaitu, kepemilikan institusional, penelitian saat ini mengadopsi salah satunya adalah teori agensi sebagai pedoman yang digunakan untuk menafsirkan hasil BTD (penghindaran pajak) dalam kaitannya dengan.

Mekanisme kunci tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan yang efektif atas keputusan manajemen yang terkait dengan

penghindaran pajak untuk mengurangi masalah keagenan dan untuk memantau kegiatan manajer adalah definisi dari Kepemilikan institusional (Dakhli, 2021). Mereka menyatakan bahwa keberadaan investor institusi dengan pengetahuan perencanaan pajak di perusahaan membuat perencanaan pajak lebih dapat diterapkan sehingga Praktik penghindaran pajak tidak terjadi.

Pemilik institusional adalah kemungkinan besar menerapkan pemantauan karena berbagai alasan dengan tujuan untuk menetapkan stabilitas posisi perusahaan. Pemilik institusional berfungsi untuk meningkatkan bisnis dan kinerja perusahaan karena pengalaman asing mereka dan keahlian multi disiplin, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional jangka panjang yang tinggi kurang agresif terhadap pajak karena investor institusional lebih peduli tentang konsekuensi jangka panjang dari strategi pajak-agresif. Kehadiran penting investor institusional, yang memungkinkan pengaruh mekanisme ini pada proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan mengenai pengalaman dan keahlian mereka yang tidak diragukan lagi sehingga praktik penghindaran pajak akan terhindarkan (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021).

Dakhli (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan persentase kepemilikan institusional sangat mungkin untuk mempromosikan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Mereka berpendapat bahwa investor institusional dapat memainkan peran kunci

dalam memantau secara efisien perilaku manajer perusahaan di samping itu juga kelembagaan investor memiliki akses yang lebih baik ke informasi karena kegiatan investasi mereka, yang berarti pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan sehingga adanya praktik penghindaran pajak akan terhindarkan.

2.6.2 Diversitas Gender dalam dewan direksi

Dalam sebuah dewan direksi perusahaan tentunya terdapat para anggota yang berasal dari background yang berbeda beda, seperti agama, suku, Pendidikan, dan gender atau jenis kelamin. Dalam penelitian ini fokus pada perbedaan para dewan direksi dari sudut pandang gender. Di Indonesia mengakui adanya 2 gender yaitu laki-laki dan perempuan, pada penelitian ini akan menilai bagaimana jika dewan direksi ini dipimpin oleh seorang perempuan. Deslandes et al. (2020) mengatakan bahwa Kehadiran direksi perempuan membantu melahirkan ide produktif yang melibatkan penyajian perspektif dan sudut pandang yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menghasilkan lebih banyak alternatif dan pengambilan keputusan yang lebih berkualitas terkait dengan strategi dan praktik organisasi.

Kehadiran wanita di dewan perusahaan telah mendapatkan banyak kepentingan karena peran efektif mereka dalam pemantauan kinerja manajerial. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dideteksi pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi pembayaran beban pajak, di mana pada umumnya pria kurang patuh dibandingkan wanita dalam

pembayaran pajak perusahaan. Sehingga dengan adanya keberadaan dewan direksi perempuan akan mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan (Jarboui et al., 2020). Richardson et al. (2016) menyatakan bahwa dalam hal pelaporan perusahaan dan masalah keuangan wanita lebih menghindari risiko dibandingkan dengan direktur pria. Perempuan membawa sudut pandang yang berbeda ke ruang rapat di mana mereka dapat memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan dibandingkan dengan dewan direksi yang semuanya laki-laki, wanita cenderung berkontribusi positif pada fungsi umum dan pertimbangan dewan dengan meningkatkan tingkat kepercayaan dewan terhadap berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Dewan yang beragam cenderung terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam, termasuk penyelesaian masalah yang sulit.

Boussaidi & Sidhom (2021) bahwa keragaman gender di dalam dewan direksi tampaknya merupakan faktor penting, dan merupakan kebutuhan berkelanjutan untuk memastikan pengawasan dan pemantauan. Kehadiran perempuan memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap hukum dan banyak lagi khusus di bidang perpajakan. Perempuan melakukan tindakan kontrol intensif pada pemimpin dan memiliki persentase kehadiran di rapat yang tinggi. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan terus menarik dalam penelitian kontemporer. Direktur wanita lebih disiplin dalam masalah pajak daripada pria yang kurang mematuhi aturan perpajakan,

sehingga diharapkan dengan adanya kesetaraan gender dalam dewan direksi ini dapat mengurangi adanya praktik penghindaran pajak.

Mereka mengklaim bahwa keragaman gender dewan dapat meningkatkan kualitas diskusi pada rapat dewan dan meningkatkan kemampuan dewan untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi perusahaan, pengungkapan dan pelaporan, dan perhatian yang lebih besar dari efek pengambilan keputusan. Perbedaan sikap dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pajak terhadap sistem perpajakan berdasarkan perbedaan gender. Direktur wanita juga memiliki etika dan moral yang lebih tinggi, menunjukkan pemikiran independen yang lebih besar dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan dan meningkatkan derajat kepercayaan dewan, dan lebih menghindari risiko. Dengan demikian, masuk akal untuk mengharapkan kehadiran wanita di dewan direksi secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak (Richardson et al., 2016). Hoseini et al. (2019) kehadiran perempuan di dewan direksi perusahaan, seperti kehadiran direktur eksternal, dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan karena dengan kehadirannya dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan.

2.6.3 Independensi Dewan Direksi

Definisi mengenai direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No. 40 tahun 2007, 2007). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan mengenai definisi direksi yaitu salah satu organ perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab bersama jajaran direktur. Selain tugas dan tanggung jawab, keanggotaan direksi juga telah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat regulasi yang harus dipenuhi mengenai minimal jumlah anggota direksi dalam struktur suatu perusahaan.

Hoseini et al. (2019) mengatakan bahwa Investor yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam manajemen unit ekonomi dan, dengan memilih dewan direksi dan mengawasi mereka, berjuang dengan pengelolaan unit ekonomi mereka. Hasil dari proses ini adalah pemisahan kepemilikan dari tata kelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan menyebabkan munculnya teori representasi. Teori ini berkaitan dengan kasus di mana seseorang (pemilik) memberikan tanggung jawab atas keputusan atas distribusi sumber daya keuangan dan ekonomi atau kinerja layanan di bawah kontrak tertentu kepada orang lain. Yang paling penting dari sistem ini adalah keputusan yang dapat berdampak lebih luas pada fungsi perusahaan dan harus juga

responsif terhadap berbagai pemilik kepentingan adalah dengan adanya dewan direksi yang dinamis dan koheren.

Dewan perusahaan telah menjadi subyek beberapa laporan dalam literatur karena dianggap sebagai mekanisme pilihan dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian perusahaan dari berbagai tindakan manajerial. Oleh karena itu, direksi dapat dilihat sebagai reaktor kelangsungan hidup perusahaan, dan secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam perkembangannya (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Alkurdi & Mardini (2020) mencerminkan bahwa dewan dengan lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham yang lebih besar. Banyak literatur terkait telah mengeksplorasi apakah anggota independen di dewan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan penghindaran pajak, ditemukan bahwa kehadiran anggota independen mewakili persentase yang lebih tinggi dari jumlah keseluruhan anggota dewan mengarah pada penyediaan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengendalian untuk mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan.

Selain itu, peningkatan jumlah independen anggota dewan mengarah pada penekanan penerapan tata kelola perusahaan, dan bahwa ini mengarah pada kebijakan pajak yang ketat. kurangnya independensi Direksi meningkatkan kejadian diskresi penipuan akrual dan akuntansi

yang berujung dalam praktik penghindaran pajak (Cho & Yoon, 2020). Deslandes et al. (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa peningkatan jumlah independen anggota dewan mengarah pada penekanan penerapan tata kelola perusahaan, dan bahwa ini mengarah pada kebijakan pajak yang ketat. Mendukung pelaksanaan tanggung jawab yang lebih efektif dan efisien maka, direksi perlu untuk menyelenggarakan rapat baik internal maupun gabungan dengan dewan komisaris. Rapat internal direksi diadakan dalam satu bulan minimal satu kali dan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 16 (POJK, 2014). Sama halnya dengan dewan komisaris, rapat gabungan juga perlu diselenggarakan agar kerja direksi lebih efektif. Istilah direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang mencakup independensi di antaranya tak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama serta tidak mempunyai hubungan usaha dan saham di emiten atau perusahaan publik tersebut.

2.7 Profitabilitas

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan

ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak berdasar Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Rifai & Atiningsih (2019) Profitabilitas merupakan rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Profitability yang besar akan menyebabkan perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan cara merencanakan pajak perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat berarti kinerja perusahaan semakin bagus dan hal tersebut memengaruhi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki ruang untuk memosisikan di tax planning yang mengurangi jumlah beban utang pajak.

Return on Asset (ROA) merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Profitabilitas. ROA merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan yang

memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas operasional perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan (Tiala et al., 2019).

Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa Agency Theory akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Rasio ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. kinerja dari manajemen menunjukkan besar kecilnya laba perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas. Apabila adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai efektif tax rate maka menunjukkan rasio profitabilitas tinggi. Manajer menggunakan banyak sumber untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek jika mereka mengharapkan penurunan profitabilitas masa depan. Mereka memanipulasi catatan akuntansi untuk menunjukkan penghasilan yang lebih tinggi untuk periode tertentu yang disebut sebagai penghasilan manajemen (Marwat et al., 2021).

2.8 Leverage

Muda et al. (2020) salah satu rasio keuangan yang merupakan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan adalah definisi dari leverage. Leverage pada perusahaan ada dua macam, yaitu operating leverage dan financial leverage. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan memengaruhi tarif pajak efektif, hal ini karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait struktur modal perusahaan. Utang (leverage)

adalah salah satu kebijakan pendanaan. Leverage adalah persentase perbandingan total utang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan debt to equity ratio (DER). Komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri mengindikasikan semakin besar DER, sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar sehingga dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019). Leverage memberikan pengaruh yang negatif terhadap tax avoidance. Pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah karena adanya biaya bunga yang semakin meningkat akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan. Sehingga penghematan pajak dengan memakai pemakaian kredit perusahaan pihak manajemen akan memanfaatkan pendanaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil, karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah.

Barli (2018) mengatakan bahwa Besar kecilnya leverage pada perusahaan dapat memengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi di sini Wajib Pajak masih dapat “bermain” untuk mengurangi pajaknya. Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu

perusahaan untuk dapat membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak. Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi leverage dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus. Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, upaya perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil.

Leverage merupakan penggunaan utang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. Leverage adalah rasio yang menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dengan equity yang dimilikinya (Tiala et al., 2019). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Semakin meningkat jumlah utang yang dimiliki perusahaan maka akan semakin memengaruhi aktivitas

penghindaran pajak pada perusahaan. Pihak manajemen perusahaan akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya laba yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak (Muda et al., 2020). Semakin tinggi leverage maka akan semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, memberikan bukti bahwa meningkatnya jumlah pendanaan yang diperoleh dari utang akan mengakibatkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

2.9 Perusahaan Manufaktur

Corporate Finance Institute (CFI) menyatakan bahwa Manufaktur mengacu pada pemrosesan produk jadi dari bahan mentah menggunakan berbagai metode, tenaga manusia, dan peralatan sesuai dengan rencana terperinci dengan cara yang hemat biaya. (CFI, 2022). Perusahaan manufaktur menurut CFI (2022) bisa juga diartikan sebagai orang atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan mentah dengan menggunakan berbagai alat, peralatan, dan proses, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen, grosir, distributor, pengecer, atau produsen lain untuk produksi barang yang lebih kompleks. Dengan menambahkan nilai pada bahan mentah, manufaktur menciptakan kekayaan dalam bentuk laba, menjadikannya usaha

yang menguntungkan. Berdasarkan informasi dari IDNFinancials yang merupakan Platform Video dan Teknologi untuk Bursa Efek Indonesia yang bermitra dengan penyedia data, berita, dan perusahaan terbaik untuk memproses dan menyusun informasi tentang pasar saham Indonesia. Melalui platform IDNFinancials, mereka ingin mempromosikan dan mendorong transparansi yang lebih besar dalam industri keuangan Indonesia. Dengan tujuan utama adalah menjadi tujuan utama bagi investor lokal dan regional untuk mendapatkan berita dan detail terbaru dan terkini tentang perusahaan publik Indonesia (IDNFinancials, 2022). Dalam platform IDNFinancials (2022) membagi ke dalam sembilan (9) sektor yaitu agrikultur, industri dasar dan kimia, konsumsi, keuangan, infrastruktur, pertambangan, aneka industri, perdagangan jasa investasi, dan properti real estate dan bangunan. Dari kesembilan sektor tersebut yang merupakan perusahaan manufaktur adalah industri dasar dan kimia, konsumsi, dan aneka industri. Di mana dari ketiga sektor dibagi menjadi beberapa sub-sektor, di antaranya:

Tabel 2. 1 Industri Dasar dan Kimia

1. Sub sektor Pakan Ternak	5. Sub sektor Kimia
2. Sub Sektor Semen	6. Sub sektor Plastik dan kemasan
3. Sub sektor Keramik, porselen, dan kaca	7. Sub sektor Pulp dan kertas
4. Sub sektor Logam dan sejenisnya	8. Sub sektor Kayu dan pengolahannya

Tabel 2. 2 Konsumsi

1. Sub sektor Kosmetik dan barang keperluan rumah tangga
2. Sub sektor Makanan dan minuman
3. Sub sektor Peralatan rumah tangga
4. Sub sektor Farmasi
5. Sub sektor Rokok

Tabel 2. 3 Aneka Industri

1. Sub sektor Mesin dan alat berat
2. Sub sektor Otomotif dan komponen
3. Sub sektor Tekstil dan garmen
4. Sub sektor Alas kaki
5. Sub sektor Kabel
6. Sub sektor Elektronika

2.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dibahas, di antaranya:

Tabel 2. 4 Tinjauan Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021)	Independen: ● Independensi dewan direksi ● Fungsi gabungan ● Diversitas gender dalam dewan direksi ● Kepemilikan manajerial	Diversitas gender dalam dewan direksi, fungsi gabungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan independensi dewan direksi dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara

		● Konsentrasi kepemilikan ● Kepemilikan institusional Dependen: Agresivitas Pajak	signifikan dan positif terhadap agresivitas pajak.
2.	(Alkurdi & Mardini, 2020)	Independen: ● Kepemilikan manajerial ● Kepemilikan asing ● Kepemilikan institusional Dependen: Penghindaran pajak	Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak, untuk variabel kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak
3.	(Hoseini et al., 2019)	Independen: ● Dewan direksi wanita ● Ukuran dewan direksi Dependen: Penghindaran pajak	Dewan direksi wanita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.	(Salhi, Al Jabr, et al., 2020)	Independen: ● Ukuran dewan direksi ● Komisaris independen ● Diversitas gender dalam dewan direksi	Ukuran dewan direksi, diversitas gender dalam dewan direksi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak, dan konsentrasi kepemilikan, komisaris independen

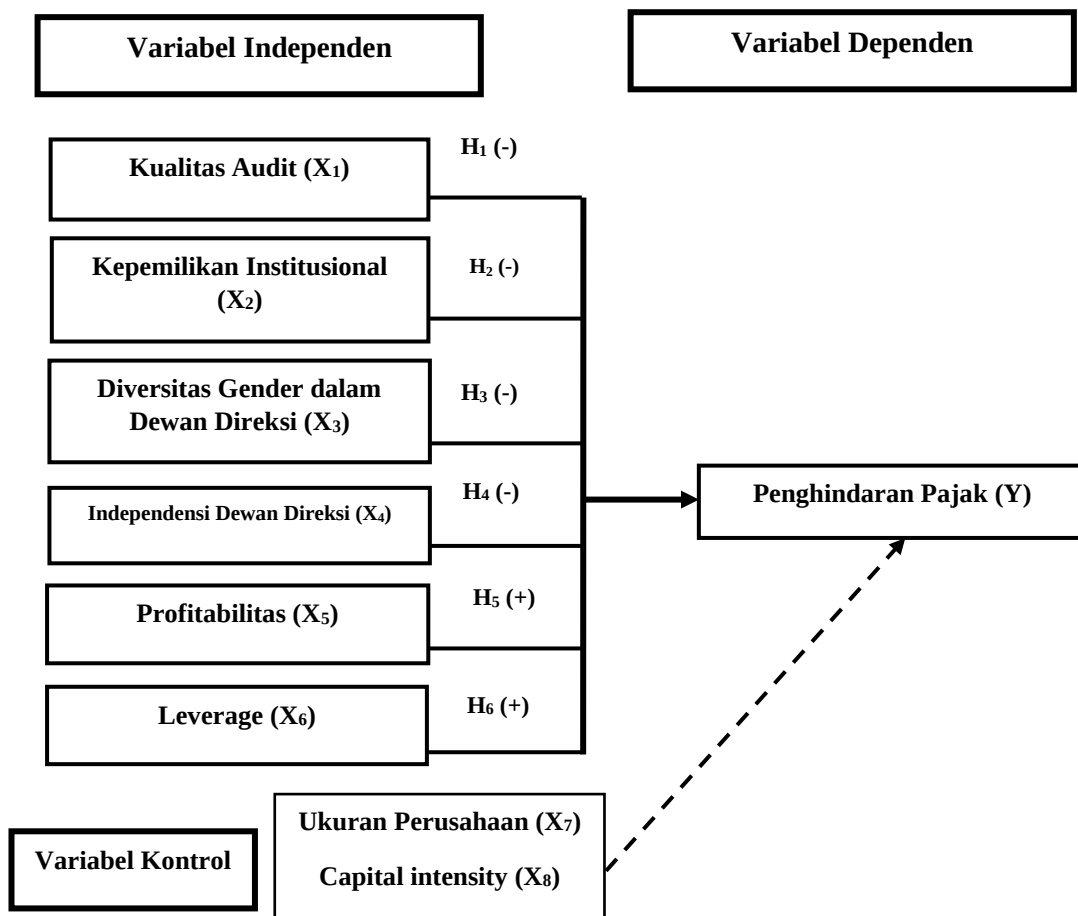
		● Konsentrasi kepemilikan Dependen: Penghindaran pajak	berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5.	(Alkurdi & Mardini, 2020)	Independen: ● Kepemilikan manajerial ● Kepemilikan asing ● Kepemilikan institusional Dependen: Penghindaran pajak	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.
6.	(Chytis et al., 2020)	Independen: ● Independensi dewan direksi ● Ukuran dewan direksi ● Konsentrasi kepemilikan ● Dualitas CEO ● Kualitas audit ● Ukuran perusahaan ● Leverage ● Likuiditas Dependen: Penghindaran pajak	Independensi dewan direksi, dualitas CEO, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel ukuran dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, kualitas audit, leverage, dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	(Rifai & Atiningsih, 2019)	Independen: ● Leverage ● Profitabilitas	Profitabilitas, <i>capital intensity</i> dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap penghindaran

		• Capital Intensity • Manajemen Laba Dependen: Penghindaran pajak	pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	(Muda et al., 2020)	Independen: • Ukuran Perusahaan • Profitabilitas • Leverage • Manajemen Laba Dependen: Penghindaran pajak	Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, tunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu diketahui masih ada perbedaan hasil penelitian sehingga perlu digali lebih lanjut penelitian dengan topik tersebut dengan berbagai variasi di dalamnya

2.11 Kerangka Konseptual

Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). Sedangkan variabel independen adalah kualitas audit (X_1), corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional (X_2), diversitas gender dalam dewan direksi (X_3), dan independensi dewan direksi (X_4), profitabilitas (X_5), leverage (X_6), dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan (X_7) dan Capital intensity (X_8).

2.12 Perumusan Hipotesis

Penjelasan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini serta penjelasan mengenai telah dilakukannya penelitian-penelitian terdahulu, maka pada sub bab ini akan diuraikan mengenai perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis tersebut akan dikembangkan atau dibagi dalam 7 bagian yaitu Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, pengaruh diversitas gender dalam dewan direksi terhadap Penghindaran pajak, pengaruh independensi dewan direksi terhadap penghindaran pajak, pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran pajak, pengaruh leverage terhadap Penghindaran pajak. Untuk variabel kontrol perumusan hipotesisnya adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dan pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya akan dibahas secara rinci sebagai berikut.

2.12.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Gaaya et al. (2017) menurut perspektif teori agensi, kualitas audit penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham eksternal. Kualitas audit adalah korporat fitur tata kelola yang mengontrol tindakan manajer dan mencegah manipulasi akuntansi dan semua kegiatan penipuan. Auditor eksternal diharapkan untuk memberikan penilaian independen atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, auditor eksternal menilai apakah klien mereka mengikuti posisi pajak agresif yang mungkin termasuk dalam

wilayah abu-abu dan dapat dideteksi oleh otoritas pajak. Auditor berkualitas tinggi memiliki lebih sedikit insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan, karena mereka akan menanggung konsekuensi berbahaya jika otoritas pajak mendeteksi posisi agresif mereka mungkin kehilangan reputasi dan kepercayaan di hadapan publik. Perusahaan yang diaudit oleh audit Big 4 umumnya dicirikan oleh penggunaan yang lebih baik pada staf yang berkualitas, teknologi unggul, sumber daya perencanaan dan audit yang lebih efisien, dan mereka diharapkan dapat menghadirkan proses audit yang lebih baik dan lebih cepat daripada non-Big-4 (Gontara & Khlif, 2020).

Dang & Nguyen (2022) yang menyatakan bahwa peran utama audit eksternal adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencegah manajemen laba selain itu juga, audit eksternal dapat meningkatkan kinerja internal perusahaan. Temuan ini memberikan beberapa implikasi bahwa perusahaan besar harus fokus pada karakteristik komite audit. Auditor Big4 umumnya dianggap memberikan tingkat kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor non Big4 karena mereka memiliki lebih banyak modal reputasi yang berisiko jika terjadi kegagalan audit dan akan kurang bergantung secara finansial pada satu klien (Corten et al., 2018). Perusahaan audit Big4 mungkin menghindari kualitas rendah atau berisiko tinggi klien untuk meminimalkan risiko litigasi. Oleh karena itu, klien potensial dengan risiko kesulitan keuangan yang signifikan sebagai hasil dari leverage

yang tinggi dapat dihindari oleh perusahaan audit Big4. Kurniawati et al. (2020) beranggapan bahwa kualitas audit sebagai fitur penting yang cenderung membatasi perilaku oportunistis manajerial dan membatasi adanya misalokasi. Audit berkualitas tinggi, membuat manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi kualitas auditor adalah, semakin rendah penghindaran pajak klien audit (Abid & Dammak, 2021). Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik yang berdampak pada penurunan BTD perusahaan. Penurunan nilai BTD perusahaan akan berdampak pada penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kualitas Audit Berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.12.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran

Pajak

Hoseini et al. (2019) Mengikuti teori agensi, di sisi lain sebagian besar pemilik fokus pada kekayaan dan kepentingan perusahaan di bawah naungan kontrol mereka, sehingga menghindari dalam hal membayar pajak perusahaan. Oleh karena itu, besarnya pajak yang dibayarkan berkorelasi dengan jenis kepemilikan, kelas struktur kepemilikan terbagi atas 3 jenis yaitu, kepemilikan manajerial, asing dan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional mampu

memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan. Semakin banyak kepemilikan saham institusi menyebabkan semakin ketat pengawasan yang dipegang pihak luar terhadap sebuah perusahaan (Dakhli, 2021) (Marwat et al., 2021).

Alkurdi & Mardini (2020) menjelaskan hubungan bisnis antara principal (pemegang saham dan regulator) dan agen (manajer perusahaan) adalah tujuan utama dari teori keagenan. Secara khusus, pemisahan kepemilikan dan kontrol antara manajer dan pemilik perusahaan menyebabkan konflik kepentingan yang salah satunya berdampak pada keputusan pajak perusahaan yang dapat mencerminkan pandangan keduanya yaitu manajemen dan pemegang saham, karena ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Manajemen memenuhi kepentingannya sendiri dengan meningkatkan kompensasi melalui pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan kinerja, sementara pemegang saham ingin meminimalkan membayar pajak yang masih harus dibayar dan berfokus pada peningkatan nilai saham mereka. Sehingga perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan yang disebabkan oleh penghindaran pajak dengan menggunakan pihak ketiga, seperti struktur kepemilikan, yang membantu memantau keputusan manajer yang pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Singkatnya, struktur

kepemilikan cenderung memberlakukan kebijakan untuk mengurangi dampak yang relatif besar dari aktivitas penghindaran pajak.

Alkurdi & Mardini (2020) penurunan keterlibatan dengan teknik penghindaran pajak perusahaan dapat ditekan dengan dimiliki dewan dengan proporsi investor institusional yang tinggi. Selain itu, masalah keagenan serta mengurangi praktik penghindaran pajak adalah salah satu manfaat pemantauan yang tersedia melalui kepemilikan institusional yang memiliki persentase saham yang lebih tinggi kemungkinan untuk dihindari adalah. Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.3 Pengaruh Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi Terhadap

Penghindaran Pajak

Jarboui et al. (2020) teori keagenan dalam menjelaskan dampak keragaman gender dalam dewan direksi, di mana teori ini menjelaskan bahwa direktur dewan wanita membawa perspektif yang lebih luas, yang meningkatkan dewan kemandirian sementara juga mengurangi biaya agensi, penghindaran pajak dan, konsekuensi lainnya yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan transparansi informasi.

Teori lain yang menjelaskan hubungan antara perempuan di dewan direksi dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan adalah teori

pemangku kepentingan (Jarboui et al., 2020). Manajer harus memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai "orang-orang itu" atau kelompok yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, atau yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan". Jadi, hubungan antara teori pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan terbukti.

Jarboui et al. (2020) juga menegaskan bahwa perempuan di dewan direksi tidak hanya menarik pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lain dari perusahaan. Teori pemangku kepentingan adalah teori menjelaskan bagaimana keragaman gender dewan direksi memberikan kinerja sosial. Dengan cara ini, penggabungan direktur wanita di dewan direksi perusahaan dapat mengurangi penghindaran pajak.

Richardson et al. (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi partisipasi perempuan di dewan direksi melalui pemantauan yang lebih efektif akan mengurangi tingkat penghindaran pajak dengan cara yang sama seperti yang dicapai dengan direktur luar. keragaman gender dewan dapat meningkatkan kualitas diskusi pada rapat dewan dan meningkatkan kemampuan dewan untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi perusahaan, pengungkapan dan pelaporan, dan perhatian yang lebih besar dari efek pengambilan keputusan. mengharapkan kehadiran wanita di dewan

direksi secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Dewan direksi wanita mengangkat lebih banyak masalah dan mengajukan pertanyaan sulit, menantang manajemen untuk menjelaskan sudut pandangnya.

Dewan direksi wanita membantu mengurangi tingkat konflik, sehingga meningkatkan efektivitas, kehadiran dewan direksi perempuan membantu melahirkan wacana produktif yang “melibatkan penyajian perspektif dan sudut pandang yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menghasilkan dalam menghasilkan lebih banyak alternatif dan pengambilan keputusan yang lebih berkualitas terkait dengan strategi dan praktik organisasi sehingga mengurangi penghindaran pajak (Deslandes et al., 2020).

Hoseini et al. (2019) menyatakan bahwa nilai-nilai spiritual perusahaan akan meningkat melalui perempuan kehadiran di dewan perusahaan, sehingga menghasilkan pengurangan penghindaran pajak. Sebagian besar studi sebelumnya tentang peran perempuan di dewan perusahaan didedikasikan untuk menyelidiki peran mereka dalam meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi asimetri informasi sehingga akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diversitas Gender Dalam Dewan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.4 Pengaruh Independensi Dewan Direksi Terhadap Penghindaran

Pajak

Marzuki & Syukur (2021) menyatakan bahwa untuk variabel tata kelola perusahaan, yang didasarkan pada teori keagenan, dewan direksi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak pajak. Direktur independen lebih protektif terhadap kepentingan pemegang saham dan dengan demikian dapat menghindari oportunisme manajemen. Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk mengevaluasi strategi pajak agresif secara lebih objektif dan dengan demikian mengurangi tingkat penghindaran pajak. Direktur independen lebih protektif terhadap kepentingan pemegang saham dan dengan demikian dapat menghindari oportunisme manajemen. Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk mengevaluasi strategi pajak agresif secara lebih objektif dan dengan demikian mengurangi adanya praktik penghindaran pajak (Marzuki & Syukur, 2021).

Salhi et al. (2020) berpendapat bahwa direktur independen dapat memperkuat penghindaran pajak karena mereka dapat memberikan pengetahuan dan latar belakang yang berguna dari mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Direktur independen memiliki peran penting dalam pengurangan oportunisme manajerial karena kontrol yang efektif dari kebijakan manajemen. Tingginya kehadiran direktur independen dalam dewan direksi

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mengurangi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan. Dalam hal independensi dewan, penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa anggota dewan dengan lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham yang lebih besar. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan penghindaran pajak (Boussaidi & Sidhom, 2021).

Kehadiran anggota independen mewakili persentase yang lebih tinggi dari jumlah keseluruhan anggota dewan mengarah pada penyediaan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengendalian untuk mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan (Deslandes et al., 2020). Boussaidi & Sidhom (2021) menemukan bahwa tingginya kehadiran direktur independen dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mengurangi tingkat penghindaran pajak dari perusahaan. Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: Independensi Dewan Direksi Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Pajak dihitung berdasarkan laba yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi jumlah laba yang dimiliki perusahaan, membuat semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hidayat (2018) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang, profitabilitas dapat dipromosikan pada rasio *Return On Asset (ROA)* di mana membandingkan laba setelah pajak dengan total aset. Rasio keuangan, salah satunya dengan Return on asset (ROA) merupakan suatu ukuran dalam menilai kinerja perusahaan yaitu Profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset yang dimilikinya. Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dan semakin efektif dan efisien kinerja perusahaan tersebut dari mengelola aset perusahaan ROA merupakan rasio yang mengukur pengembalian atas total aset dengan

membandingkan laba bersih dengan total aset. (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik akan memperoleh pajak yang optimal, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memosisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. Anggraeni & Oktaviani (2021) Laba perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja dari manajemen, Jika dikaitkan dengan teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai efektif tax rate. Sehingga manajemen perusahaan dimungkinkan melakukan upaya-upaya untuk menekan angka beban pajak perusahaan agar menghasilkan beban pajak yang optimal, yaitu menggunakan cara-cara yang legal atau tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Apabila profitabilitas tinggi, menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat maka profit perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, atau dapat

dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₅: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.6 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Rani et al. (2018) mendefinisikan leverage sebagai rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh utangnya. Leverage diproksikan dengan debt equity ratio (DER). DER diukur sebagai rasio total kewajiban terhadap total ekuitas. Di Indonesia, pemerintah secara khusus mengatur besaran DER sebagai anti pajak ukuran penghindaran. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang menggunakan utang untuk mengambil keuntungan dari biaya bunga.

Leverage merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar rasio utang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio Leverage yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang akan mengurangi laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Ketika perusahaan lebih banyak

mengandalkan pembiayaan dari utang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki BTD yang lebih rendah. Hal ini karena perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang lebih tinggi, akan membayar bunga pajak yang lebih tinggi sehingga membuat nilai BTD menjadi lebih rendah (Barli, 2018).

Muda et al. (2020) menjelaskan bahwa Leverage pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Adanya utang atau leverage pada perusahaan akan menimbulkan beban tetap yaitu adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Selain itu, leverage yang tinggi dalam suatu perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber dananya dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Utang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga penggunaan utang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman atau utang. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆ : Leverage Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.12.7 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel kontrol yang juga dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya dalam penelitian dengan topik penghindaran pajak, meliputi Prasad & Junni (2017) dan Salhi et al. (2020). Cho & Yoon (2020) Variabel kontrol dimasukkan untuk memperhitungkan variabel-variabel yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak perusahaan dan digunakan dalam berbagai penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak. variabel kontrol digunakan untuk mengontrol efek lain pada penghindaran pajak selain itu juga untuk mengontrol hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, Fungsi dari variabel kontrol ini adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias dan supaya lebih akurat untuk mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik (Salhi, Riguen, et al., 2020). Sejalan dengan penelitian dari Alkurdi &

Mardini (2020) di mana penelitiannya juga menggunakan variabel kontrol dengan memasukkan faktor-faktor penting ini untuk memperkaya temuannya. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2.12.7.1 Ukuran Perusahaan

Kondisi di mana menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat menyebabkan manajemen untuk menerapkan manajemen laba yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar Perusahaan besar cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Karena itu, semakin besar perusahaan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang akan menurunkan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. (Rani et al., 2018).

2.12.7.2 Capital intensity

Capital intensity digunakan untuk mengukur investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, peralatan, kendaraan dan *properti*. Perusahaan akan meningkatkan investasi asetnya sehingga menekan beban *capital intensity* pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Mgammal (2020) *capital intensity* digunakan untuk mengontrol tingkat pemanfaatan peralatan dan mesin dalam kegiatan perusahaan, variabel intensitas modal diukur dengan peralatan dan rasio mesin kotor terhadap total aset. Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan penghindaran pajak,

yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Untuk itu capital intensity digunakan untuk mengendalikan kemungkinan praktik penghindaran pajak (Mgammal, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan beberapa variabel antara lain: kualitas audit, corporate governance, profitabilitas, dan leverage. Data yang berasal dari sumber atau catatan sebelumnya merupakan data sekunder. Data sekunder yang akan dikumpulkan kemudian digunakan untuk uji dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id.

3.1 Pemilihan populasi, sampel, dan pengumpulan data

3.1.1 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020 yang dianalisis melalui laporan tahunan perusahaan. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi perusahaan adalah karena:

1. Permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya yang dimulai dengan proses produksi yang tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi produk yang siap dijual. Di mana hal ini dilakukan

sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga membutuhkan sumber dana yang akan digunakan pada aktiva tetap perusahaan.

2. Sektor manufaktur merupakan jenis usaha yang berkembang pesat dan memiliki ruang lingkup yang sangat besar paling banyak terdaftar di BEI, sehingga dianggap dapat mewakili dari keseluruhan emiten yang terdaftar di BEI.
3. Salah satu perusahaan manufaktur yaitu, sektor barang konsumsi memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan sektor ini memiliki laba yang cukup besar
4. Pemerintah melalui kemenkeu merilis data kinerja realisasi perpajakan (APBN KITA, 2017-2020). Terdapat lima sektor utama penyumbang pajak terbesar yaitu adalah manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, konstruksi, dan pertambangan. Sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar dibanding sektor lainnya. Berdasarkan dari APBN KITA 2017-2020 sektor manufaktur menduduki peringkat pertama sebagai penyumbang pajak terbesar dari kelima sektor utama yang ada.

3.1.2 Sampel

Populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kriteria adalah pengertian dari sampel, sampel

penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, Adapun kriteria-kriteria ditentukan berdasarkan tujuan atau masalah penelitian, yang ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan manufaktur yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) maksimal dari tahun 2016.
3. menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut dari tahun 2016-2020 dan perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) .
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian
5. Perusahaan sampel adalah perusahaan yang memublikasikan Laporan Keuangan dengan mata uang rupiah.
6. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki data variabel secara lengkap.

Dengan metode *purposive sampling* ini dapat memberikan kemudahan dalam penelitian ini untuk memilih perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan yang terdapat dalam <http://www.idx.co.id>.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). Penghindaran pajak adalah praktik yang mengurangi pajak perusahaan terhadap sebelum pajak dari keuntungan akuntansi

(Chouaibi, 2021). Boussaidi & Sidhom (2021) pengelolaan penghasilan kena pajak yang lebih rendah melalui praktik penghindaran pajak dan karena itu mencakup kegiatan legal dan ilegal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengukuran variabel penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan proksi *Book-Tax Difference* (BTD). Gaaya et al. (2017) *Book-Tax Difference* (BTD) yang biasa digunakan dalam literatur perpajakan yang dilatarbelakangi karena dari sisi perpajakan dan akuntansi memiliki ketentuan dan aturan yang berbeda. Dari sisi akuntansi untuk membuat laporan keuangan dalam hal ini laporan laba rugi didasarkan pada PSAK yang berbasis IFRS, sementara dalam pajak laporan laba rugi fiskal didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalah UU PPh. Karena terdapat pedoman dalam penyusunan laba ruginya maka dimungkinkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak. Perbedaan inilah yang seringkali digunakan untuk penelitian yang dikenal dengan *Book-Tax Difference* (BTD). Karena perusahaan memiliki kecenderungan meminimalkan beban pajaknya melalui meminimalkan laba fiskalnya sehingga hal itu akan tercermin dalam BTD suatu perusahaan. Ketika laba fiskal kecil maka BTD akan semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi BTD suatu perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak dan begitu pula sebaliknya. Perhitungannya adalah (laba akuntansi) perusahaan

dikurangi taksiran pendapatan kena pajak (laba fiskal / laba kena pajak) yang diskalakan dengan total aset, kenapa diskalakan dengan total aset tujuannya adalah untuk mengontrol ukuran perusahaan karena antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain memiliki laba akuntansi yang beragam, sehingga membagi hasil BTD tadi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Untuk menghitung BTD masing-masing perusahaan, pertama-tama diperkirakan dahulu penghasilan kena pajak berdasarkan beban pajak kini dibagi dengan tarif pajak menurut undang-undang yang berlaku pada setiap negara setelah itu hasilnya akan menjadi pengurang dari laba sebelum pajak penghasilan atau yang dinamakan laba akuntansi. Perusahaan yang terlibat dalam tingkat penghindaran pajak perusahaan yang lebih tinggi memiliki perbedaan buku-pajak yang lebih besar atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi BTD maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Abid & Dammak (2021) Book-Tax Difference (BTD) adalah metode pengukuran perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, Perusahaan yang terlibat dalam tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi memiliki perbedaan buku-pajak yang lebih besar (Gaaya et al., 2017). Adapun rumus untuk menghitung *Book-Tax Difference* (BTD) adalah sebagai berikut (Cabello et al., 2019):

$$\text{BTD} = \text{Laba akuntansi} - \text{Laba fiskal}$$

Di mana:

Laba akuntansi = Laba sebelum pajak

Laba fiskal = Beban pajak kini: Tarif PPh badan yang berlaku

*Beban pajak kini: beban yang ditanggung perusahaan pada periode tertentu

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - (\text{Beban pajak kini: Tarif PPh badan})}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen nya yaitu kualitas audit, corporate governance, profitabilitas, dan leverage. Proksi yang akan digunakan untuk corporate governance adalah kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi.

3.2.2.1 Kualitas Audit

Kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, keahlian auditor dan kode etik profesi akuntan public adalah definisi dari kualitas. Baik buruknya kualitas auditor dapat dilihat dari bagaimana auditor melaksanakan proses audit, kesesuaiannya dengan SPAP dan prinsip auditor untuk berpegang teguh pada kode etik profesi akuntan publik. Madah Marzuki & Syukur (2021) mengatakan dalam penelitiannya KAP *The Big Four* telah dikaitkan dengan kualitas audit. KAP *The Big Four* lebih mungkin untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan dan meningkatkan pemantauan dari perusahaan audit non-*Big Four*. Selain itu, KAP *The Big Four* memiliki keahlian dan penilaian,

kemampuan yang lebih luar biasa untuk melawan tekanan klien dan lebih memperhatikan reputasi. Mereka juga memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih berkembang dalam melakukan strategi dan proses audit yang sistematis.

Mempekerjakan auditor *Big Four* mengurangi praktik penghindaran pajak di antara klien mereka dibandingkan dengan auditor non-*Big Four*. Kredibilitas dan nama merek auditor *Big Four* dipertaruhkan jika mereka melakukan tugas selain jasa audit. Kualitas auditor diproksikan dengan membedakan ukuran Kantor Akuntan Publik menjadi KAP *The Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy*, di mana perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* diberi nilai 1, dan apabila diaudit oleh KAP selain *The big four* diberi nilai 0 (Gaaya et al., 2017) (Madah Marzuki & Syukur, 2021). Sedangkan untuk proksi yang digunakan adalah BIG4 (Gaaya et al., 2017).

3.2.2.2 Corporate Governance

3.2.2.2.1 Kepemilikan Institusional

Mekanisme kepemilikan merupakan alat pengendali utama dalam tata kelola perusahaan. Beberapa dari insentif pemilik dipengaruhi oleh teori pemangku kepentingan (Hoseini et al., 2019). Dakhli (2021) Kepemilikan Institusional dipandang sebagai mekanisme kunci tata kelola perusahaan yang

melakukan pemantauan yang efektif atas keputusan manajemen yang terkait dengan penghindaran pajak. perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi kurang agresif terhadap penghindaran pajak karena investor institusional lebih peduli tentang konsekuensi jangka panjang dari strategi penghindaran pajak (Boussaidi & Sidhom, 2021). Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu di mana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar. Simbol yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel kepemilikan Institusional yaitu INST, dengan perhitungan (Dakhli, 2021):

$$INST = \frac{\text{Saham Investor Institusional}}{\text{Total Saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

3.2.2.2.2 Diversitas Gender dalam Dewan direksi

Richardson et al. (2016) mengkaji hubungan antara perempuan di dewan direksi dan tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa dewan yang beragam dapat melakukan pemantau yang lebih ketat Selain itu, lebih tinggi partisipasi perempuan di dewan melalui pemantauan yang lebih efektif akan berdampak berkurangnya praktik Penghindaran pajak. Dengan adanya dewan yang

beragam cenderung terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam, termasuk penyelesaian masalah yang sulit dan kompleks dengan melalui diskusi dewan yang lebih terinformasi. Simbol yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel diversitas gender dalam dewan direksi yaitu DIV_WOMEN Deslandes et al. (2020), dengan perhitungan: (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021)

$$\text{DIV_WOMEN} = \frac{\text{Jumlah Wanita dalam Direksi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dewan Direksi}} \times 100\%$$

3.2.2.2.3 Independensi Dewan Direksi

Direktur independen memiliki peran penting dalam pengurangan oportuniste manajerial karena kontrol yang efektif dari kebijakan manajemen, Boussaidi & Sidhom (2021) kehadiran direktur independen dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak dari perusahaan. Alkurdi & Mardini (2020) mengatakan kehadiran anggota independen mewakili persentase yang lebih tinggi dari jumlah keseluruhan anggota dewan mengarah pada penyediaan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengendalian untuk mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan. Selain itu, bahwa peningkatan jumlah independen anggota dewan mengarah pada penekanan penerapan tata kelola perusahaan,

dan bahwa ini mengarah pada kebijakan pajak yang sesuai hukum yang berlaku. Simbol yang digunakan pada penelitian ini untuk variabel Independensi dewan direksi adalah BIND (Alkurdi & Mardini, 2020). Dengan menggunakan rumus:

$$\text{BIND} = \frac{\text{Jumlah Dewan Direksi Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Direksi}} \times 100 \%$$

3.2.2.3 Profitabilitas

Return on Asset yang merupakan proksi dari profitabilitas yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, ROA mengacu pada seberapa efisien organisasi dengan penggunaan asetnya (Pointer & Khoi, 2019). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Rumus yang digunakan dalam ROA adalah (Amidu et al., 2019) (Saka et al., 2019):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.2.2.4 Leverage

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi. *Debt to equity ratio (DER)* untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio tersebut menggambarkan bagaimana sumber dana operasi perusahaan. Proksi leverage ini menggunakan simbol LEV (Chouaibi, 2021). Dengan rumus: (Mohanadas et al., 2020)

$$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.2.3 Variabel Kontrol

3.2.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan dengan lebih besar pendapatan lebih agresif dalam penghindaran pajak, Perusahaan cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan laba dan strategi penghindaran pajak yang agresif untuk melindungi diri dari pengawasan otoritas pajak Fasita & Firmansyah (2022). Proksi yang digunakan dalam variabel ini adalah SIZE (Salhi, Riguen, et al., 2020). Berdasarkan penelitian Rani et al. (2018) Ukuran perusahaan diukur sebagai logaritma natural dari total aset (SIZE). Perusahaan yang memiliki aset besar

tergolong perusahaan skala besar. Perusahaan yang memiliki aset besar mampu menghasilkan laba yang besar sehingga cenderung menghindari Pajak.

$$SIZE = \ln (\text{Total Asset})$$

*Ln = Logaritma Natural

3.2.3.2 Capital intensity

Capital intensity disimbolkan CAPT (Mgammal, 2020) . Capital intensity perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Proporsi aset tetap di dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki adalah Capital intensity. Intensitas aset diperoleh diukur sebagai rasio aset bersih, pabrik dan peralatan terhadap total aset (Zeng, 2019).

$$CAPNT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.3 Alat Analisis

Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (Y). Untuk variabel independennya adalah kualitas audit (X_1), corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional (X_2), diversitas gender dalam dewan direksi (X_3), independensi dewan direksi (X_4), profitabilitas (X_5), dan leverage (X_6), dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan (X_7), dan Capital intensity (X_8). Berangkat dari kerangka konseptual ini maka metode analisis yang akan digunakan untuk menguji sampel dalam penelitian ini adalah metode analisis

regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 25. Sedangkan untuk alat statistik yang digunakan untuk menguji masing-masing hipotesis yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji ketepatan model. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi (Karandagh et al., 2021). Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai rata-rata (mean) digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata (Ghozali, 2018).

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ghozali (2018) model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistik maka dilakukan uji normalitas menggunakan uji

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), Demir et al. (2021) yang menyatakan bahwa Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menyelidiki apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Jika didapatkan angka signifikan jauh di atas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik, Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Data residual terdistribusi normal
2. H_A : Data residual terdistribusi tidak normal

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model dapat dikatakan baik jika telah memenuhi rangkaian uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Salah satu syarat untuk menggunakan persamaan Linear berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan disebabkan tujuannya untuk mengetahui apakah model yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdapat penyimpangan asumsi klasik.. Asumsi asumsi tersebut di antaranya:

3.3.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari Mozid et al. (2021): (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (*VIF*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (*VIF*). Nilai *tolerance* di atas ($>$) $0,1$ dan nilai *VIF* di bawah nilai *VIF* ($<$) 10 .

1. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.3.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada *problem* autokorelasi.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Hal ini sering ditemukan dalam data runtut waktu (Time series) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung memengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali, 2018). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satu nya adalah Uji Durbin – Watson (DW test). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi Linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2018). Pengujian Durbin-Watson (DW test) dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Durbin-Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

3.3.3.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat hipotesis:

1. Model regresi mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
2. Model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

3.3.4 Uji Goodness of Fit Suatu Model / Uji Ketepatan Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari signifikansi keseluruhan dari regresi sampel (uji statistik F), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima.

3.3.4.1 Uji F

Uji F ini menguji ketepatan model regresi (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018). Uji Statistik F adalah pengujian untuk menguji secara fit variabel X terhadap Y. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan. Ribeiro et al. (2021) Tingkat signifikansi 5% dipertimbangkan signifikan secara statistik. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Namun sebaliknya, nilai signifikansi $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh fit pada variabel X terhadap variabel Y.
2. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel X berpengaruh secara fit terhadap variabel Y.

3.3.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel

dependen secara simultan semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen maka model dikatakan layak. Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak. (Ghozali, 2018).

3.3.4.3 Uji t

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Pengujian ini dilakukan secara parsial dan simultan. Uji parsial (uji t) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel variabel independen, yaitu kualitas audit, corporate governance, profitabilitas dan leverage secara individual terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa uji signifikan parameter individual atau biasa disebut dengan uji statistik t dilakukan karena bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu atau masing-masing variabel independen secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis data yang valid dan mendukung hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis.

Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu H_0 dan H_a . H_0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji, sedangkan H_a adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan H_0 . Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut (Gul & Atakli, 2021):

H_0 =Terdapat pengaruh antara kualitas audit, corporate governance, profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak.

H_a =Tidak terdapat pengaruh antara kualitas audit, corporate governance, profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak.

2. Menentukan taraf nyata (α).

Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya.

Penelitian ini menggunakan taraf nyata (α) = 0,05

3. Menentukan kriteria pengujian.

- a. H_0 diterima apabila nilai signifikansi $t < 0.05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Membuat kesimpulan apakah H_0 diterima atau ditolak

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda (Egbunike & Okerekeoti, 2018). Analisis regresi berganda mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018).

3.3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi Linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Kualitas Audit, Corporate Governance, Profitabilitas, dan leverage Perusahaan pada penghindaran pajak. Analisis regresi Linear berganda ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan uji hipotesis. Model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi Linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Akbari et al., 2019)

$$\begin{aligned} \text{TAX AVOIDANCE} = & \beta_0 + \beta_1 \text{BIG4} + \beta_2 \text{INST} + \beta_3 \text{DIV_WOMEN} + \beta_4 \\ & \text{BIND} + \beta_5 \text{ROA} + \beta_6 \text{LEV} + \beta_7 \text{SIZE} + \beta_8 \\ & \text{CAPTN} + e \end{aligned}$$

Keterangan:

Tax Avoidance	= variabel Dependen (Penghindaran Pajak)
β	= koefisien regresi Variabel Independen
BIG4	= Kualitas Audit
INST	= Kepemilikan Institusional
DIV_WOMEN	= Diversitas Gender dalam dewan direksi
BIND	= Independensi Dewan Direksi
ROA	= Profitabilitas
LEV	= Leverage
SIZE	= Ukuran Perusahaan
CAPNT	= Capital intensity
e	= error/ Variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model

Model di atas terdiri atas variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independen, yaitu kualitas audit, corporate governance, profitabilitas dan leverage dan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan capital intensity.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

4.1.1 Hasil Pemilihan Sampel

Sampel yang dipilih dari populasi menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI selama periode 2016 sampai dengan 2020. Jumlah populasi dalam penelitian penelitian ini sebanyak 313 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020 secara berturut-turut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website www.idx.co.id. Tabel di bawah menyajikan ringkasan pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut turut selama periode 2016-2018	313
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) dari tahun 2016	(101)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut dari tahun 2016-2020	(34)
2.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2016-2020	(71)
3.	Perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan dalam mata uang selain rupiah	(25)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki data variabel secara lengkap	(17)
	Jumlah sampel yang digunakan	65
	Observasi tahun (65 x 5)	325
5.	Data outlier	(44)
	Jumlah unit analisis	281

Sumber: Hasil olah data

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020 berjumlah sebanyak 313 perusahaan, perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dari tahun 2016 sebanyak 101 perusahaan, perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut dari tahun 2016-2020 sebanyak 34 perusahaan, perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2016-2020 sebanyak 71 perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembukuan dalam mata uang selain rupiah sebanyak 25 perusahaan, dan kriteria terakhir adalah perusahaan yang tidak menyajikan data variabel secara lengkap adalah sebanyak 17 perusahaan. Sehingga

perusahaan manufaktur yang digunakan sebanyak 65 perusahaan, total data yang digunakan sebagai sampel penelitian ini sebanyak 325. Adapun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Nama Perusahaan

NO	KODE	NAMA EMITEN	TANGGAL IPO
1	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	18-12-1992
2	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	12-07-1990
3	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	27-11-1997
4	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	08-08-1990
5	EKAD	Ekadharma International Tbk.	14-08-1990
6	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	19-12-1994
7	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk	05-11-1990
8	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.	05-12-1994
9	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	24-07-1990
10	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb	05-12-1989
11	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia	22-02-2013
12	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.	29-07-1996
13	LTLS	Lautan Luas Tbk.	21-07-1997
14	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	28-06-2013
15	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	08-07-1991
16	SPMA	Suparma Tbk.	16-11-1994
17	SRSN	Indo Acidatama Tbk	11-01-1993
18	TALF	Tunas Alfin Tbk.	17-01-2014
19	TRST	Trias Sentosa Tbk.	02-07-1990
20	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	08-04-2014
21	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	09-12-1997
22	ADES	Akasha Wira International Tbk.	13-06-1994
23	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	15-01-2009
24	BISI	BISI International Tbk.	28-05-2007
25	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	08-05-1995

26	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	09-07-1996
27	CINT	Chitose Internasional Tbk.	27-06-2014
28	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	18-03-1991
29	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.	14-06-2013
30	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	11-11-1994
31	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk	01-08-1994
32	GGRM	Gudang Garam Tbk.	27-08-1990
33	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	15-08-1990
34	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	07-10-2010
35	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	14-07-1994
36	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	23-10-1989
37	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	30-07-1991
38	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb	05-07-1996
39	MERK	Merck Tbk.	23-07-1981
40	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.	30-11-2010
41	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	15-12-1981
42	MYOR	Mayora Indah Tbk.	04-07-1990
43	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	28-06-2010
44	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido	18-12-2013
45	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk.	27-12-1996
46	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	28-09-2012
47	SMAR	Smart Tbk.	20-11-1992
48	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	12-12-2013
49	STTP	Siantar Top Tbk.	16-12-1996
50	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	11-06-1990
51	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.	17-06-1994
52	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Tra	2-07-1990

53	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	11-01-1982
54	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.	18-12-2012
55	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.	29-10-2013
56	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	17-07-2001
57	ASGR	Astra Graphia Tbk.	15-11-1989
58	ASII	Astra International Tbk.	4-04-1990
59	BHIT	MNC Investama Tbk.	24-11-1997
60	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.	8-07-2005
61	JECC	Jembo Cable Company Tbk.	18-11-1992
62	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.	16-04-2002
63	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tb	29-12-2010
64	SCCO	Supreme Cable Manufacturing &	20-07-1982
65	UNTR	United Tractors Tbk.	19-09-1989

4.2 Analisis dan Hasil Penelitian

Hasil analisis dari pengujian yang dilakukan berdasarkan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengidentifikasi data yang diolah.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk melihat nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Tabel berikut ini adalah statistik deskriptif dari variabel dependen penghindaran pajak dan variabel independen yaitu kualitas audit, corporate governance, profitabilitas dan leverage dan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan capital intensity.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif (Sebelum Menghapus Data Outlier)

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	325	.0000	1.0000	.513846	.5005790
Kepemilikan Institusional	325	.0805	541.4375	71.795549	43.7569901
Diversiti Gender dalam Dewan Direksi	325	.0000	.5000	.103146	.1290062
Independensi Dewan Direksi	325	.0000	1.0000	.360871	.3011465
Profitabilitas	325	.0051	92.0997	8.216395	9.3614988
Leverage	325	.0195	84.4782	40.380167	19.9053436
Ukuran Perusahaan	325	18.7327	37.0107	29.149646	1.8548440
Capital intensity	325	.1070	85.3926	35.937570	18.7763307
Penghindaran Pajak	325	.0037	66.4139	9.784835	9.9070297
Valid N (listwise)	325				

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai N pada setiap variabel yang valid adalah 325. Adapun rincian mengenai hasil statistik deskriptif pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 9,78 dengan standar deviasi 9,9070. Nilai minimum dari penghindaran pajak adalah sebesar 0,0037 sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 66,4139.

2. Kualitas Audit

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0.5138 dengan standar deviasi 0,5. Nilai minimum dari kualitas audit adalah sebesar 0 sedangkan nilai maksimum kualitas audit sebesar 1.

3. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 71,7956 dengan standar deviasi 43,7567. Nilai minimum dari kepemilikan institusional adalah sebesar 0,0805 sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 541.4375.

4. Diversity Gender dalam Dewan Direksi

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai rata-rata diversity gender dalam dewan direksi sebesar 0,1031 dengan standar deviasi 0.1290. Nilai minimum dari diversitas gender dalam dewan direksi adalah sebesar 0 sedangkan nilai maksimum diversity gender dalam dewan direksi sebesar 0,5.

5. Independensi Dewan Direksi

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nilai rata-rata independensi dewan direksi sebesar 0,3601 dengan standar deviasi 0,3011. Nilai minimum dari independensi dewan direksi adalah sebesar 0 sedangkan nilai maksimum independensi dewan direksi sebesar 1.

6. Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.3 profitabilitas memiliki nilai rata-rata 8,2164 dengan standar deviasi 9,3615. Adapun nilai minimum dari profitabilitas adalah 0,051. Sedangkan nilai maksimum dari profitabilitas sebesar 92,0997.

7. *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.3 *Leverage* memiliki nilai rata-rata 40,3802 dengan standar deviasi 19,9053. Adapun nilai minimum dari *Leverage* adalah 0,0195. Sedangkan nilai maksimum dari *Leverage* sebesar 84.4782.

8. Ukuran perusahaan

Berdasarkan tabel 4.3 Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 29,1496 dengan standar deviasi 1,8548. Adapun nilai minimum dari Ukuran perusahaan adalah 18,7327 Sedangkan nilai maksimum dari Ukuran perusahaan sebesar 37.0107.

9. Capital intensity

Berdasarkan tabel 4.3 Capital intensity memiliki nilai rata-rata 35.9376 dengan standar deviasi 18,7763. Adapun nilai minimum dari Capital intensity adalah 0.1070. Sedangkan nilai maksimum dari Capital intensity sebesar 85.3926

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif (Setelah Menghapus Data Outlier)

Descriptive Statistiks					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	281	-1.02650	.97118	-.0525425	1.00031495
Kepemilikan Institusional	281	-1.51453	.64457	-.1274207	.52551886
Diversity Gender dalam dewan Direksi	281	-.79954	2.52278	-.0479820	.95127310
Independensi Dewan Direksi	281	-1.19833	2.12232	-.0019635	.98569518
Profitabilitas	281	-.87713	8.96046	-.1673698	.72306387
Leverage	281	-2.02763	2.21539	-.0133262	.98922241
Ukuran Perusahaan	281	-2.70899	2.34244	-.0127696	.91548961
Capital intensity	281	-1.91398	2.43639	-.0111397	1.00026641
Penghindaran Pajak	281	-.98767	1.26547	-.1897871	.55698198
Valid N (listwise)	281				

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui nilai N pada setiap variabel yang valid adalah 281. Adapun rincian mengenai hasil statistik deskriptif pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak

Berdasarkan tabel 4.4 di atas nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar – 0,1898 dengan standar deviasi 0,5570. Nilai minimum dari penghindaran pajak adalah sebesar – 0,9877 sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 1,2655.

2. Kualitas Audit

Berdasarkan tabel 4.4 di atas nilai rata-rata kualitas audit sebesar – 0,0525 dengan standar deviasi 1. Nilai minimum dari kualitas audit adalah sebesar – 1,0266 sedangkan nilai maksimum kualitas audit sebesar 0,9712.

3. Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 4.4 di atas nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar – 0,1274 dengan standar deviasi 0,5255. Nilai minimum dari kepemilikan institusional adalah sebesar – 1,5145 sedangkan nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 0,6446.

4. Diversity Gender dalam Dewan Direksi

Berdasarkan tabel 4.4 di atas nilai rata-rata diversity gender dalam dewan direksi sebesar – 0,0480 dengan standar deviasi 0,9513. Nilai minimum dari diversitas gender dalam dewan direksi adalah sebesar – 0,7995 sedangkan nilai maksimum diversity gender dalam dewan direksi sebesar 2,5228.

5. Independensi Dewan Direksi

Berdasarkan tabel 4.4 di atas nilai rata-rata independensi dewan direksi sebesar – 0,002 dengan standar deviasi 0,9857. Nilai minimum dari independensi dewan direksi adalah sebesar – 1,1983 sedangkan nilai maksimum independensi dewan direksi sebesar 2,1223.

6. Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.4 profitabilitas memiliki nilai rata-rata – 0,1674 dengan standar deviasi 0,7231. Adapun nilai minimum dari profitabilitas adalah – 0,8771. Sedangkan nilai maksimum dari profitabilitas sebesar 8,9605.

7. *Leverage*

Berdasarkan tabel 4.4 *Leverage* memiliki nilai rata-rata – 0,0133 dengan standar deviasi 0,9892. Adapun nilai minimum dari *Leverage* adalah – 2,0276. Sedangkan nilai maksimum dari *Leverage* sebesar 2,2154.

8. Ukuran perusahaan

Berdasarkan tabel 4.4 Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata – 0,0128 dengan standar deviasi 0,9155. Adapun nilai minimum dari Ukuran perusahaan adalah – 2,7099 Sedangkan nilai maksimum dari Ukuran perusahaan sebesar 2,3424.

9. Capital intensity

Berdasarkan tabel 4.4 Capital intensity memiliki nilai rata-rata – 0,111 dengan standar deviasi 1,0003. Adapun nilai minimum dari Capital intensity adalah – 1,9140. Sedangkan nilai maksimum dari Capital intensity sebesar 2.4364.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas (Sebelum Menghapus Data Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			325
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5.85309583
Most Extreme Differences	Absolute		.214
	Positive		.173
	Negative		-.214
Test Statistik			.214
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.000 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 325 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, nilai tersebut berada jauh di bawah $\alpha = 0,05$ hal ini menggambarkan bahwa data residual tersebut tidak terdistribusi normal. Namun data yang tidak terdistribusi secara normal dapat dinormalkan. Salah satu cara agar data penelitian dapat terdistribusi normal adalah dengan melakukan screening data untuk mendeteksi apakah data dari masing-masing variabel penelitian memiliki data *outlier*, yaitu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2018). Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut z-score. Berdasarkan Ghozali (2018) untuk kasus sampel kecil (kurang dari 80), maka standar skor dengan nilai ≥ 2.5 dinyatakan outlier. Sedangkan untuk sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas (Setelah Menghapus Data Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			281
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.76502500
Most Extreme Differences	Absolute		.080
	Positive		.061
	Negative		-.080
Test Statistik			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.055 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.023
		Upper Bound	.088
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 325 sampled tables with starting seed 1873471395.			

Sumber: Hasil olah data spss.25

Hasil pengujian normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa variabel kualitas audit, corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, diversitas

gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, profitabilitas, leverage dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, dan capital intensity terdistribusi secara normal ditandai dengan besarnya nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,055 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dinyatakan bahwa variabel kualitas audit, corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, , profitabilitas, leverage, dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan capital intensity pada penelitian sudah terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji statistik yang dilakukan pada sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel independen atau lebih dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai untuk menunjukkan ada atau tidak multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistiks	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualitas Audit	.719	1.391
	Kepemilikan Institusional	.872	1.147
	Diversity Gender dalam dewan Direksi	.747	1.340
	Independensi Dewan Direksi	.798	1.253
	Profitabilitas	.898	1.113
	Leverage	.882	1.134
	Ukuran Perusahaan	.695	1.439
	Capital intensity	.936	1.068
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak			

Sumber: Hasil olah data spss.25

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara meregresi model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 untuk semua variabel independen, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah suatu keadaan di mana faktor pengganggu (*error term*) pada periode tertentu berkorelasi dengan faktor pengganggu pada periode lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Berikut adalah tabel yang

digunakan untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2016):

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

- Jika $d < d_L$ atau $d > (4-d_L)$, H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi
- Jika $d_U < d < (4-d_U)$, H_0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi
- Jika $d_L < d < d_U$ atau $(4-d_U) < d < (4-d_L)$, maka tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.644 ^a	.415	.398	.43232598	1.887

a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas,, Ukuran Perusahaan, Independensi Dewan Direksi, Diversity Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil olah data spss.25

Dari tabel diketahui bahwa DW untuk $k = 8$ dan $N = 281$. Sedangkan nilai batas bawah (d_L) sebesar 1,6754 dan nilai batas atas (d_U) sebesar 1,8632 dan $4 - d_U$ ($4 - 1,8632$) sebesar 2.1368. Adapun perhitungan nilai D-W sebesar 1,887. Nilai ini

berada pada daerah $1,8632 < 1,887 < 2,1368$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ghozali (2018) berpendapat bahwa model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan adalah uji park, yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual kuadrat terhadap seluruh variabel independen. Apabila variabel independen secara statistik memengaruhi variabel dependen, maka terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila *p-value* pada hasil uji t terdapat koefisien regresi lebih dari $p = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa pada nilai residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sebelum Transformasi)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6.616	.279		-23.720	.000
Kualitas Audit	.067	.312	.015	.214	.831
Kepemilikan Institusional	-.818	.539	-.094	-1.516	.131
Diversity Gender dalam dewan Direksi	-.376	.322	-.079	-1.168	.244
Independensi Dewan Direksi	-.114	.301	-.025	-.379	.705
Profitabilitas	1.557	.386	.247	4.030	.000
Leverage	-.211	.285	-.046	-.739	.460
Ukuran Perusahaan	-.272	.347	-.055	-.785	.433
Capital intensity	.125	.274	.027	.457	.648
a. Dependent Variable: LnRes_2					

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park terlihat bahwa nilai profitabilitas kurang dari 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi tidak terbebas dari heteroskedastisitas atau dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Sehingga perlu dilakukannya transformasi data.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Setelah Transformasi)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.941	6.447		.456	.649
	Ln_X1	-.160	.180	-.099	-.889	.376
	Ln_X2	.056	.181	.031	.311	.756
	Ln_X3	-.280	.277	-.122	-1.010	.315
	Ln_X4	.083	.170	.052	.488	.627
	Ln_X5	-.220	.086	-.268	-2.552	.012
	Ln_X6	.026	.072	.037	.357	.722
	Ln_K1	-.768	1.985	-.050	-.387	.700
	Ln_K2	-.008	.090	-.009	-.090	.929
a. Dependent Variable: AbsRes						

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melakukan transformasi data didapatkan nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi terbebas dari heteroskedastisitas dan dapat memenuhi asumsi klasik.

4.2.3 Uji Kelayakan Model

4.2.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)

Uji F ini menguji ketepatan model regresi (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018). Uji Statistik F adalah pengujian untuk menguji secara fit variabel X terhadap Y. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka variabel X berpengaruh secara fit terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, nilai signifikansi $>$

0,05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh fit pada variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.066	16	1.504	12.162	.000 ^b
	Residual	11.873	96	.124		
	Total	35.939	112			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,Independensi Dewan Direksi, Diversity Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit						

Sumber: Hasil olah data spss.25

Dari tabel 4.11 hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12,162 sedangkan nilai $Df_1 = 9 - 1 \rightarrow 8$ dan $Df_2 = 281 - 8 \rightarrow 273$. Maka nilai F_{tabel} ($Df_1 / Df_2 = 8 / 273$ adalah 2.945). Dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} 12.162 > F_{tabel} 2.945. Hasil ini didukung dengan hasil dari signifikansi dari tabel ini menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa, berdasarkan hasil uji F tersebut, maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh secara fit terhadap variabel Y atau model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dalam kondisi fit dan layak untuk diinterpretasikan.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat atau model dikatakan layak. Jika

R² mendekati 0 (semakin kecil nilai R²), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.670	.615	.35167540
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,,Independensi Dewan Direksi, Diversity Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit				
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Sumber: Hasil olah data spss.25

Hasil uji R² memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,615 atau 61,5% yang dapat ditunjukkan dalam tabel 4.12. Dapat diartikan dari hasil tersebut variabel dependen penelitian ini, yaitu penghindaran pajak yang diukur dengan Book-Tax Difference (BTD) dapat dijelaskan sebesar 61,5% oleh variabel independen penelitian. Variabel independen penelitian ini yaitu kualitas audit, kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas aset. Sedangkan sisanya yang sebesar 38,5 % dijelaskan dengan variabel lain yang tidak menjadi variabel dalam model penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel pada penelitian ini adalah kualitas audit, corporate

governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, profitabilitas, leverage, dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan capital intensity terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Analisis Regresi linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.131	.027		-4.822 .000
	Kualitas Audit	.070	.030	.127	2.314 .021
	Kepemilikan Institusional	-.016	.053	-.015	-.297 .767
	Diversity Gender dalam dewan Direksi	.024	.031	.041	.761 .447
	Independensi Dewan Direksi	-.036	.029	-.063	-1.211 .227
	Profitabilitas	.346	.038	.450	9.185 .000
	Leverage	-.158	.028	-.281	-5.688 .000
	Ukuran Perusahaan	.034	.034	.055	.993 .322
	Capital intensity	-.047	.027	-.084	-1.752 .081
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber: Hasil olah data spss.25

Tabel 4.13 maka dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,131 + 0,070X_1 - 0,016X_2 + 0,024X_3 - 0,036X_4 + 0,346X_5 - 0,158X_6 + 0,034X_7 - 0,047X_8$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa pengaruh masing-masing variabel diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta $-0,131$ artinya variabel independen yaitu kualitas audit, kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan capital intensity diasumsikan 0, maka perusahaan akan mengalami penghindaran pajak yang diprosikan dengan BTB sebesar $-0,131$.
2. Nilai koefisien regresi kualitas audit bernilai positif sebesar $0,070$. Jika kualitas audit naik 1 satuan, maka penghindaran pajak akan naik sebesar $0,070$ dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang bersifat positif menunjukkan adanya pengaruh yang searah di antara penghindaran pajak dan kualitas audit.
3. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional bernilai negatif sebesar $-0,016$. Variabel kepemilikan institusional tidak mengalami penurunan 1 satuan dikarenakan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Nilai koefisien regresi diversity gender dalam dewan direksi bernilai positif sebesar $0,024$. Variabel diversitas gender dalam dewan direksi tidak mengalami kenaikan 1 satuan dikarenakan variabel diversitas gender dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Nilai koefisien regresi independensi dewan direksi bernilai negatif sebesar $-0,036$. Variabel independensi dewan direksi tidak mengalami penurunan 1 satuan dikarenakan variabel independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Nilai koefisien regresi profitabilitas bernilai positif sebesar $0,346$. Jika profitabilitas naik 1 satuan, maka penghindaran pajak akan naik sebesar $0,346$.

dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang bersifat positif menunjukkan adanya pengaruh yang searah atau berbanding lurus di antara penghindaran pajak dan profitabilitas.

7. Nilai koefisien regresi *leverage* bernilai negatif sebesar -0,158. Jika *leverage* naik 1 satuan, maka penghindaran pajak akan turun sebesar 0,158 dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai koefisien yang bersifat negatif menunjukkan adanya pengaruh yang berlawanan di antara penghindaran pajak dan *leverage*.
8. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai positif sebesar 0,034. Variabel diversitas ukuran perusahaan tidak mengalami kenaikan 1 satuan dikarenakan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
9. Nilai koefisien regresi capital intensity bernilai negatif sebesar -0,047. Variabel capital intensity tidak mengalami penurunan 1 satuan dikarenakan variabel capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2.5 Uji t

Pada penelitian ini akan diuji pengaruh kualitas audit, corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, profitabilitas, leverage dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan capital intensity terhadap Penghindaran Pajak. Dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh data sebagai berikut:

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai signifikansi $< (0,05)$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 14 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Hipotesis	Hubungan	Unstandardized Coefficients (B)	Sig.	Hasil
H ₁	KA -> PP	.070	.021	Tidak Terdukung
H ₂	KI -> PP	-.016	.767	Tidak Terdukung
H ₃	DGdDD -> PP	.024	.447	Tidak Terdukung
H ₄	IDD -> PP	-.036	.227	Tidak Terdukung
H ₅	P -> PP	.346	.000	Terdukung
H ₆	L -> PP	-.158	.000	Tidak Terdukung
H ₇	UP -> PP	.034	.322	Tidak Terdukung
H ₈	CI -> PP	-.047	.081	Tidak Terdukung

Signifikansi $< (0,05)$ / ($\alpha=5\%$)

Sumber: Hasil olah data spss.25

Berdasarkan hasil analisis uji t pada tabel 4.14 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil Uji Hipotesis 1: Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel kualitas audit (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 2: Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel kepemilikan institusional (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,767 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 3: Diversity Gender dalam Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel diversitas gender dalam dewan direksi (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,447 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa diversity gender dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 4: Independensi Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel independensi dewan direksi (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,227 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 5: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel profitabilitas (X_5) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_6) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 6: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel *leverage* (X_6) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_7) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 7: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel ukuran perusahaan (X_7) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,322 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis 8: Capital intensity tidak berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

Variabel capital intensity (X_8) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,081 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H_8) ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2.6 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.2.6.1 Hasil Pengujian Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis H_1 antara variabel kualitas audit dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari kualitas audit sebesar 2.314 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin nilai kualitas audit tinggi maka penghindaran pajak akan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Madah Marzuki & Syukur (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H_1) **tidak terdukung**.

Hipotesis H_1 ini memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,070 yang menggambarkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada arah yang positif yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit semakin perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena arah dari koefisien regresi variabel ini positif, yang berarti berbeda arah dengan pernyataan hipotesisnya, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) **tidak didukung**. Karena dalam penelitian ini sampel perusahaan nya lebih banyak diaudit oleh KAP

non the big four yang memiliki kualitas audit lebih rendah dibandingkan KAP *the big four*, maka KAP *non the big four* secara potensial lebih mudah diajak “bekerjasama” oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan KAP *non the big four* kecenderungannya memiliki standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja yang kurang atau belum sekuat KAP *the big four*, seperti tidak terlalu mementingkan transparansi dan kadang-kadang tidak menyajikan laporan auditor dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu secara potensial dapat menyebabkan tindakan penghindaran pajak semakin meningkat. Dari hasil penelitian ini ternyata teori keagenan Abid & Dammak (2021) tidak mendukung pernyataan bahwa kualitas audit memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Sehingga KAP *non the big four* lebih mudah diajak “bekerjasama” dengan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan KAP *non the big four* memiliki standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja yang kurang, seperti tidak mementingkan transparansi dan tidak menyajikan laporan auditor dengan keadaan yang sebenarnya, hal itu lah yang menyebabkan tindakan penghindaran pajak pun meningkat. Sejalan dengan penelitian dari Marzuki & Syukur (2021) audit *non the big four* dapat menggunakan keahlian mereka untuk perencanaan pajak menggunakan BTD tunai dengan menunda pajak yang dibayarkan ke direktorat jenderal pajak. Adanya transfer informasi dari auditor *non the big four* ke departemen pajak berdasarkan keahlian mereka untuk secara efisien menangguk pajak yang dibayarkan kepada direktorat jenderal pajak untuk tujuan perencanaan pajak. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tinggi atau

tidaknya kualitas audit dari suatu perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak (Mozid et al., 2021).

4.2.6.2 Hasil Pengujian Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari kepemilikan institusional sebesar -0.297 dengan nilai signifikansi sebesar 0.767 yang lebih besar dari $0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alkurdi & Mardini (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel kepemilikan institusional dengan variabel penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H_2) **tidak terdukung**

Kelas struktur kepemilikan terbagi atas 3 jenis yaitu, kepemilikan manajerial, asing dan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional mampu memberikan peran perusahaan untuk memantau, mendisiplinkan, dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan sesuatu yang berdampak negatif untuk perusahaan. Semakin banyak kepemilikan saham institusi menyebabkan semakin ketat pengawasan yang dipegang pihak luar terhadap sebuah perusahaan (Dakhli, 2021) (Marwat et al., 2021).

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Kepemilikan Institusional dipandang sebagai kunci mekanisme tata kelola perusahaan yang melakukan pemantauan keputusan manajemen yang efektif yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Dakhli, 2021). Marwat et al. (2021) Struktur kepemilikan juga merupakan salah satu penentu penghindaran pajak, lebih terkonsentrasinya kepemilikan menyebabkan perusahaan menjadi lebih menghindari praktik penghindaran pajak.

Pemilik institusional adalah kemungkinan besar menerapkan pemantauan karena berbagai alasan dengan tujuan untuk menetapkan stabilitas posisi perusahaan. Pemilik institusional berfungsi untuk meningkatkan bisnis dan kinerja perusahaan karena pengalaman asing mereka dan keahlian multidisipliner, perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional jangka panjang yang tinggi kurang agresif terhadap pajak karena investor institusional lebih peduli tentang konsekuensi jangka panjang dari strategi pajak-agresif. Kehadiran penting investor institusional, yang memungkinkan pengaruh mekanisme ini pada proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan mengenai pengalaman dan keahlian mereka yang tidak diragukan lagi sehingga praktik penghindaran pajak akan terhindarkan (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021).

Alkurdi & Mardini (2020) Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan hubungan bisnis antara principal (pemegang saham dan regulator) dan

agen (manajer perusahaan). Secara khusus, pemisahan kepemilikan dan control antara manajer dan pemilik perusahaan menyebabkan konflik kepentingan yang salah satunya berdampak pada keputusan pajak perusahaan yang dapat mencerminkan pandangan keduanya yaitu manajemen dan pemegang saham, karena ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Manajemen memenuhi kepentingannya sendiri dengan meningkatkan kompensasi melalui pendapatan yang lebih tinggi dan peningkatan kinerja, sementara pemegang saham ingin meminimalkan membayar pajak yang masih harus dibayar dan berfokus pada peningkatan nilai saham mereka. Sehingga perlu untuk meminimalkan risiko konflik keagenan yang disebabkan oleh penghindaran pajak dengan menggunakan pihak ketiga, seperti struktur kepemilikan, yang membantu memantau keputusan manajer yang pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Singkatnya, struktur kepemilikan cenderung memberlakukan kebijakan untuk mengurangi dampak yang relatif besar dari aktivitas penghindaran pajak.

Teori pemangku kepentingan ini juga berkaitan dengan variabel kepemilikan institusional, Hoseini et al. (2019) mekanisme kepemilikan merupakan alat pengendali utama dalam tata kelola perusahaan. Beberapa dari insentif pemilik dipengaruhi oleh teori pemangku kepentingan. Dengan demikian, karena masyarakat membuka cara bagi perusahaan untuk melanjutkan operasi mereka untuk jangka waktu yang tidak terbatas, mereka memutuskan untuk mengompensasi keuntungan ini dengan membayar pajak mereka.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkurdi & Mardini (2020) perusahaan yang dimiliki oleh dewan dengan proporsi investor institusional yang

tinggi menunjukkan penurunan keterlibatan dengan teknik penghindaran pajak. Selain itu, salah satu manfaat pemantauan yang tersedia melalui kepemilikan institusional yang memiliki persentase saham yang lebih tinggi kemungkinan untuk dihindari adalah masalah keagenan dan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

4.2.6.3 Hasil Pengujian Pengaruh Diversiti Gender dalam Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel diversity gender dalam dewan direksi dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari diversity gender dalam dewan direksi sebesar 0,761 dengan nilai signifikansi sebesar 0,447 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa diversity gender dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar diversity gender dalam dewan direksi tersebut maka BTD perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunya tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarbouy et al. (2020), Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021), Hoseini et al. (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel diversity gender dalam dewan direksi dengan variabel penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar diversity gender dalam dewan direksi maka semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan semakin rendah, sehingga hipotesis (H_3) **tidak terdukung**

Hoseini et al. (2019) mengatakan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Peran direktur wanita di

dewan perusahaan karena wanita adalah diyakini lebih efektif dalam memantau proses penyeimbangan antara kepentingan pemegang saham dan masyarakat daripada laki-laki. Teori agensi adalah salah satu teori terbanyak yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dampak keanekaragaman gender dalam dewan direksi pada kualitas informasi. Adanya direksi wanita pada sebuah perusahaan akan membawa berbagai perspektif, yang memberikan dampak positif bagi perusahaan seperti mengurangi biaya agensi, penggelapan pajak meningkatkan nilai dan transparansi informasi perusahaan. Dewan direksi wanita memiliki tanggung jawab lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu dalam penelitiannya mengatakan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi perusahaan akan membuat perusahaan tidak melakukan Praktik penghindaran pajak.

Richardson et al. (2016) menyatakan bahwa wanita lebih menghindari risiko dibandingkan dengan direktur pria dalam hal pelaporan perusahaan dan masalah keuangan. Dibandingkan dengan dewan direksi yang semuanya laki-laki, perempuan membawa sudut pandang yang berbeda ke ruang rapat di mana mereka dapat memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan. Selain itu peneliti juga mengatakan bahwa wanita cenderung berkontribusi positif pada fungsi umum dan pertimbangan dewan dengan meningkatkan tingkat kepercayaan dewan terhadap berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Dewan yang beragam cenderung terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam, termasuk penyelesaian masalah yang sulit.

Boussaidi & Sidhom (2021) bahwa keragaman gender di dalam dewan direksi tampaknya merupakan faktor penting, dan merupakan kebutuhan berkelanjutan untuk memastikan pengawasan dan pemantauan. Kehadiran perempuan memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap hukum dan banyak lagi khusus di bidang perpajakan. Perempuan melakukan tindakan kontrol intensif pada pemimpin dan memiliki persentase kehadiran di rapat yang tinggi. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan terus menarik dalam penelitian kontemporer. Direktur wanita lebih disiplin dalam masalah pajak daripada pria yang kurang mematuhi aturan perpajakan, sehingga diharapkan dengan adanya kesetaraan gender dalam dewan direksi ini dapat mengurangi adanya praktik penghindaran pajak.

Hoseini et al. (2019) mengatakan, dengan berdasar dari teori pemangku kepentingan, dewan direksi ditetapkan untuk membuat keseimbangan informasi antara pemegang saham dan manajer, dan meningkatkan tingkat kepercayaan di antara pemegang saham, seseorang dapat mempertahankan bahwa kehadiran perempuan di dewan perusahaan membantu meningkatkan kinerja dewan direksi. Dewan direksi wanita tidak hanya menarik pemegang saham, tetapi juga pemangku kepentingan lain dari perusahaan. Teori pemangku kepentingan adalah teori yang menjelaskan bagaimana keragaman gender dewan memberikan kinerja sosial. Dengan cara ini, penggabungan direktur wanita di dewan perusahaan dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Jarboui et al., 2020).

4.2.6.4 Hasil Pengujian Pengaruh Independensi Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel independensi dewan direksi dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari independensi dewan direksi sebesar -1,211 dengan nilai signifikansi sebesar 0,227 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yang menyatakan bahwa independensi dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H_4) **tidak terdukung**

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Direksi juga berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Alkurdi & Mardini (2020) mencerminkan bahwa dewan dengan lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham yang lebih besar. Banyak literatur terkait telah mengeksplorasi apakah anggota independen di dewan dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan penghindaran pajak, ditemukan bahwa kehadiran anggota independen mewakili persentase yang lebih tinggi dari jumlah keseluruhan anggota dewan mengarah pada penyediaan kesempatan untuk menjalankan fungsi pengendalian untuk mengurangi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan perencanaan dan pelaporan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Chouaibi (2021) dewan direksi adalah entitas penting dalam sebuah perusahaan,

menciptakan hubungan antara pemegang saham dan manajer dan oleh karena itu memainkan peran dalam tata kelola suatu perusahaan.

Definisi direksi yaitu salah satu organ perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab bersama jajaran direktur. Selain tugas dan tanggung jawab, keanggotaan direksi juga telah diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hoseini et al. (2019) mengatakan bahwa Investor yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam manajemen unit ekonomi dan, dengan memilih dewan direksi dan mengawasi mereka, berjuang dengan pengelolaan unit ekonomi mereka. Hasil dari proses ini adalah pemisahan kepemilikan dari tata kelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan menyebabkan munculnya teori representasi. Teori ini berkaitan dengan kasus di mana seseorang (pemilik) memberikan tanggung jawab atas keputusan atas distribusi sumber daya keuangan dan ekonomi atau kinerja layanan di bawah kontrak tertentu kepada orang lain. Yang paling penting dari sistem ini adalah adanya dewan direksi yang dinamis dan koheren, yang keputusannya dapat berdampak lebih luas pada fungsi perusahaan dan harus juga responsif terhadap berbagai pemilik kepentingan.

Selain itu, peningkatan jumlah independen anggota dewan mengarah pada penekanan penerapan tata kelola perusahaan, dan bahwa ini mengarah pada kebijakan pajak yang ketat. kurangnya independensi Direksi meningkatkan kejadian diskresi penipuan akrual dan akuntansi yang berujung dalam praktik

penghindaran pajak (Cho & Yoon, 2020). Deslandes et al. (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa peningkatan jumlah independen anggota dewan mengarah pada penekanan penerapan tata kelola perusahaan, dan bahwa ini mengarah pada kebijakan pajak yang ketat. Mendukung pelaksanaan tanggung jawab yang lebih efektif dan efisien maka, direksi perlu untuk menyelenggarakan rapat baik internal maupun gabungan dengan dewan komisaris.

Salhi et al. (2020) berpendapat bahwa direktur independen dapat memperkuat penghindaran pajak karena mereka dapat memberikan pengetahuan dan latar belakang yang berguna dari mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Direktur independen memiliki peran penting dalam pengurangan oportunistik manajerial karena kontrol yang efektif dari kebijakan manajemen. Tingginya kehadiran direktur independen dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap mengurangi tingkat penghindaran pajak dari perusahaan. Dalam hal independensi dewan, penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa anggota dewan dengan lebih independen akan meningkatkan kinerja dan menambah kekayaan pemegang saham yang lebih besar. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan yang berguna dari pengalaman mereka sendiri mengenai keputusan penghindaran pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021).

4.2.6.5 Hasil Pengujian Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis H_1 antara variabel profitabilitas dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari profitabilitas sebesar 9.185 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin nilai profitabilitas tinggi maka penghindaran pajak akan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marwat et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H₆) **terdukung**.

Rani et al. (2018) profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA). Itu ROA diukur sebagai rasio laba bersih setelah pajak terhadap total aset. ROA terkait terhadap laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak. Manajer meningkatkan profitabilitas jangka pendek melalui penghindaran pajak. Mereka dapat menunjukkan pengurangan yang signifikan dalam kewajiban pajak dan menunjukkan profitabilitas tahun berjalan yang lebih tinggi dengan menggunakan berbagai teknik penghindaran pajak. Pemerintah Indonesia terus merumuskan reformasi pajak yang berbeda untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi defisit pajak. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, pemerintah menawarkan berbagai insentif perpajakan berupa kredit pajak dan pembebasan pajak yang ternyata pada sisi manajer dapat memberikan kesempatan bagi nya untuk bermain dengan akun pajak. Manajer mencoba memanfaatkan pajak maksimum manfaat dan beberapa manajer mengorbankan manfaat jangka panjang untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek melalui teknik penghindaran pajak. Beberapa manajer bahkan melakukan pendekatan ilegal untuk memanfaatkan kredit pajak atau pembebasan pajak. Penelitian dari Yulianty et al. (2021) Hasil pengujian mengonfirmasi teori agensi yang menyatakan laba perusahaan yang semakin besar menjadi dasar penghitungan beban pajak, sehingga

kondisi ini mengakibatkan kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Namun penelitian dari Rifai & Atiningsih (2019) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi return on asset, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Tanda positif dapat diartikan ketika laba meningkat penghindaran pajak meningkat hal ini disebabkan tingginya nilai ROA akan dilakukan perencanaan penghindaran pajak yang matang sehingga kecenderungan melakukan aktivitas penghindaran pajak akan mengalami kenaikan. Selain itu semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (loopholes) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Adanya teori keagenan akan memacu para agen untuk mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi dari kinerja agen (Muda et al., 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panda & Nanda (2021) bahwa perusahaan dengan laba tinggi akan mendapatkan lebih banyak keuntungan pajak dan/atau mampu untuk melakukan pengelolaan pajak yang efisien yang mengarah pada dilakukannya praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, pemerintah sebagai principal berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan manajer perusahaan sebagai agen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar . Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Rani et al., 2018). Perusahaan yang memperoleh penghasilan yang lebih

tinggi cenderung meningkatkan penghasilan mereka dengan meminimalkan biaya pajak penghasilan.

Fasita & Firmansyah (2022) berpendapat bahwa perusahaan multinasional dengan profitabilitas tinggi lebih mungkin untuk melakukan pajak penghindaran dan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menanggung beban pajak yang lebih signifikan, sehingga memaksimalkan pajak untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayar kepada otoritas perpajakan. Profitabilitas merupakan faktor penting untuk pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan, karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian laba perusahaan. Data dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata laba perusahaan cukup besar sehingga membayar pajak besar pula. Hal ini disebabkan karena penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Maka perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Dewi & Noviari, 2017).

4.2.6.6 Hasil Pengujian Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel *leverage* dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t dari *leverage* sebesar -5.688 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis H_7 ini memiliki nilai koefisien beta sebesar -0.158 yang menggambarkan

bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi pada arah yang negatif yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi *leverage* semakin perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai & Atiningsih (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel *leverage* dengan variabel penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H₇) **tidak terdukung**.

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan kegiatan perusahaan. *Leverage* adalah suatu tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal perusahaan maka akan semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal. Dalam penelitian ini *leverage* diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Yulianty et al. (2021) Hasil penelitian ini tidak mengonfirmasi teori agensi yang menyatakan bahwa manajer cenderung untuk memaksimalkan beban tetap (beban bunga utang) yang ditanggung perusahaan agar laba sebelum pajak terlihat sedikit sehingga beban pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih kecil. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi jika dilihat dari sisi principal. Ketika perusahaan mempunyai utang yang besar, prinsipal menginginkan agar laporan keuangan perusahaan dibuat dibuat secara hati-hati dan memperkecil risiko operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ketika perusahaan memiliki nilai utang yang tinggi maka perusahaan memiliki ketergantungan yang besar kepada kreditur. Manajer akan lebih berhati-hati dan

cenderung untuk menghindari risiko yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak karena kreditur melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas manajer dalam operasional perusahaan.

Yulianty et al. (2021) penghindaran pajak perusahaan tidak ada pengaruh dengan tingkat leverage perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa karena perusahaan selalu diawasi secara ketat oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dan tentunya memiliki lebih banyak perhatian dari publik, sehingga mereka kurang menarik untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Apabila perusahaan melakukan pembiayaan secara utang dalam membiayai operasionalnya akan menyebabkan perusahaan memiliki rasio utang yang tinggi dan bunga atas utang yang harus dibayar semakin besar, sehingga membuat perusahaan tidak akan melakukan pembiayaan dengan hutang secara besar-besaran. Dengan adanya rasio utang yang tinggi akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Ketika hutang perusahaan tinggi, maka faktor pengurang penghasilan sebelum pajak akan menjadi lebih besar sehingga otoritas pajak pasti akan menaruh perhatian lebih dalam melakukan penelitian untuk meneliti kewajaran dari hutang dan bunga hutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak menjadi kecil ketika perusahaan memiliki hutang dalam jumlah yang besar.

Rifai & Atiningsih (2019) Perusahaan memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang digunakan sebagai pengurang laba kena

pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan hutang tidak semata-mata untuk menciptakan pendapatan, ada kemungkinan hutang digunakan untuk berinvestasi jangka panjang, sehingga beban bunga tidak timbul per periode pada laporan keuangan, jadi tidak dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dimungkinkan juga untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Leverage pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Apabila hutang digunakan dalam jumlah yang besar maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan dengan adanya rasio utang yang tinggi akan membuat perusahaan kehilangan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa karena perusahaan dengan hutang besar akan diawasi secara

ketat dan memiliki lebih banyak perhatian publik, sehingga mereka kurang tertarik untuk kegiatan penghindaran pajak (Amidu et al., 2019).

4.2.6.7 Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel ukuran perusahaan dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka BTB perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunnya tingkat penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi atau dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan semakin rendah, sehingga hipotesis (H₅) **tidak terdukung**.

Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki aset besar akan cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar akan lebih mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya sehingga perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak (Nkundabanyanga et al., 2020). Selain itu perusahaan besar akan menjadi sorotan dan pusat perhatian pemerintah terkait dengan pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan besar akan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak, karena jika tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti sanksi dan reputasi buruk bagi perusahaan di mata publik dan pemerintah.

Ukuran perusahaan adalah salah satu yang paling berpengaruh dalam konteks lembaga keuangan, pendapatan kotor, jumlah karyawan atau jumlah cabang yang dimiliki perusahaan. ukuran perusahaan merupakan faktor pendorong dalam kelangsungan hidup perusahaan, dengan alasan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih tinggi daripada yang lebih kecil. Ini karena perusahaan yang lebih besar memiliki ekonomi produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lebih kecil, membantu mereka menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk membiayai operasi masa depan. Perusahaan yang lebih besar dianggap lebih efisien daripada yang lebih kecil. Selain itu, kekuatan pasar dan akses ke pasar modal perusahaan besar dapat memberikan mereka akses ke peluang investasi yang tidak tersedia untuk yang lebih kecil dan ini membantu mereka dalam mencapai cakupan ekonomi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi & Noviani (2017) Rani et al. (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan books tax difference perusahaan. Perusahaan dengan aset besar dan penjualan tinggi menghasilkan lebih besar dan lebih stabil keuntungan. Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik perpajakan penghindaran.

4.2.6.8 Hasil Pengujian Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran

Pajak

Hasil pengujian data observasi antara variabel capital intensity dengan variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Zeng (2019) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis (H₈) **tidak terdukung**.

Perusahaan dengan tingkat capital intensity yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan. Aset tetap tidak mampu memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Marsahala et al. (2020) Intensitas aktiva tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap. Jika perusahaan investasi berada pada intensitas aset tetap, perusahaan memiliki banyak peluang untuk memilih pendanaan aset tetap yang menguntungkan sesuai dengan pajak, dan biaya-biaya yang timbul dari investasi aktiva tetap, misalnya biaya penyusutan adalah Pengurang beban, sehingga dapat berdampak pada tarif pajak.

Tidak sejalan dengan penelitian dari Ansori & Iswati (2019) yang menunjukkan bahwa capital intensity memberikan pengaruh positif terhadap

tindakan penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan akan menyebabkan semakin rendahnya nilai ETR perusahaan tersebut dan meningkatnya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Dengan adanya beban-beban yang disebabkan atas investasi perusahaan pada aset tetap, maka akan mendorong niat (*intention*) dalam penurunan laba yang akan membentuk sikap (*attitude*) untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Niat dalam berperilaku juga muncul karena keyakinan akan harapan normatif orang lain. Dalam hal ini, pihak manajemen memiliki keyakinan tentang harapan prinsipal untuk memperoleh laba tinggi dengan pengeluaran beban pajak serendah mungkin, sehingga manajemen perusahaan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Marsahala et al. (2020) yang menyatakan besarnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang besar oleh suatu perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan. Aset tetap yang memiliki nilai depresiasi dan berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak dari hasil analisis terbukti tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi. Ardyansah (2014) Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya karena dari adanya aset tetap yang tinggi memberikan dampak yang terlalu berisiko bagi perusahaan yaitu adanya beban pemeliharaan aset tetap, tempat penyimpanan yang besar, dan risiko keusangan

terhadap aset tetap menjadikan capital intensity yang tinggi kurang efisien bagi perusahaan, sehingga capital intensity yang tinggi tidak akan memengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Marsahala et al. (2020) yang menyatakan Capital Intensity berhasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Aset tetap merupakan elemen penting untuk perusahaan manufaktur untuk mendukung kegiatan operasional dan produksi perusahaan. Perusahaan manufaktur membuat sebagian besar keuntungan mereka dari memproduksi produk jadi. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur menginvestasikan modal yang cukup banyak dalam sektor produksi, untuk meningkatkan produktivitas dan operasional perusahaan dan untuk investasi daripada menggunakan aset tetap ini untuk memperkirakan biaya penyusutan aset tetap untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang telah kedaluwarsa umur manfaat ekonomis menurut fiskal, tetapi penyusutan tidak dihentikan karena Perusahaan memiliki kebijakan sendiri mengenai lamanya masa manfaat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan terhadap Kualitas Audit , Corporate Governance, Profitabilitas, dan leverage terhadap usaha penghindaran pajak, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit semakin perusahaan akan melakukan penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan semakin berkurang.
3. Diversity gender dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka, semakin tinggi tingkat keterlibatan Wanita dalam perusahaan maka usaha penghindaran pajak akan semakin berkurang.
4. Independensi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa dengan independensi

dewan direksi yang semakin tinggi maka praktik penghindaran pajak akan semakin berkurang.

5. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
6. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di mana semakin tinggi leverage maka perusahaan tidak ingin melakukan praktik penghindaran pajak.
7. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin perusahaan tidak ingin melakukan penghindaran pajak.
8. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap usaha Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa, semakin tinggi tingkat capital intensity suatu perusahaan maka semakin perusahaan tidak ingin melakukan penghindaran pajak atau usaha penghindaran pajak semakin berkurang.

5.2 Keterbatasan

Meskipun penelitian telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian

ini yang masih perlu direvisi bagi peneliti selanjutnya yaitu nilai koefisien *adjusted R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,615 yang artinya 61,5% variabel dependen yaitu penghindaran pajak dijelaskan oleh variabel independen kualitas audit, kepemilikan institusional, diversitas gender dalam dewan direksi, dan independensi dewan direksi, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset sedangkan sisanya 38,5 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Perusahaan diharapkan dapat mendisiplinkan kewajiban atas pajak tanpa melakukan penghindaran pajak. Diharapkan para eksekutif perusahaan taat terhadap undang-undang yang menyangkut pembayaran pajak tanpa berusaha mencari kelemahan dari undang-undang perpajakan yang bisa berisiko terhadap perusahaan di masa mendatang.
2. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti ASEAN CG Scorecard, atau institusi domestik, seperti: Institut Tata Kelola Perusahaan Indonesia (IICG). Lembaga-lembaga ini melakukan pemeringkatan dan penilaian tata kelola perusahaan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan dalam periode tertentu. Hasil penilaian dan evaluasi implementasi tata kelola perusahaan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan tata kelola perusahaan pedoman setelah pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkecil populasi akan tetapi dengan lebih melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melihat pergerakan tren kualitas audit, corporate governance di mana pada variabel ini diproksikan dengan kepemilikan institusional , diversitas gender dalam dewan direksi , dan independensi dewan direksi , dan untuk variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan , profitabilitas, leverage , dan capital intensity dari tahun ke tahun sehingga diharapkan bisa mempermudah pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan sampel penelitian perusahaan multinasional yang terdaftar atau tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak hasil penelitian yang representatif. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada perusahaan multinasional dengan perusahaan asing multinasional. Sebuah studi juga dapat dilakukan pada perusahaan multinasional di negara selain Indonesia untuk menyelidiki pola perilaku yang cenderung kompleks dalam negara lain.

Saran peneliti untuk pihak lainnya. Untuk melihat adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, agar lebih mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak perusahaan serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan pajak yang telah berlaku untuk perusahaan. Karena dengan hasil penelitian tersebut, masih terdapat celah untuk suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan aturan perpajakan agar tidak menyimpang dari kebijakan yang berlaku, serta menjadikan pengaruh penghindaran pajak sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan yang tepat di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, S., & Dammak, S. (2021). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2020-0119>
- Akbari, F., Salehi, M., & Vlashani, M. A. (2019). The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models. *International Journal of Organizational Analysis*. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2017-1235>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Ansori, M., & Iswati, S. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1. *Airlangga University Press*, 27. books.google.com
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Properti, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- Beebejaun, A. (2018). The Anti-Avoidance Provisions of the Mauritius Income Tax Act 1995: Lessons from UK and Australia. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2017-0174>
- Beebejaun, A. (2020). Mauritius as an offshore financial centre and laws relating to tax avoidance and evasion. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2020-0160>

- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Bouaziz, D., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). CEO characteristics and earnings management: empirical evidence from France. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2019-0008>
- Boussaidi, A., & Sidhom, M. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>
- Cho, H. T., & Yoon, S. M. (2020). Is the board of directors' religion related to tax avoidance? Empirical evidence in south korea. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel11100526>
- Chouaibi, J. (2021). *The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context*. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Chytis, E., Tasios, S., & Filos, I. (2020). The effect of corporate governance mechanisms on tax planning during financial crisis: an empirical study of companies listed on the Athens stock exchange. *International Journal of Disclosure and Governance*. <https://doi.org/10.1057/s41310-020-00072-3>
- Corten, M., Steijvers, T., & Lybaert, N. (2018). Auditor choice in private firms: a stakeholders perspective. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2017-1535>
- Dakhli, A. (2021). Does financial performance moderate the relationship between board attributes and corporate social responsibility in French firms? *Journal of Global Responsibility*. <https://doi.org/10.1108/jgr-02-2021-0016>
- Dakhli, A. (2021). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variabel. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy FINANCIAL ECONOMICS | LETTER Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Demir, S., Erturk, A., Gunal, Y. D., Ozmen, I., Zengin, M., Yildiz, D., Karaoz, E., Karahan, S., & Senel, E. (2021). Contribution of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Healing of Pulmonary Contusion-Created Rats. *Journal of Surgical Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.12.006>

- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Doho, S. &. (2020). *Pengaruh Karakteristik Ceo, Komisaris*.
- Egbunike, C. F., & Okerekeoti, C. U. (2018). Macroeconomic factors, firm characteristics and financial performance: A study of selected quoted manufacturing firms in Nigeria. *Asian Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2018-0029>
- Fasita, E., & Firmansyah, A. (n.d.). *Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia ?*.
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Gontara, H., & Khelif, H. (2020). Tax avoidance and audit report lag in South Africa: the moderating effect of auditor type. *Journal of Financial Crime*, 28(3). <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0197>
- Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gul, Z. B., & Atakli, H. D. (2021). Effect of the COVID-19 pandemic on drug compliance and stigmatization in patients with epilepsy. *Epilepsy and Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2020.107610>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hoseini, M., Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- IDNFinancials. (2022). *No Title*. <https://www.idnfinancials.com/about-us>
- Informasi APBN, & 2018. (2018). Anggaran Pengeluaran Belanja Negara 2018. *Informasi APBN 2018*.
- Jarboui, A., Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax avoidance: do board gender diversity and sustainability performance make a difference? *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>

- Karandagh, S. T., Alimohammadi, I., Moatar, F., & Kanrash, F. A. (2021). Association between noise annoyance and socioeconomic status of the employees in an electrical panel manufacturer. *Applied Acoustics*. <https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107889>
- Kemenkeu.co.id. (2019). Apbn-Kita-Edisi-Desember-2019. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14005/apbn-kita-edisi-desember-2019.pdf>
- Kemenkeu. (n.d.). APBN 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kementerian Keuangan. (2015). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan. (2017). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2017. 2017.
- Kurniawati, H., Cauwenberge, P., & Vander Bauwhede, H. (2020). Affiliation of local audit firms with Big4 auditors and capital structure: evidence from Indonesia. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-05-2019-2291>
- Lanis, R., Richardson, G., Liu, C., & McClure, R. (2019). The Impact of Corporate Tax Avoidance on Board of Directors and CEO Reputation. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 160, Issue 2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3949-4>
- Marzuki, M., & Syukur, M. S. (2021). The effect of audit fees, audit quality and board ownership on tax aggressiveness: evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Marsahala, Y. T., Ariefiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's competency effect of profitability, capital intensity, and tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>
- Marwat, J., Rajput, S. K. O., Dakhan, S. A., Kumari, S., & Ilyas, M. (2021). Tax avoidance as earning game player in emerging economies: evidence from Pakistan. *South Asian Journal of Business Studies*. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-10-2020-0379>
- Mgammal, M. H. (2019). The effect of components of tax saving on tax disclosure: A panel data approach in Malaysian listed companies. *Pacific Accounting Review*. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2018-0080>
- Mgammal, M. H. (2020). Corporate tax planning and corporate tax disclosure. *Meditari Accountancy Research*. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0390>
- Mohanadas, N. D., Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness

- of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Mozid, N.-E., Amin, M. A., Jhumur, S. S., Monju, I. H., Ahmed, S. B., Sharmin, S., Sarker, W., & Hawlader, M. D. H. (2021). COVID-19 risk of infection and vaccination during Ramadan fasting: knowledge and attitudes of Bangladeshi general population. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08174>
- Muda, I., Ramadani, & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Nkundabanyanga, S. K., Mugumya, E., Nalukenge, I., Muhwezi, M., & Najjemba, G. M. (2020). Firm characteristics, innovation, financial resilience and survival of financial institutions. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2018-0094>
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi / the Effectiveness of Criminal Sanction on the General Provisions of Taxation in Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44>
- Ocak, M., & Can, G. (2019). Do government-experienced auditors reduce audit quality? *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1756>
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Ortas, E., & Álvarez, I. (2020). Bridging the gap between corporate social responsibility performance and tax aggressiveness: The moderating role of national culture. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2017-2896>
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2021). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an empirical analysis on Indian listed firms. *Journal of Asia Business Studies*. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Pointer, L. V., & Khoi, P. D. (2019). Predictors of return on assets and return on equity for banking and insurance companies on Vietnam stock exchange. *Entrepreneurial Business and Economics Review*. <https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070411>
- POJK. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014*

Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK_33_Direksi_dan_Dewan_Komisaris_Emiten_Atau_Perusahaan_Publik.pdf

Prasad, B., & Junni, P. (2017). A contingency model of CEO characteristics and firm innovativeness: The moderating role of organizational size. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2016-0071>

Prima. (2019). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 Juta*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

Rani, S., Susetyo, D., & Fuadah, L. L. (2018). The effects of the corporate's characteristics on tax avoidance moderated by earnings management (Indonesian evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*.

RI, K. K. (2017). Informasi Informasi. *Informasi APBN 2017*.

Ribeiro, V. V., Lopes, L. W., da Silva, A. C. F., Neto, A. H. de M., Vertigan, A., & Behlau, M. (2021). Validation of Newcastle Laryngeal Hypersensitivity Questionnaire (LHQ-Br) in Brazilian Portuguese. *Journal of Voice*. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.06.012>

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia An empirical analysis. *Accounting Research Journal*. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>

Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.48>

Rudyanto, A., & Pirzada, K. (2020). The role of sustainability reporting in shareholder perception of tax avoidance. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2020-0022>

Saka, C., Oshika, T., & Jimichi, M. (2019). Visualization of tax avoidance and tax rate convergence: Exploratory analysis of world-scale accounting data. *Meditari Accountancy Research*. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2018-0298>

Salehi, M., DashtBayaz, M., & Khorashadizadeh, S. (2018). Corporate social responsibility and future financial performance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *EuroMed Journal of Business*. <https://doi.org/10.1108/EMJB-11-2017-0044>

Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/jabes-11-2018-0100>

- Salhi, B., Al Jabr, J., & Jarboui, A. (2020). A Comparison of Corporate Governance and Tax Avoidance of UK and Japanese Firms. *Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe*. <https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.23>
- Salhi, B., Riguen, R., Kachouri, M., & Jarboui, A. (2020). The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2019-0125>
- Suryowati. (2016). *Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura*. <https://money.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>
- Susanti, M. (2017). Corporate Social Responsibility, Size And Tax Avoidance. *International Journal of Economic Perspectives*. <https://search.proquest.com/docview/1964557309?accountid=47623>
- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP No. 28 Tahun 2007. (2007). 3(September), 119–122.
- UU KUP no 16 Tahun 2009. (n.d.).
- UU No.40 tahun 2007 - Perseroan Terbatas. (2007).
- Yulianty, A., Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>
- Zalata, A. M., Elzahar, H., & McLaughlin, C. (2020). External audit quality and firms' credit score. *Cogent Business and Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1724063>
- Zeng, T. (2019). Country-level governance, accounting standards, and tax avoidance: a cross-country study. *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2018-0179>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

LAMPIRAN 1

Ringkasan Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut turut selama periode 2016-2018	313
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) dari tahun 2016	(101)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan (<i>annual report</i>) dan menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut dari tahun 2016-2020	(34)
2.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada tahun 2016-2020	(71)
3.	Perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan dalam mata uang selain rupiah	(25)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki data variabel secara lengkap	(17)
	Jumlah sampel yang digunakan	65
	Observasi tahun (65 x 5)	325
5.	Data outlier	(44)
	Jumlah unit analisis	281

LAMPIRAN 2

Daftar Nama Perusahaan

NO	KODE	NAMA EMITEN	TANGGAL IPO
1	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk	18-12-1992
2	ALKA	Alakasa Industrindo Tbk	12-07-1990
3	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	27-11-1997
4	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk.	08-08-1990
5	EKAD	Ekadharma International Tbk.	14-08-1990
6	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	19-12-1994
7	IGAR	Champion Pacific Indonesia Tbk	05-11-1990
8	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk.	05-12-1994
9	INCI	Intanwijaya Internasional Tbk	24-07-1990
10	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tb	05-12-1989
11	ISSP	Steel Pipe Industry of Indones	22-02-2013
12	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk.	29-07-1996
13	LTLS	Lautan Luas Tbk.	21-07-1997
14	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	28-06-2013
15	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	08-07-1991
16	SPMA	Suparma Tbk.	16-11-1994
17	SRSN	Indo Acidatama Tbk	11-01-1993
18	TALF	Tunas Alfin Tbk.	17-01-2014
19	TRST	Trias Sentosa Tbk.	02-07-1990
20	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	08-04-2014

21	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	09-12-1997
22	ADES	Akasha Wira International Tbk.	13-06-1994
23	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	15-01-2009
24	BISI	BISI International Tbk.	28-05-2007
25	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	08-05-1995
26	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	09-07-1996
27	CINT	Chitose Internasional Tbk.	27-06-2014
28	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	18-03-1991
29	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.	14-06-2013
30	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	11-11-1994
31	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk	01-08-1994
32	GGRM	Gudang Garam Tbk.	27-08-1990
33	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	15-08-1990
34	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	07-10-2010
35	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	14-07-1994
36	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	23-10-1989
37	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	30-07-1991
38	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb	05-07-1996
39	MERK	Merck Tbk.	23-07-1981
40	MIDI	Midi Utama Indonesia Tbk.	30-11-2010
41	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	15-12-1981
42	MYOR	Mayora Indah Tbk.	04-07-1990
43	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.	28-06-2010
44	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido	18-12-2013
45	SIPD	Sreeya Sewu Indonesia Tbk.	27-12-1996
46	SKBM	Sekar Bumi Tbk.	28-09-2012
47	SMAR	Smart Tbk.	20-11-1992

48	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	12-12-2013
49	STTP	Siantar Top Tbk.	16-12-1996
50	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.	11-06-1990
51	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk.	17-06-1994
52	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Tra	2-07-1990
53	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	11-01-1982
54	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.	18-12-2012
55	APII	Arita Prima Indonesia Tbk.	29-10-2013
56	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	17-07-2001
57	ASGR	Astra Graphia Tbk.	15-11-1989
58	ASII	Astra International Tbk.	4-04-1990
59	BHIT	MNC Investama Tbk.	24-11-1997
60	ICON	Island Concepts Indonesia Tbk.	8-07-2005
61	JECC	Jembo Cable Company Tbk.	18-11-1992
62	JTPE	Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.	16-04-2002
63	MFMI	Multifiling Mitra Indonesia Tb	29-12-2010
64	SCCO	Supreme Cable Manufacturing &	20-07-1982
65	UNTR	United Tractors Tbk.	19-09-1989

LAMPIRAN 3

Data Sampel (Disajikan dalam Rupiah)

3.1 Data Kualitas Audit akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	NAMA KAP
1	2016	AKPI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
2	2016	ALKA	Johannes Juara & Rekan
3	2016	ANTM	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
4	2016	DPNS	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
5	2016	EKAD	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
6	2016	FASW	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
7	2016	IGAR	Hertanto, Grace, Karunawan
8	2016	INAI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
9	2016	INCI	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
10	2016	INTP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
11	2016	ISSP	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
12	2016	KDSI	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
13	2016	LTLS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
14	2016	SMBR	Herman Dody Tanumihardja & Rekan
15	2016	SMGR	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
16	2016	SPMA	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
17	2016	SRSN	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
18	2016	TALF	Tjahjadi & Tamara
19	2016	TRST	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
20	2016	WTON	Soejatna, Mulyana & Rekan
21	2016	AALI	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
22	2016	ADES	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
23	2016	AMRT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
24	2016	BISI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
25	2016	BUDI	Mirawati Sensi Idris
26	2016	CEKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
27	2016	CINT	Gideon Adi & Rekan
28	2016	CPIN	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
29	2016	DSNG	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)

30	2016	DVLA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
31	2016	EPMT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
32	2016	GGRM	Siddharta widjaja & Rekan
33	2016	HMSP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
34	2016	ICBP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
35	2016	INDF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
36	2016	JPFA	Mirawati Sensi Idris
37	2016	KLBF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
38	2016	LSIP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
39	2016	MERK	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
40	2016	MIDI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
41	2016	MLBI	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
42	2016	MYOR	Mirawati Sensi Idris
43	2016	ROTI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
44	2016	SIDO	Anwar & Rekan
45	2016	SIPD	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
46	2016	SKBM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
47	2016	SMAR	Mirawati Sensi Idris
48	2016	SSMS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
49	2016	STTP	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
50	2016	TGKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
51	2016	TSPC	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
52	2016	ULTJ	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
53	2016	UNVR	Sliddharta widjaja & Rekan (KPMG)
54	2016	WIIM	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
55	2016	APII	S. Mannan, Ardiansyah & Rekan
56	2016	ARNA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
57	2016	ASGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
58	2016	ASII	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
59	2016	BHIT	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
60	2016	ICON	Jimmy Budhi & Rekan
61	2016	JECC	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
62	2016	JTPE	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
63	2016	MFMI	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
64	2016	SCCO	Doli Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali
65	2016	UNTR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
66	2017	AKPI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)

67	2017	ALKA	Johannes Juara & Rekan
68	2017	ANTM	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
69	2017	DPNS	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
70	2017	EKAD	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
71	2017	FASW	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
72	2017	IGAR	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
73	2017	INAI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
74	2017	INCI	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
75	2017	INTP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
76	2017	ISSP	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
77	2017	KDSI	Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
78	2017	LTLS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
79	2017	SMBR	Herman Dody Tanumihardja & Rekan
80	2017	SMGR	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
81	2017	SPMA	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
82	2017	SRSN	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
83	2017	TALF	Tjahjadi & Tamara
84	2017	TRST	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
85	2017	WTON	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
86	2017	AALI	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
87	2017	ADES	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
88	2017	AMRT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
89	2017	BISI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
90	2017	BUDI	Mirawati Sensi Idris
91	2017	CEKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
92	2017	CINT	Teramihardja, Pradhono & Chandra
93	2017	CPIN	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
94	2017	DSNG	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
95	2017	DVLA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
96	2017	EPMT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
97	2017	GGRM	Siddharta widjaja & Rekan
98	2017	HMSP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
99	2017	ICBP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
100	2017	INDF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
101	2017	JPFA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
102	2017	KLBF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)

103	2017	LSIP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
104	2017	MERK	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
105	2017	MIDI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
106	2017	MLBI	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
107	2017	MYOR	Mirawati Sensi Idris
108	2017	ROTI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
109	2017	SIDO	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
110	2017	SIPD	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
111	2017	SKBM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
112	2017	SMAR	Mirawati Sensi Idris
113	2017	SSMS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
114	2017	STTP	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
115	2017	TGKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
116	2017	TSPC	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
117	2017	ULTJ	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
118	2017	UNVR	Sliddharta widjaja & Rekan (KPMG)
119	2017	WIIM	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
120	2017	APII	Teramihardja , Pradhono & Chandra
121	2017	ARNA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
122	2017	ASGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
123	2017	ASII	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
124	2017	BHIT	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
125	2017	ICON	Jimmy Budhi & Rekan
126	2017	JECC	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
127	2017	JTPE	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
128	2017	MFMI	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
129	2017	SCCO	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
130	2017	UNTR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
131	2018	AKPI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
132	2018	ALKA	Anwar & Rekan
133	2018	ANTM	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
134	2018	DPNS	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
135	2018	EKAD	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
136	2018	FASW	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
137	2018	IGAR	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
138	2018	INAI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan

139	2018	INCI	Arman Eddy Ferdinand & Rekan
140	2018	INTP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
141	2018	ISSP	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
142	2018	KDSI	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
143	2018	LTLS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
144	2018	SMBR	Herman Dody Tanumihardja & Rekan
145	2018	SMGR	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
146	2018	SPMA	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
147	2018	SRSN	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
148	2018	TALF	Tjahjadi & Tamara
149	2018	TRST	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
150	2018	WTON	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
151	2018	AALI	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
152	2018	ADES	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
153	2018	AMRT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
154	2018	BISI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
155	2018	BUDI	Mirawati Sensi Idris
156	2018	CEKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
157	2018	CINT	Teramihardja, Pradhono & Chandra
158	2018	CPIN	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
159	2018	DSNG	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
160	2018	DVLA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
161	2018	EPMT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
162	2018	GGRM	Siddharta widjaja & Rekan
163	2018	HMSP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
164	2018	ICBP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
165	2018	INDF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
166	2018	JPFA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
167	2018	KLBF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
168	2018	LSIP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
169	2018	MERK	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
170	2018	MIDI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
171	2018	MLBI	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
172	2018	MYOR	Mirawati Sensi Idris
173	2018	ROTI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
174	2018	SIDO	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
175	2018	SIPD	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan

176	2018	SKBM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
177	2018	SMAR	Mirawati Sensi Idris
178	2018	SSMS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
179	2018	STTP	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
180	2018	TGKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
181	2018	TSPC	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
182	2018	ULTJ	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
183	2018	UNVR	Sliddharta widjaja & Rekan (KPMG)
184	2018	WIIM	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
185	2018	APII	Teramihardja , Pradhono & Chandra
186	2018	ARNA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
187	2018	ASGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
188	2018	ASII	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
189	2018	BHIT	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
190	2018	ICON	Jimmy Budhi & Rekan
191	2018	JECC	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
192	2018	JTPE	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
193	2018	MFMI	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
194	2018	SCCO	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
195	2018	UNTR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
196	2019	AKPI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
197	2019	ALKA	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
198	2019	ANTM	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
199	2019	DPNS	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
200	2019	EKAD	Tjahjadi & Tamara
201	2019	FASW	Imelda & Rekan
202	2019	IGAR	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
203	2019	INAI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
204	2019	INCI	Arman Eddy Ferdinand & Rekan
205	2019	INTP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
206	2019	ISSP	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
207	2019	KDSI	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
208	2019	LTLS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
209	2019	SMBR	Djoko, Sidik & Indra
210	2019	SMGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
211	2019	SPMA	Hadori Sugiarto Adi & Rekan

212	2019	SRSN	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
213	2019	TALF	Tjahjadi & Tamara
214	2019	TRST	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
215	2019	WTON	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
216	2019	AALI	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
217	2019	ADES	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
218	2019	AMRT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
219	2019	BISI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
220	2019	BUDI	Mirawati Sensi Idris
221	2019	CEKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
222	2019	CINT	Teramihardja, Pradhono & Chandra
223	2019	CPIN	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
224	2019	DSNG	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
225	2019	DVLA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
226	2019	EPMT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
227	2019	GGRM	Siddharta widjaja & Rekan
228	2019	HMSP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
229	2019	ICBP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
230	2019	INDF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
231	2019	JPFA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
232	2019	KLBF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
233	2019	LSIP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
234	2019	MERK	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
235	2019	MIDI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
236	2019	MLBI	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
237	2019	MYOR	Mirawati Sensi Idris
238	2019	ROTI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
239	2019	SIDO	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
240	2019	SIPD	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
241	2019	SKBM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
242	2019	SMAR	Mirawati Sensi Idris
243	2019	SSMS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
244	2019	STTP	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
245	2019	TGKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
246	2019	TSPC	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
247	2019	ULTJ	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
248	2019	UNVR	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)

249	2019	WIIM	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
250	2019	APII	Teramihardja , Pradhono & Chandra
251	2019	ARNA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
252	2019	ASGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
253	2019	ASII	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
254	2019	BHIT	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
255	2019	ICON	Jimmy Budhi & Rekan
256	2019	JECC	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
257	2019	JTPE	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
258	2019	MFMI	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
259	2019	SCCO	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
260	2019	UNTR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
261	2020	AKPI	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
262	2020	ALKA	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
263	2020	ANTM	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
264	2020	DPNS	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
265	2020	EKAD	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo
266	2020	FASW	Imelda & Rekan
267	2020	IGAR	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
268	2020	INAI	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
269	2020	INCI	Arman Eddy Ferdinand & Rekan
270	2020	INTP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
271	2020	ISSP	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
272	2020	KDSI	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
273	2020	LTLS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
274	2020	SMBR	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
275	2020	SMGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
276	2020	SPMA	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
277	2020	SRSN	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
278	2020	TALF	Tjahjadi & Tamara
279	2020	TRST	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
280	2020	WTON	Amir Abadi Jusuf, Aryanto. Mawar & Rekan
281	2020	AALI	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
282	2020	ADES	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
283	2020	AMRT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
284	2020	BISI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)

285	2020	BUDI	Mirawati Sensi Idris
286	2020	CEKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
287	2020	CINT	Teramihardja, Pradhono & Chandra
288	2020	CPIN	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
289	2020	DSNG	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
290	2020	DVLA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
291	2020	EPMT	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
292	2020	GGRM	Siddharta widjaja & Rekan
293	2020	HMSP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
294	2020	ICBP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
295	2020	INDF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
296	2020	JPFA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
297	2020	KLBF	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
298	2020	LSIP	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
299	2020	MERK	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
300	2020	MIDI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
301	2020	MLBI	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)
302	2020	MYOR	Mirawati Sensi Idris
303	2020	ROTI	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
304	2020	SIDO	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
305	2020	SIPD	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
306	2020	SKBM	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
307	2020	SMAR	Mirawati Sensi Idris
308	2020	SSMS	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
309	2020	STTP	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
310	2020	TGKA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
311	2020	TSPC	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
312	2020	ULTJ	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
313	2020	UNVR	Siddharta widjaja & Rekan (KPMG)
314	2020	WIIM	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
315	2020	APII	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
316	2020	ARNA	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)
317	2020	ASGR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
318	2020	ASII	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)
319	2020	BHIT	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
320	2020	ICON	Jimmy Budhi & Rekan
321	2020	JECC	Gani Sigiro & Handayani

322	2020	JTPE	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan
323	2020	MFMI	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
324	2020	SCCO	Kanaka, Puradiredja, Suhartono
325	2020	UNTR	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)

3.2 Data Kepemilikan Institusional akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	SAHAM INVESTOR INSTITUSIONAL	TOTAL SAHAM
1	2016	AKPI	398,747,943,000	680,000,000,000
2	2016	ALKA	80,083,011,000	400,415,055,000
3	2016	ANTM	15,619,999,999,000	24,030,764,725,000
4	2016	DPNS	198,235,935	331,129,952
5	2016	EKAD	527,200,720	698,775,000
6	2016	FASW	2,157,744,599	2,477,888,787
7	2016	IGAR	824,612,420	972,204,500
8	2016	INAI	247,037,000	316,800,000
9	2016	INCI	37,660,000	181,035,556
10	2016	INTP	2,357,216,097,000,000	3,681,231,699,000,000
11	2016	ISSP	4,020,063,930,000	7,185,992,032,000
12	2016	KDSI	306,488,500	405,000,000
13	2016	LTLS	843,232,000,000,000	1,560,000,000,000,000
14	2016	SMBR	7,500,000,000,000	9,837,678,500,000
15	2016	SMGR	3,025,406,000,000	5,931,520,000,000
16	2016	SPMA	1,599,759,797	2,114,570,958
17	2016	SRSN	4,093,850,845,000	6,020,000,000,000
18	2016	TALF	1,345,097,700	1,353,435,000
19	2016	TRST	1,591,864,325	2,808,000,000
20	2016	WTON	5,834,850,000,000	8,969,951,370,000
21	2016	AALI	1,533,682,440,000,000	2,099,873,760,000,000
22	2016	ADES	539,896,713,000,000	589,896,800,000,000
23	2016	AMRT	21,817,295,910,000,000	41,524,501,700,000,000
24	2016	BISI	1,622,344,000,000,000	3,000,000,000,000,000
25	2016	BUDI	2,402,568,831,000,000	4,498,997,362,000,000
26	2016	CEKA	547,471,000	595,000,000
27	2016	CINT	696,500,000	1,000,000,000

28	2016	CPIN	9,106,738,010,000,000	16,398,000,000,000,000
29	2016	DSNG	5,832,182,608,000,000	10,599,842,400,000,000
30	2016	DVLA	1,031,800,912,000	1,120,000,000,000
31	2016	EPMT	2,486,601,795	2,708,640,000
32	2016	GGRM	1,453,589,500,000,000	1,924,088,000,000,000
33	2016	HMSP	107,594,221,125,000,000	116,318,076,900,000,000
34	2016	ICBP	9,391,678,000,000,000	11,661,908,000,000,000
35	2016	INDF	4,396,103,450,000,000	8,780,426,500,000,000
36	2016	JPFA	7,186,001,335,000,000	2,911,590,000,000,000
37	2016	KLBF	26,488,713,385	46,875,122,110
38	2016	LSIP	4,065,995,310,000,000	6,822,863,965,000,000
39	2016	MERK	388,194,920,000	175,615,170,000
40	2016	MIDI	2,499,552,500,000,000	2,882,353,000,000,000
41	2016	MLBI	1,723,151,000,000,000	2,107,000,000,000,000
42	2016	MYOR	13,207,471,425	22,358,699,725
43	2016	ROTI	3,511,223,500	5,061,800,000
44	2016	SIDO	6,075,000,000,000,000	15,000,000,000,000,000
45	2016	SIPD	65,068,700	65,068,700
46	2016	SKBM	755,159,606	936,530,894
47	2016	SMAR	2,791,897,571,000,000	2,872,193,366,000,000
48	2016	SSMS	6,420,000,000,000	9,525,000,000,000
49	2016	STTP	743,600,500	1,310,000,000
50	2016	TGKA	912,290,770	918,492,750
51	2016	TSPC	3,528,839,418	4,500,000,000
52	2016	ULTJ	1,285,697,026	2,888,382,000
53	2016	UNVR	6,484,877,500,000,000	7,630,000,000,000,000
54	2016	WIIM	580,018,070	2,099,873,760
55	2016	APII	177,785,240	1,075,760,000
56	2016	ARNA	1,025,450,000	7,341,430,976
57	2016	ASGR	1,036,752,580,000,000	1,348,780,500,000,000
58	2016	ASII	20,288,255,040,000,000,000	40,483,553,140,000,000,000
59	2016	BHIT	26,715,438,250,000,000	48,057,050,367,000,000
60	2016	ICON	346,189,000	1,089,750,000
61	2016	JECC	3,256,380,000	4,833,500,000
62	2016	JTPE	1,125,000,000	1,713,012,500
63	2016	MFMI	499,920,900	757,581,000

64	2016	SCCO	146,275,640	205,583,400
65	2016	UNTR	2,219,317,358,000,000	3,730,135,136,000,000
66	2017	AKPI	476,175,852,000	680,000,000,000
67	2017	ALKA	379,683,055,000	400,415,055,000
68	2017	ANTM	15,619,999,999,000	24,030,764,724,000
69	2017	DPNS	198,235,935	331,129,952
70	2017	EKAD	536,712,320	698,775,000
71	2017	FASW	2,136,259,799	2,477,888,787
72	2017	IGAR	824,612,420	972,204,500
73	2017	INAI	494,129,400	633,600,000
74	2017	INCI	27,682,506	181,035,556
75	2017	INTP	1,877,480,863,000,000	3,681,231,699,000,000
76	2017	ISSP	4,020,063,930,000	7,185,992,035,000
77	2017	KDSI	339,967,200	405,000,000
78	2017	LTLS	833,632,000,000,000	1,560,000,000,000,000
79	2017	SMBR	7,499,999,999,000	9,924,797,283,000
80	2017	SMGR	3,025,406,000,000	5,931,520,000,000
81	2017	SPMA	1,764,759,797	2,114,570,958
82	2017	SRSN	1,974,198,800,000	6,020,000,000,000
83	2017	TALF	1,345,097,700	1,353,435,000
84	2017	TRST	1,622,167,825	2,808,000,000
85	2017	WTON	5,229,280,000,000	5,715,466,600,000
86	2017	AALI	1,533,682,440,000	3,878,995,000,000
87	2017	ADES	53,989,671,300,000	589,896,800,000,000
88	2017	AMRT	21,817,295,910,000,000	41,524,501,700,000,000
89	2017	BISI	1,622,344,000,000,000	3,000,000,000,000,000
90	2017	BUDI	2,402,568,831,000,000	4,498,997,362,000,000
91	2017	CEKA	547,471,000	595,000,000
92	2017	CINT	678,400,000	1,000,000,000
93	2017	CPIN	678,400,000,000,000	6,784,000,000,000,000
94	2017	DSNG	5,924,900,208,000,000	35,000,000,000,000,000
95	2017	DVLA	1,031,800,912,000	1,120,000,000,000
96	2017	EPMT	2,486,601,795	2,708,640,000
97	2017	GGRM	1,453,589,500,000,000	1,924,088,000,000,000
98	2017	HMSP	107,594,221,125,000,000	116,318,076,900,000,000
99	2017	ICBP	9,391,678,000,000,000	11,661,908,000,000,000

100	2017	INDF	4,396,103,450,000,000	8,780,426,500,000,000
101	2017	JPFA	7,186,031,335,000,000	2,911,590,000,000,000
102	2017	KLBF	26,488,713,385	46,875,122,110
103	2017	LSIP	4,065,995,310,000,000	26,488,713,385,000,000
104	2017	MERK	388,194,920,000	2,099,873,760,000
105	2017	MIDI	2,499,552,500,000,000	2,882,353,000,000,000
106	2017	MLBI	1,723,151,000,000,000	2,107,000,000,000,000
107	2017	MYOR	13,207,471,425	22,358,699,725
108	2017	ROTI	4,348,028,207	6,186,488,888
109	2017	SIDO	12,150,000,000,000,000	15,000,000,000,000,000
110	2017	SIPD	65,068,700	65,068,700
111	2017	SKBM	1,429,025,322	1,726,003,217
112	2017	SMAR	2,653,897,571,000,000	2,872,193,366,000,000
113	2017	SSMS	6,344,113,500,000	9,525,000,000,000
114	2017	STTP	743,600,500	1,310,000,000
115	2017	TGKA	899,097,500	918,492,750
116	2017	TSPC	3,551,607,218	4,500,000,000
117	2017	ULTJ	4,258,588,260	11,553,528,000
118	2017	UNVR	6,484,877,500,000,000	7,630,000,000,000,000
119	2017	WIIM	108,000,000	2,099,873,760
120	2017	APII	177,785,240	1,075,760,000
121	2017	ARNA	1,026,150,000	7,341,430,976
122	2017	ASGR	1,036,752,580,000,000	1,348,780,500,000,000
123	2017	ASII	20,288,255,040,000,000,000	40,483,553,140,000,000,000
124	2017	BHIT	27,181,136,129,000,000	48,057,050,367,000,000
125	2017	ICON	423,060,066	1,089,750,000
126	2017	JECC	4,317,042,954	4,833,500,000
127	2017	JTPE	1,125,000,000	1,713,012,500
128	2017	MFMI	706,425,400	757,581,000
129	2017	SCCO	146,275,640	205,583,400
130	2017	UNTR	2,219,317,358,000,000	3,730,135,136,000,000
131	2018	AKPI	477,478,323,000	680,000,000,000
132	2018	ALKA	379,683,055,000	400,415,055,000
133	2018	ANTM	15,619,999,999,000	24,030,764,724,000
134	2018	DPNS	220,774,238	331,129,952
135	2018	EKAD	541,781,720	698,775,000

136	2018	FASW	2,157,744,599	2,477,888,787
137	2018	IGAR	824,612,420	972,204,500
138	2018	INAI	493,734,400	633,600,000
139	2018	INCI	29,989,381	196,121,137
140	2018	INTP	1,877,480,863,000,000	3,681,231,699,000,000
141	2018	ISSP	4,020,063,930,000	7,185,992,035,000
142	2018	KDSI	339,967,200	405,000,000
143	2018	LTLS	833,632,000,000,000	1,560,000,000,000,000
144	2018	SMBR	7,499,999,999,000	9,932,534,336,000
145	2018	SMGR	3,025,406,000,000	5,931,519,999,000
146	2018	SPMA	1,953,225,197	2,114,570,958
147	2018	SRSN	3,343,558,424,000	6,020,000,000,000
148	2018	TALF	1,345,716,700	1,353,435,000
149	2018	TRST	372,499,660	2,808,000,000
150	2018	WTON	5,919,426,149,000	8,715,466,600,000
151	2018	AALI	1,533,682,440,000,000	1,924,688,333,000,000
152	2018	ADES	539,896,713,000,000	589,896,800,000,000
153	2018	AMRT	21,817,295,910,000,000	41,524,501,700,000,000
154	2018	BISI	1,622,344,000,000,000	3,000,000,000,000,000
155	2018	BUDI	2,402,568,831,000,000	4,498,997,362,000,000
156	2018	CEKA	547,471,000	595,000,000
157	2018	CINT	718,990,500	1,000,000,000
158	2018	CPIN	9,106,385,410,000,000	16,398,000,000,000,000
159	2018	DSNG	5,924,900,208,000,000	35,000,000,000,000,000
160	2018	DVLA	1,031,800,912,000	1,120,000,000,000
161	2018	EPMT	2,486,601,795	2,708,640,000
162	2018	GGRM	1,453,589,500,000,000	1,924,088,000,000,000
163	2018	HMSP	107,594,221,125,000,000	116,318,076,900,000,000
164	2018	ICBP	9,391,678,000,000,000	11,661,908,000,000,000
165	2018	INDF	4,396,103,450,000,000	8,780,426,500,000,000
166	2018	JPFA	7,514,780,366,000,000	2,099,873,760,000,000
167	2018	KLBF	26,488,713,385	46,875,122,110
168	2018	LSIP	4,065,995,310,000,000	6,822,863,965,000,000
169	2018	MERK	388,194,920,000	448,000,000,000
170	2018	MIDI	2,499,552,500,000,000	2,882,353,000,000,000
171	2018	MLBI	1,723,151,000,000,000	2,107,000,000,000,000
172	2018	MYOR	13,207,471,425	22,358,699,725

173	2018	ROTI	4,523,028,207	6,186,488,888
174	2018	SIDO	12,150,000,000,000,000	15,000,000,000,000,000
175	2018	SIPD	65,068,700	65,068,700
176	2018	SKBM	1,429,025,322	1,726,003,217
177	2018	SMAR	2,653,897,571,000,000	2,872,193,366,000,000
178	2018	SSMS	6,093,682,900,000	9,525,000,000,000
179	2018	STTP	743,600,500	1,310,000,000
180	2018	TGKA	899,254,500	918,492,750
181	2018	TSPC	3,835,523,318	4,500,000,000
182	2018	ULTJ	4,193,338,260	11,553,528,000
183	2018	UNVR	6,484,877,500,000,000	7,630,000,000,000,000
184	2018	WIIM	116,000,000	2,099,873,760
185	2018	APII	773,340,020	1,075,760,000
186	2018	ARNA	1,026,388,000	7,341,430,976
187	2018	ASGR	1,036,752,580,000,000	1,348,780,500,000,000
188	2018	ASII	20,288,255,040,000,000,000	40,483,553,140,000,000,000
189	2018	BHIT	31,351,391,924,000,000	51,939,135,584,000,000
190	2018	ICON	346,189,000	1,089,750,000
191	2018	JECC	4,341,088,454	4,833,500,000
192	2018	JTPE	1,125,000,000	1,713,012,500
193	2018	MFMI	706,425,400	757,581,000
194	2018	SCCO	146,275,640	205,583,400
195	2018	UNTR	2,219,317,358,000,000	3,730,135,136,000,000
196	2019	AKPI	477,478,323,000	680,000,000,000
197	2019	ALKA	379,683,055,000	400,415,055,000
198	2019	ANTM	15,619,999,999,000	24,030,764,724,000
199	2019	DPNS	220,774,238	331,129,952
200	2019	EKAD	548,343,820	698,775,000
201	2019	FASW	2,470,733,140	2,477,888,787
202	2019	IGAR	824,612,420	972,204,500
203	2019	INAI	493,734,400	633,600,000
204	2019	INCI	29,989,381	196,121,137
205	2019	INTP	1,877,480,863,000,000	3,681,231,699,000,000
206	2019	ISSP	4,020,063,930,000	7,185,992,035,000
207	2019	KDSI	339,944,200	405,000,000
208	2019	LTLS	833,632,000,000,000	1,560,000,000,000,000

209	2019	SMBR	7,499,999,999,000	9,932,534,336,000
210	2019	SMGR	3,025,405,000,000	5,931,519,999,000
211	2019	SPMA	1,953,225,197	2,114,570,958
212	2019	SRSN	3,040,100,722,000	6,020,000,000,000
213	2019	TALF	1,345,715,600	1,353,435,000
214	2019	TRST	1,622,167,825	2,808,000,000
215	2019	WTON	5,838,989,549,000	8,715,466,600,000
216	2019	AALI	1,533,682,440,000,000	1,924,688,333,000,000
217	2019	ADES	539,896,713,000,000	589,896,800,000,000
218	2019	AMRT	21,817,295,910,000,000	41,524,501,700,000,000
219	2019	BISI	1,624,312,500,000,000	21,817,295,910,000,000
220	2019	BUDI	2,602,568,831,000,000	4,498,997,362,000,000
221	2019	CEKA	547,471,000	595,000,000
222	2019	CINT	1,575,729,600	1,000,000,000
223	2019	CPIN	1,575,729,600,000,000	1,575,729,600,000,000
224	2019	DSNG	5,930,776,208,000,000	35,000,000,000,000,000
225	2019	DVLA	1,031,800,912,000	1,120,000,000,000
226	2019	EPMT	2,504,801,795	2,708,640,000
227	2019	GGRM	1,453,589,500,000,000	1,924,088,000,000,000
228	2019	HMSP	107,594,221,125,000,000	116,318,076,900,000,000
229	2019	ICBP	9,391,678,000,000	11,661,908,000,000,000
230	2019	INDF	4,396,103,450,000,000	8,780,426,500,000,000
231	2019	JPFA	6,148,115,716,000,000	2,911,590,000,000,000
232	2019	KLBF	26,488,713,385	46,875,122,110
233	2019	LSIP	4,065,995,310,000,000	6,822,863,965,000,000
234	2019	MERK	388,194,920,000	448,000,000,000
235	2019	MIDI	2,499,552,500,000,000	2,882,353,000,000,000
236	2019	MLBI	1,723,151,000,000,000	2,107,000,000,000,000
237	2019	MYOR	13,207,471,425	22,358,699,725
238	2019	ROTI	4,523,028,207	6,186,488,888
239	2019	SIDO	12,150,000,000,000,000	15,000,000,000,000,000
240	2019	SIPD	65,068,700	3,556,197,300
241	2019	SKBM	1,429,025,322	1,726,003,217
242	2019	SMAR	2,653,897,571,000,000	2,872,193,366,000,000
243	2019	SSMS	6,267,969,879,000	9,525,000,000,000
244	2019	STTP	743,600,500	1,310,000,000
245	2019	TGKA	899,254,500	918,492,750

246	2019	TSPC	3,619,823,418	4,500,000,000
247	2019	ULTJ	4,203,338,260	11,553,528,000
248	2019	UNVR	6,484,877,500,000,000	7,630,000,000,000,000
249	2019	WIIM	107,041,400	2,099,873,760
250	2019	APII	773,340,020	1,075,760,000
251	2019	ARNA	1,027,150,000	7,341,430,976
252	2019	ASGR	1,036,752,580,000,000	1,348,780,500,000,000
253	2019	ASII	20,288,255,040,000,000,000	40,483,553,140,000,000,000
254	2019	BHIT	34,328,505,828,000,000	67,767,400,934,000,000
255	2019	ICON	346,189,000	1,089,750,000
256	2019	JECC	4,341,088,454	4,833,500,000
257	2019	JTPE	1,125,000,000	1,713,012,500
258	2019	MFMI	706,425,400	757,581,000
259	2019	SCCO	146,275,640	205,583,400
260	2019	UNTR	2,219,317,358,000,000	3,730,135,136,000,000
261	2020	AKPI	477,478,323,000	612,248,000,000
262	2020	ALKA	379,683,055,000	400,415,055,000
263	2020	ANTM	15,619,999,999,000	24,030,764,724,000
264	2020	DPNS	220,574,238	331,129,952
265	2020	EKAD	555,758,520	698,775,000
266	2020	FASW	2,470,733,140	2,477,888,787
267	2020	IGAR	824,612,420	972,204,500
268	2020	INAI	493,734,400	633,600,000
269	2020	INCI	29,989,381	196,121,237
270	2020	INTP	1,877,480,863,000,000	3,681,231,699,000,000
271	2020	ISSP	4,020,063,930,000	7,185,992,035,000
272	2020	KDSI	317,691,000	405,000,000
273	2020	LTLS	853,432,000,000,000	1,560,000,000,000,000
274	2020	SMBR	7,499,999,999,000	9,932,534,336,000
275	2020	SMGR	3,025,405,999,000	5,931,519,999,000
276	2020	SPMA	1,953,225,197	2,114,570,958
277	2020	SRSN	3,040,100,722,000	6,020,000,000,000
278	2020	TALF	1,345,715,600	1,353,435,000
279	2020	TRST	1,622,167,825	2,808,000,000
280	2020	WTON	5,827,165,749,000	8,715,466,600,000
281	2020	AALI	1,533,682,440,000,000	1,924,688,333,000,000

282	2020	ADES	539,896,713,000,000	589,896,800,000,000
283	2020	AMRT	21,819,948,710,000,000	41,524,501,700,000,000
284	2020	BISI	1,624,312,500,000,000	300,000,000,000,000
285	2020	BUDI	2,602,568,831,000,000	4,498,997,362,000,000
286	2020	CEKA	547,261,000	595,000,000
287	2020	CINT	774,614,800	1,000,000,000
288	2020	CPIN	9,106,385,410,000,000	16,398,000,000,000,000
289	2020	DSNG	5,930,776,208,000,000	35,000,000,000,000,000
290	2020	DVLA	1,031,800,912,000	1,120,000,000,000
291	2020	EPMT	2,504,801,795	2,708,640,000
292	2020	GGRM	1,453,589,500,000,000	1,924,088,000,000,000
293	2020	HMSP	107,594,221,125,000,000	116,318,076,900,000,000
294	2020	ICBP	9,391,678,000,000,000	11,661,908,000,000,000
295	2020	INDF	4,396,103,450,000,000	8,780,426,500,000,000
296	2020	JPFA	6,387,169,116,000,000	2,911,590,000,000,000
297	2020	KLBF	26,751,692,486	46,875,122,110
298	2020	LSIP	4,065,995,310,000,000	4,065,995,310,000,000
299	2020	MERK	388,194,920,000	448,000,000,000
300	2020	MIDI	2,499,552,500,000,000	2,882,353,000,000,000
301	2020	MLBI	1,723,151,000,000,000	2,107,000,000,000,000
302	2020	MYOR	13,207,471,425	22,358,699,725
303	2020	ROTI	5,122,874,922	6,186,488,888
304	2020	SIDO	24,300,000,000,000,000	30,000,000,000,000,000
305	2020	SIPD	65,068,700	65,068,700
306	2020	SKBM	1,429,025,322	1,726,003,217
307	2020	SMAR	2,653,897,571,000,000	2,872,193,366,000,000
308	2020	SSMS	6,493,410,000,000	9,525,000,000,000
309	2020	STTP	743,600,500	1,310,000,000
310	2020	TGKA	899,233,800	918,492,750
311	2020	TSPC	3,674,161,618	4,500,000,000
312	2020	ULTJ	2,472,304,260	10,398,175,200
313	2020	UNVR	32,424,387,500,000,000	38,150,000,000,000,000
314	2020	WIIM	510,486,391	2,099,873,760
315	2020	APII	773,340,020	1,075,760,000
316	2020	ARNA	1,030,000,000	7,341,430,976
317	2020	ASGR	1,036,752,580,000,000	1,348,780,500,000,000

318	2020	ASII	20,288,255,040,000,000,000	40,483,553,140,000,000,000
319	2020	BHIT	34,253,433,228,000,000	73,766,098,834,000,000
320	2020	ICON	439,422,000	1,089,750,000
321	2020	JECC	4,349,189,854	4,833,500,000
322	2020	JTPE	1,125,000,000	1,713,012,500
323	2020	MFMI	706,425,400	757,581,000
324	2020	SCCO	146,275,640	205,583,400
325	2020	UNTR	2,219,317,358,000,000	3,730,135,136,000,000

3.3 Data Diversiti Gender dalam Dewan Direksi akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	WANITA DALAM DIREKSI	JUMLAH DEWAN DIREKSI
1	2016	AKPI	0	5
2	2016	ALKA	0	3
3	2016	ANTM	0	6
4	2016	DPNS	0	4
5	2016	EKAD	1	3
6	2016	FASW	1	6
7	2016	IGAR	1	5
8	2016	INAI	0	5
9	2016	INCI	0	3
10	2016	INTP	0	9
11	2016	ISSP	0	5
12	2016	KDSI	0	3
13	2016	LTLS	0	6
14	2016	SMBR	1	5
15	2016	SMGR	0	7
16	2016	SPMA	1	4
17	2016	SRSN	0	6
18	2016	TALF	0	5
19	2016	TRST	0	3
20	2016	WTON	0	6
21	2016	AALI	0	6
22	2016	ADES	0	3
23	2016	AMRT	0	7

24	2016	BISI	0	5
25	2016	BUDI	1	7
26	2016	CEKA	1	4
27	2016	CINT	0	5
28	2016	CPIN	1	7
29	2016	DSNG	2	8
30	2016	DVLA	3	8
31	2016	EPMT	1	3
32	2016	GGRM	1	7
33	2016	HMSP	1	8
34	2016	ICBP	1	9
35	2016	INDF	1	10
36	2016	JPFA	0	5
37	2016	KLBF	1	5
38	2016	LSIP	0	6
39	2016	MERK	1	5
40	2016	MIDI	1	5
41	2016	MLBI	0	4
42	2016	MYOR	0	5
43	2016	ROTI	1	5
44	2016	SIDO	1	5
45	2016	SIPD	1	5
46	2016	SKBM	2	8
47	2016	SMAR	0	6
48	2016	SSMS	0	3
49	2016	STTP	0	4
50	2016	TGKA	1	4
51	2016	TSPC	3	10
52	2016	ULTJ	0	3
53	2016	UNVR	4	10
54	2016	WIIM	1	6
55	2016	APII	0	3
56	2016	ARNA	0	3
57	2016	ASGR	0	4
58	2016	ASII	0	11
59	2016	BHIT	3	6
60	2016	ICON	0	5

61	2016	JECC	1	6
62	2016	JTPE	0	3
63	2016	MFMI	1	3
64	2016	SCCO	0	4
65	2016	UNTR	0	7
66	2017	AKPI	0	5
67	2017	ALKA	0	3
68	2017	ANTM	0	6
69	2017	DPNS	0	4
70	2017	EKAD	1	3
71	2017	FASW	1	6
72	2017	IGAR	1	5
73	2017	INAI	0	5
74	2017	INCI	0	3
75	2017	INTP	0	9
76	2017	ISSP	0	5
77	2017	KDSI	0	3
78	2017	LTLS	0	6
79	2017	SMBR	0	5
80	2017	SMGR	0	7
81	2017	SPMA	1	4
82	2017	SRSN	0	6
83	2017	TALF	0	5
84	2017	TRST	0	4
85	2017	WTON	0	7
86	2017	AALI	0	6
87	2017	ADES	0	3
88	2017	AMRT	0	7
89	2017	BISI	0	5
90	2017	BUDI	1	7
91	2017	CEKA	1	4
92	2017	CINT	0	5
93	2017	CPIN	1	7
94	2017	DSNG	2	8
95	2017	DVLA	3	8
96	2017	EPMT	1	3

97	2017	GGRM	1	7
98	2017	HMSP	1	8
99	2017	ICBP	1	9
100	2017	INDF	1	10
101	2017	JPFA	0	5
102	2017	KLBF	1	5
103	2017	LSIP	0	6
104	2017	MERK	1	5
105	2017	MIDI	1	5
106	2017	MLBI	0	4
107	2017	MYOR	0	5
108	2017	ROTI	1	5
109	2017	SIDO	1	5
110	2017	SIPD	1	5
111	2017	SKBM	2	8
112	2017	SMAR	0	6
113	2017	SSMS	0	3
114	2017	STTP	0	4
115	2017	TGKA	1	4
116	2017	TSPC	3	10
117	2017	ULTJ	0	3
118	2017	UNVR	4	10
119	2017	WIIM	1	6
120	2017	APII	0	3
121	2017	ARNA	0	3
122	2017	ASGR	0	4
123	2017	ASII	0	9
124	2017	BHIT	3	6
125	2017	ICON	0	5
126	2017	JECC	1	6
127	2017	JTPE	0	4
128	2017	MFMI	1	3
129	2017	SCCO	0	4
130	2017	UNTR	0	7
131	2018	AKPI	0	6
132	2018	ALKA	0	3
133	2018	ANTM	0	6

134	2018	DPNS	0	4
135	2018	EKAD	1	3
136	2018	FASW	1	6
137	2018	IGAR	1	5
138	2018	INAI	0	5
139	2018	INCI	0	3
140	2018	INTP	0	9
141	2018	ISSP	0	5
142	2018	KDSI	0	3
143	2018	LTLS	0	6
144	2018	SMBR	0	5
145	2018	SMGR	0	7
146	2018	SPMA	1	4
147	2018	SRSN	0	6
148	2018	TALF	0	4
149	2018	TRST	0	4
150	2018	WTON	0	7
151	2018	AALI	0	6
152	2018	ADES	0	2
153	2018	AMRT	0	6
154	2018	BISI	0	5
155	2018	BUDI	1	7
156	2018	CEKA	1	4
157	2018	CINT	0	5
158	2018	CPIN	1	7
159	2018	DSNG	2	8
160	2018	DVLA	3	8
161	2018	EPMT	1	3
162	2018	GGRM	1	7
163	2018	HMSP	1	8
164	2018	ICBP	1	9
165	2018	INDF	1	10
166	2018	JPFA	0	5
167	2018	KLBF	1	5
168	2018	LSIP	0	6
169	2018	MERK	1	5
170	2018	MIDI	1	5

171	2018	MLBI	0	4
172	2018	MYOR	0	5
173	2018	ROTI	1	5
174	2018	SIDO	1	5
175	2018	SIPD	1	5
176	2018	SKBM	2	8
177	2018	SMAR	0	6
178	2018	SSMS	0	3
179	2018	STTP	0	4
180	2018	TGKA	1	4
181	2018	TSPC	3	10
182	2018	ULTJ	0	3
183	2018	UNVR	4	10
184	2018	WIIM	1	6
185	2018	APII	0	3
186	2018	ARNA	0	3
187	2018	ASGR	0	4
188	2018	ASII	0	10
189	2018	BHIT	3	7
190	2018	ICON	0	3
191	2018	JECC	1	6
192	2018	JTPE	0	4
193	2018	MFMI	1	3
194	2018	SCCO	1	5
195	2018	UNTR	0	7
196	2019	AKPI	0	6
197	2019	ALKA	0	3
198	2019	ANTM	0	6
199	2019	DPNS	0	3
200	2019	EKAD	1	3
201	2019	FASW	1	6
202	2019	IGAR	1	5
203	2019	INAI	0	5
204	2019	INCI	0	3
205	2019	INTP	0	9
206	2019	ISSP	0	5

207	2019	KDSI	0	3
208	2019	LTLS	0	6
209	2019	SMBR	0	5
210	2019	SMGR	0	7
211	2019	SPMA	1	4
212	2019	SRSN	0	6
213	2019	TALF	0	3
214	2019	TRST	0	4
215	2019	WTON	0	6
216	2019	AALI	0	7
217	2019	ADES	0	2
218	2019	AMRT	0	6
219	2019	BISI	0	5
220	2019	BUDI	1	7
221	2019	CEKA	1	4
222	2019	CINT	0	5
223	2019	CPIN	1	7
224	2019	DSNG	2	8
225	2019	DVLA	3	8
226	2019	EPMT	1	3
227	2019	GGRM	1	7
228	2019	HMSP	1	8
229	2019	ICBP	1	9
230	2019	INDF	1	10
231	2019	JPFA	0	5
232	2019	KLBF	1	5
233	2019	LSIP	0	6
234	2019	MERK	1	5
235	2019	MIDI	1	5
236	2019	MLBI	0	4
237	2019	MYOR	0	5
238	2019	ROTI	1	5
239	2019	SIDO	1	5
240	2019	SIPD	1	5
241	2019	SKBM	2	8
242	2019	SMAR	0	6
243	2019	SSMS	0	3

244	2019	STTP	0	4
245	2019	TGKA	1	4
246	2019	TSPC	3	10
247	2019	ULTJ	0	3
248	2019	UNVR	4	10
249	2019	WIIM	1	6
250	2019	APII	0	3
251	2019	ARNA	0	3
252	2019	ASGR	0	4
253	2019	ASII	1	11
254	2019	BHIT	3	7
255	2019	ICON	0	4
256	2019	JECC	2	7
257	2019	JTPE	0	4
258	2019	MFMI	1	4
259	2019	SCCO	1	5
260	2019	UNTR	0	6
261	2020	AKPI	0	6
262	2020	ALKA	0	3
263	2020	ANTM	0	6
264	2020	DPNS	0	2
265	2020	EKAD	1	3
266	2020	FASW	0	5
267	2020	IGAR	1	5
268	2020	INAI	0	5
269	2020	INCI	0	3
270	2020	INTP	0	9
271	2020	ISSP	0	2
272	2020	KDSI	0	3
273	2020	LTLS	0	5
274	2020	SMBR	0	5
275	2020	SMGR	0	7
276	2020	SPMA	0	4
277	2020	SRSN	0	6
278	2020	TALF	0	3
279	2020	TRST	0	4

280	2020	WTON	0	5
281	2020	AALI	0	7
282	2020	ADES	0	2
283	2020	AMRT	0	6
284	2020	BISI	0	5
285	2020	BUDI	1	7
286	2020	CEKA	1	4
287	2020	CINT	0	5
288	2020	CPIN	1	7
289	2020	DSNG	2	8
290	2020	DVLA	3	8
291	2020	EPMT	1	3
292	2020	GGRM	1	7
293	2020	HMSP	1	8
294	2020	ICBP	1	9
295	2020	INDF	1	10
296	2020	JPFA	0	5
297	2020	KLBF	1	5
298	2020	LSIP	0	6
299	2020	MERK	1	5
300	2020	MIDI	1	5
301	2020	MLBI	0	4
302	2020	MYOR	0	5
303	2020	ROTI	1	5
304	2020	SIDO	1	5
305	2020	SIPD	1	5
306	2020	SKBM	2	8
307	2020	SMAR	0	6
308	2020	SSMS	0	3
309	2020	STTP	0	4
310	2020	TGKA	1	4
311	2020	TSPC	3	10
312	2020	ULTJ	0	3
313	2020	UNVR	4	10
314	2020	WIIM	1	6
315	2020	APII	0	3
316	2020	ARNA	0	3

317	2020	ASGR	0	4
318	2020	ASII	1	9
319	2020	BHIT	3	7
320	2020	ICON	1	3
321	2020	JECC	2	8
322	2020	JTPE	2	6
323	2020	MFMI	1	4
324	2020	SCCO	1	5
325	2020	UNTR	0	6

3.4 Data Independensi Dewan Direksi akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	DEWAN DIREKSI INDEPENDEN	JUMLAH DEWAN DIREKSI
1	2016	AKPI	3	5
2	2016	ALKA	3	3
3	2016	ANTM	6	6
4	2016	DPNS	1	4
5	2016	EKAD	1	3
6	2016	FASW	1	6
7	2016	IGAR	1	5
8	2016	INAI	2	5
9	2016	INCI	3	3
10	2016	INTP	4	9
11	2016	ISSP	1	5
12	2016	KDSI	1	3
13	2016	LTLS	2	6
14	2016	SMBR	5	5
15	2016	SMGR	3	7
16	2016	SPMA	2	4
17	2016	SRSN	1	6
18	2016	TALF	1	5
19	2016	TRST	1	3
20	2016	WTON	6	6
21	2016	AALI	1	6
22	2016	ADES	1	3

23	2016	AMRT	1	7
24	2016	BISI	1	5
25	2016	BUDI	1	7
26	2016	CEKA	1	4
27	2016	CINT	1	5
28	2016	CPIN	1	7
29	2016	DSNG	2	8
30	2016	DVLA	1	8
31	2016	EPMT	1	3
32	2016	GGRM	1	7
33	2016	HMSP	1	8
34	2016	ICBP	1	9
35	2016	INDF	1	10
36	2016	JPFA	1	5
37	2016	KLBF	1	5
38	2016	LSIP	2	6
39	2016	MERK	1	5
40	2016	MIDI	1	5
41	2016	MLBI	1	4
42	2016	MYOR	2	5
43	2016	ROTI	1	5
44	2016	SIDO	1	5
45	2016	SIPD	1	5
46	2016	SKBM	1	8
47	2016	SMAR	1	6
48	2016	SSMS	1	3
49	2016	STTP	4	4
50	2016	TGKA	3	4
51	2016	TSPC	1	10
52	2016	ULTJ	1	3
53	2016	UNVR	1	10
54	2016	WIIM	1	6
55	2016	APII	1	3
56	2016	ARNA	1	3
57	2016	ASGR	1	4
58	2016	ASII	1	11
59	2016	BHIT	1	6

60	2016	ICON	5	5
61	2016	JECC	1	6
62	2016	JTPE	1	3
63	2016	MFMI	1	3
64	2016	SCCO	1	4
65	2016	UNTR	1	7
66	2017	AKPI	3	5
67	2017	ALKA	3	3
68	2017	ANTM	6	6
69	2017	DPNS	1	4
70	2017	EKAD	1	3
71	2017	FASW	1	6
72	2017	IGAR	1	5
73	2017	INAI	2	5
74	2017	INCI	3	3
75	2017	INTP	4	9
76	2017	ISSP	1	5
77	2017	KDSI	1	3
78	2017	LTLS	2	6
79	2017	SMBR	5	5
80	2017	SMGR	7	7
81	2017	SPMA	2	4
82	2017	SRSN	1	6
83	2017	TALF	1	5
84	2017	TRST	1	4
85	2017	WTON	7	7
86	2017	AALI	1	6
87	2017	ADES	1	3
88	2017	AMRT	1	7
89	2017	BISI	1	5
90	2017	BUDI	1	7
91	2017	CEKA	1	4
92	2017	CINT	1	5
93	2017	CPIN	1	7
94	2017	DSNG	2	8
95	2017	DVLA	1	8

96	2017	EPMT	1	3
97	2017	GGRM	1	7
98	2017	HMSP	1	8
99	2017	ICBP	1	9
100	2017	INDF	1	10
101	2017	JPFA	1	5
102	2017	KLBF	1	5
103	2017	LSIP	2	6
104	2017	MERK	1	5
105	2017	MIDI	1	5
106	2017	MLBI	1	4
107	2017	MYOR	2	5
108	2017	ROTI	1	5
109	2017	SIDO	1	5
110	2017	SIPD	1	5
111	2017	SKBM	1	8
112	2017	SMAR	1	6
113	2017	SSMS	1	3
114	2017	STTP	4	4
115	2017	TGKA	3	4
116	2017	TSPC	1	10
117	2017	ULTJ	1	3
118	2017	UNVR	1	10
119	2017	WIIM	1	6
120	2017	APII	1	3
121	2017	ARNA	1	3
122	2017	ASGR	1	4
123	2017	ASII	1	9
124	2017	BHIT	1	6
125	2017	ICON	5	5
126	2017	JECC	1	6
127	2017	JTPE	1	4
128	2017	MFMI	1	3
129	2017	SCCO	1	4
130	2017	UNTR	1	7
131	2018	AKPI	6	6
132	2018	ALKA	3	3

133	2018	ANTM	6	6
134	2018	DPNS	1	4
135	2018	EKAD	1	3
136	2018	FASW	1	6
137	2018	IGAR	1	5
138	2018	INAI	2	5
139	2018	INCI	3	3
140	2018	INTP	4	9
141	2018	ISSP	1	5
142	2018	KDSI	1	3
143	2018	LTLS	2	6
144	2018	SMBR	5	5
145	2018	SMGR	7	7
146	2018	SPMA	2	4
147	2018	SRSN	1	6
148	2018	TALF	1	4
149	2018	TRST	1	4
150	2018	WTON	7	7
151	2018	AALI	1	6
152	2018	ADES	1	2
153	2018	AMRT	1	6
154	2018	BISI	1	5
155	2018	BUDI	1	7
156	2018	CEKA	1	4
157	2018	CINT	1	5
158	2018	CPIN	1	7
159	2018	DSNG	0	8
160	2018	DVLA	1	8
161	2018	EPMT	1	3
162	2018	GGRM	1	7
163	2018	HMSP	1	8
164	2018	ICBP	1	9
165	2018	INDF	1	10
166	2018	JPFA	1	5
167	2018	KLBF	1	5
168	2018	LSIP	2	6
169	2018	MERK	1	5

170	2018	MIDI	1	5
171	2018	MLBI	1	4
172	2018	MYOR	2	5
173	2018	ROTI	1	5
174	2018	SIDO	1	5
175	2018	SIPD	1	5
176	2018	SKBM	1	8
177	2018	SMAR	1	6
178	2018	SSMS	1	3
179	2018	STTP	4	4
180	2018	TGKA	3	4
181	2018	TSPC	1	10
182	2018	ULTJ	1	3
183	2018	UNVR	1	10
184	2018	WIIM	1	6
185	2018	APII	1	3
186	2018	ARNA	1	3
187	2018	ASGR	1	4
188	2018	ASII	1	10
189	2018	BHIT	1	7
190	2018	ICON	3	3
191	2018	JECC	1	6
192	2018	JTPE	1	4
193	2018	MFMI	1	3
194	2018	SCCO	1	5
195	2018	UNTR	1	7
196	2019	AKPI	6	6
197	2019	ALKA	3	3
198	2019	ANTM	6	6
199	2019	DPNS	1	3
200	2019	EKAD	1	3
201	2019	FASW	1	6
202	2019	IGAR	1	5
203	2019	INAI	2	5
204	2019	INCI	3	3
205	2019	INTP	4	9

206	2019	ISSP	1	5
207	2019	KDSI	1	3
208	2019	LTLS	2	6
209	2019	SMBR	5	5
210	2019	SMGR	7	7
211	2019	SPMA	2	4
212	2019	SRSN	1	6
213	2019	TALF	3	3
214	2019	TRST	1	4
215	2019	WTON	6	6
216	2019	AALI	7	7
217	2019	ADES	1	2
218	2019	AMRT	1	6
219	2019	BISI	1	5
220	2019	BUDI	1	7
221	2019	CEKA	1	4
222	2019	CINT	1	5
223	2019	CPIN	1	7
224	2019	DSNG	0	8
225	2019	DVLA	1	8
226	2019	EPMT	1	3
227	2019	GGRM	1	7
228	2019	HMSP	1	8
229	2019	ICBP	1	9
230	2019	INDF	1	10
231	2019	JPFA	1	5
232	2019	KLBF	1	5
233	2019	LSIP	2	6
234	2019	MERK	1	5
235	2019	MIDI	1	5
236	2019	MLBI	1	4
237	2019	MYOR	2	5
238	2019	ROTI	1	5
239	2019	SIDO	1	5
240	2019	SIPD	1	5
241	2019	SKBM	1	8
242	2019	SMAR	1	6

243	2019	SSMS	1	3
244	2019	STTP	4	4
245	2019	TGKA	3	4
246	2019	TSPC	1	10
247	2019	ULTJ	1	3
248	2019	UNVR	1	10
249	2019	WIIM	1	6
250	2019	APII	1	3
251	2019	ARNA	1	3
252	2019	ASGR	4	4
253	2019	ASII	0	11
254	2019	BHIT	0	7
255	2019	ICON	1	4
256	2019	JECC	7	7
257	2019	JTPE	1	4
258	2019	MFMI	1	4
259	2019	SCCO	1	5
260	2019	UNTR	2	6
261	2020	AKPI	6	6
262	2020	ALKA	3	3
263	2020	ANTM	6	6
264	2020	DPNS	1	2
265	2020	EKAD	1	3
266	2020	FASW	5	5
267	2020	IGAR	1	5
268	2020	INAI	2	5
269	2020	INCI	3	3
270	2020	INTP	4	9
271	2020	ISSP	2	2
272	2020	KDSI	1	3
273	2020	LTLS	2	5
274	2020	SMBR	5	5
275	2020	SMGR	7	7
276	2020	SPMA	1	4
277	2020	SRSN	1	6
278	2020	TALF	3	3

279	2020	TRST	1	4
280	2020	WTON	5	5
281	2020	AALI	7	7
282	2020	ADES	1	2
283	2020	AMRT	1	6
284	2020	BISI	1	5
285	2020	BUDI	1	7
286	2020	CEKA	1	4
287	2020	CINT	1	5
288	2020	CPIN	1	7
289	2020	DSNG	0	8
290	2020	DVLA	1	8
291	2020	EPMT	1	3
292	2020	GGRM	1	7
293	2020	HMSP	1	8
294	2020	ICBP	1	9
295	2020	INDF	1	10
296	2020	JPFA	1	5
297	2020	KLBF	1	5
298	2020	LSIP	2	6
299	2020	MERK	1	5
300	2020	MIDI	1	5
301	2020	MLBI	1	4
302	2020	MYOR	2	5
303	2020	ROTI	1	5
304	2020	SIDO	1	5
305	2020	SIPD	1	5
306	2020	SKBM	1	8
307	2020	SMAR	1	6
308	2020	SSMS	1	3
309	2020	STTP	4	4
310	2020	TGKA	3	4
311	2020	TSPC	1	10
312	2020	ULTJ	1	3
313	2020	UNVR	1	10
314	2020	WIIM	1	6
315	2020	APII	1	3

316	2020	ARNA	1	3
317	2020	ASGR	4	4
318	2020	ASII	0	9
319	2020	BHIT	0	7
320	2020	ICON	0	3
321	2020	JECC	6	8
322	2020	JTPE	5	6
323	2020	MFMI	1	4
324	2020	SCCO	1	5
325	2020	UNTR	6	6

3.5 Data Ukuran Perusahaan akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	TOTAL ASET
1	2016	AKPI	2,615,909,190,000
2	2016	ALKA	136,618,855
3	2016	ANTM	29,981,535,812,000
4	2016	DPNS	296,129,565,784
5	2016	EKAD	702,508,630,708
6	2016	FASW	10,965,118,708,784
7	2016	IGAR	439,465,673,296
8	2016	INAI	1,339,032,413,455
9	2016	INCI	269,351,381,344
10	2016	INTP	30,150,580,000,000
11	2016	ISSP	6,041,811,000
12	2016	KDSI	1,142,273,020,550
13	2016	LTLS	5,658,360,000,000
14	2016	SMBR	4,368,876,996,000
15	2016	SMGR	44,226,895,982,000
16	2016	SPMA	2,158,852,415,950
17	2016	SRSN	717,149,704,000
18	2016	TALF	881,673,021,959
19	2016	TRST	3,290,596,224,286
20	2016	WTON	31,096,539,490,000
21	2016	AALI	24,226,122,000,000
22	2016	ADES	767,479,000,000

23	2016	AMRT	19,474,367,000,000
24	2016	BISI	2,416,177,000,000
25	2016	BUDI	2,931,807,000,000
26	2016	CEKA	1,425,964,152,418
27	2016	CINT	399,336,626,636
28	2016	CPIN	24,204,994,000,000
29	2016	DSNG	8,183,318,000,000
30	2016	DVLA	1,531,365,558,000
31	2016	EPMT	7,087,269,812,003
32	2016	GGRM	62,951,634,000,000
33	2016	HMSP	42,508,277,000,000
34	2016	ICBP	28,901,948,000,000
35	2016	INDF	82,174,515,000,000
36	2016	JPFA	19,251,026,000,000
37	2016	KLBF	15,226,009,210,657
38	2016	LSIP	10,922,788,000,000
39	2016	MERK	743,934,894,000
40	2016	MIDI	4,261,283,000,000
41	2016	MLBI	2,275,038,000,000
42	2016	MYOR	12,922,421,859,142
43	2016	ROTI	2,919,640,858,718
44	2016	SIDO	2,987,614,000,000
45	2016	SIPD	2,567,211,193,259
46	2016	SKBM	1,001,657,012,004
47	2016	SMAR	26,141,410,000,000
48	2016	SSMS	7,162,970,110,000
49	2016	STTP	2,336,411,494,941
50	2016	TGKA	2,686,030,338,104
51	2016	TSPC	6,585,807,349,438
52	2016	ULTJ	4,239,199,641,365
53	2016	UNVR	16,745,695,000,000
54	2016	WIIM	1,353,634,132,275
55	2016	APII	407,985,799,015
56	2016	ARNA	1,543,216,299,146
57	2016	ASGR	1,723,468,000,000
58	2016	ASII	261,855,000,000,000
59	2016	BHIT	55,292,949,000,000

60	2016	ICON	468,521,879,542
61	2016	JECC	2,276,031,922,082
62	2016	JTPE	1,052,131,760,706
63	2016	MFMI	215,487,521,382
64	2016	SCCO	2,449,935,491,586
65	2016	UNTR	63,991,229,000,000
66	2017	AKPI	2,745,325,833,000
67	2017	ALKA	305,208,703,000
68	2017	ANTM	30,014,273,452
69	2017	DPNS	308,491,173,960
70	2017	EKAD	796,767,646,172
71	2017	FASW	9,369,891,776,775
72	2017	IGAR	513,022,591,574
73	2017	INAI	1,213,916,545,120
74	2017	INCI	303,788,390,330
75	2017	INTP	28,863,676,000,000
76	2017	ISSP	6,269,365,000,000
77	2017	KDSI	1,328,291,727,616
78	2017	LTLS	5,769,332,000,000
79	2017	SMBR	5,060,337,247,000
80	2017	SMGR	48,963,502,966,000
81	2017	SPMA	2,175,660,855,114
82	2017	SRSN	652,726,454,000
83	2017	TALF	921,240,988,517
84	2017	TRST	3,332,905,936,010
85	2017	WTON	7,057,976,095,043
86	2017	AALI	24,935,426,000,000
87	2017	ADES	840,236,000,000
88	2017	AMRT	21,901,740,000,000
89	2017	BISI	21,901,740,000,000
90	2017	BUDI	2,939,456,000,000
91	2017	CEKA	1,392,636,444,501
92	2017	CINT	476,577,841,605
93	2017	CPIN	24,522,593,000,000
94	2017	DSNG	8,336,065,000,000
95	2017	DVLA	1,640,886,147,000

96	2017	EPMT	7,425,800,257,838
97	2017	GGRM	66,759,930,000,000
98	2017	HMSP	43,141,063,000,000
99	2017	ICBP	31,619,514,000,000
100	2017	INDF	87,939,488,000,000
101	2017	JPFA	21,088,870,000,000
102	2017	KLBF	16,616,239,416,335
103	2017	LSIP	21,088,870,000,000
104	2017	MERK	847,006,544,000
105	2017	MIDI	4,878,115,000,000
106	2017	MLBI	2,510,078,000,000
107	2017	MYOR	14,915,849,800,251
108	2017	ROTI	4,559,573,709,411
109	2017	SIDO	3,158,198,000,000
110	2017	SIPD	2,239,699,000,000
111	2017	SKBM	1,623,027,475,045
112	2017	SMAR	27,124,101,000,000
113	2017	SSMS	9,623,672,614,000
114	2017	STTP	2,342,432,443,196
115	2017	TGKA	2,924,962,977,878
116	2017	TSPC	7,434,900,309,021
117	2017	ULTJ	5,186,940,000,000
118	2017	UNVR	18,906,413,000,000
119	2017	WIIM	1,225,712,093,041
120	2017	APII	423,181,306,980
121	2017	ARNA	1,601,346,561,573
122	2017	ASGR	24,118,720,000,000
123	2017	ASII	295,646,000,000,000
124	2017	BHIT	5,652,381,100,000
125	2017	ICON	417,620,774,123
126	2017	JECC	1,927,985,352,000
127	2017	JTPE	1,015,271,044,216
128	2017	MFMI	244,722,928,696
129	2017	SCCO	4,014,244,589,706
130	2017	UNTR	82,262,093,000,000
131	2018	AKPI	3,070,410,492,000
132	2018	ALKA	648,968,295,000

133	2018	ANTM	33,306,390,807,000
134	2018	DPNS	322,185,012,261
135	2018	EKAD	853,267,454,400
136	2018	FASW	10,965,118,708,784
137	2018	IGAR	570,197,810,698
138	2018	INAI	1,400,683,598,096
139	2018	INCI	391,362,697,956
140	2018	INTP	27,788,562,000,000
141	2018	ISSP	6,494,070,000,000
142	2018	KDSI	1,391,416,464,512
143	2018	LTLS	6,318,441,000,000
144	2018	SMBR	5,538,079,503,000
145	2018	SMGR	51,155,890,227,000
146	2018	SPMA	2,282,845,632,924
147	2018	SRSN	686,777,211,000
148	2018	TALF	984,597,771,989
149	2018	TRST	4,284,901,587,126
150	2018	WTON	8,881,778,299,672
151	2018	AALI	26,856,967,000,000
152	2018	ADES	881,275,000,000
153	2018	AMRT	22,165,968,000,000
154	2018	BISI	2,765,010,000,000
155	2018	BUDI	3,392,980,000,000
156	2018	CEKA	1,168,956,042,706
157	2018	CINT	491,382,035,136
158	2018	CPIN	27,645,118,000,000
159	2018	DSNG	11,738,892,000,000
160	2018	DVLA	1,682,821,739,000
161	2018	EPMT	8,322,960,974,230
162	2018	GGRM	69,097,219,000,000
163	2018	HMSP	46,602,420,000,000
164	2018	ICBP	34,367,153,000,000
165	2018	INDF	96,537,796,000,000
166	2018	JPFA	23,038,028,000,000
167	2018	KLBF	18,146,206,145,369
168	2018	LSIP	10,037,294,000,000
169	2018	MERK	1,263,113,689,000

170	2018	MIDI	4,960,145,000,000
171	2018	MLBI	2,889,501,000,000
172	2018	MYOR	17,591,706,426,634
173	2018	ROTI	4,393,810,380,883
174	2018	SIDO	3,337,628,000,000
175	2018	SIPD	2,470,793,000,000
176	2018	SKBM	1,771,365,972,009
177	2018	SMAR	29,310,310,000,000
178	2018	SSMS	11,296,112,298,000
179	2018	STTP	2,631,189,810,030
180	2018	TGKA	3,485,510,411,961
181	2018	TSPC	7,869,975,060,326
182	2018	ULTJ	5,555,871,000,000
183	2018	UNVR	19,522,970,000,000
184	2018	WIIM	1,255,573,914,558
185	2018	APII	450,303,354,800
186	2018	ARNA	1,652,905,985,730
187	2018	ASGR	2,271,344,000,000
188	2018	ASII	344,711,000,000,000
189	2018	BHIT	56,421,973,000,000
190	2018	ICON	395,969,370,635
191	2018	JECC	2,081,620,993,000
192	2018	JTPE	1,087,169,297,635
193	2018	MFMI	273,775,760,725
194	2018	SCCO	4,165,196,478,857
195	2018	UNTR	116,281,017,000,000
196	2019	AKPI	2,776,775,756,000
197	2019	ALKA	604,824,614,000
198	2019	ANTM	30,194,907,730,000
199	2019	DPNS	318,141,387,900
200	2019	EKAD	968,234,349,565,000,000
201	2019	FASW	10,751,992,944,302
202	2019	IGAR	617,594,780,669
203	2019	INAI	1,212,894,403,676
204	2019	INCI	405,445,049,452
205	2019	INTP	27,707,749,000,000

206	2019	ISSP	6,424,507,000,000
207	2019	KDSI	1,253,650,408,375
208	2019	LTLS	5,863,204,000,000
209	2019	SMBR	5,571,270,204,000
210	2019	SMGR	79,807,067,000,000
211	2019	SPMA	2,372,130,750,775
212	2019	SRSN	779,246,858,000
213	2019	TALF	1,329,083,050,439
214	2019	TRST	4,349,022,887,699
215	2019	WTON	10,337,895,087,207
216	2019	AALI	26,974,124,000,000
217	2019	ADES	822,375,000,000
218	2019	AMRT	23,992,313,000,000
219	2019	BISI	23,992,313,000,000
220	2019	BUDI	2,999,767,000,000
221	2019	CEKA	1,393,079,542,074
222	2019	CINT	521,493,784,876
223	2019	CPIN	29,353,041,000,000
224	2019	DSNG	11,620,821,000,000
225	2019	DVLA	1,829,960,714,000
226	2019	EPMT	8,704,958,834,283
227	2019	GGRM	78,647,274,000,000
228	2019	HMSP	50,902,806,000,000
229	2019	ICBP	38,709,314,000,000
230	2019	INDF	96,198,559,000,000
231	2019	JPFA	25,185,009,000,000
232	2019	KLBF	20,264,726,862,584
233	2019	LSIP	10,225,322,000,000
234	2019	MERK	901,060,986,000
235	2019	MIDI	4,990,309,000,000
236	2019	MLBI	2,896,950,000,000
237	2019	MYOR	19,037,918,806,473
238	2019	ROTI	4,682,083,844,951
239	2019	SIDO	3,536,898,000,000
240	2019	SIPD	2,470,793,000,000
241	2019	SKBM	1,820,383,352,811
242	2019	SMAR	27,787,527,000,000

243	2019	SSMS	11,845,204,657,000,000
244	2019	STTP	2,881,563,083,954
245	2019	TGKA	2,995,872,438,975
246	2019	TSPC	8,372,769,580,743
247	2019	ULTJ	6,608,422,000,000
248	2019	UNVR	20,649,371,000,000
249	2019	WIIM	1,299,521,608,556
250	2019	APII	490,860,655,716
251	2019	ARNA	1,799,137,069,343
252	2019	ASGR	2,896,840,000,000
253	2019	ASII	351,958,000,000,000
254	2019	BHIT	57,613,499,000,000
255	2019	ICON	369,071,617,773
256	2019	JECC	1,888,753,850,000
257	2019	JTPE	1,152,696,526,641
258	2019	MFMI	421,902,495,547
259	2019	SCCO	4,400,655,628,146
260	2019	UNTR	111,713,375,000,000
261	2020	AKPI	2,644,267,716,000
262	2020	ALKA	418,630,902,000
263	2020	ANTM	31,729,512,995,000
264	2020	DPNS	317,310,718,779
265	2020	EKAD	1,081,979,820,386
266	2020	FASW	11,513,044,288,721
267	2020	IGAR	665,863,417,235
268	2020	INAI	1,395,969,637,457
269	2020	INCI	444,865,800,672
270	2020	INTP	27,344,672,000,000
271	2020	ISSP	6,076,604,000,000
272	2020	KDSI	1,245,707,236,962
273	2020	LTLS	5,524,302,000,000
274	2020	SMBR	5,737,175,560,000
275	2020	SMGR	78,006,244,000,000
276	2020	SPMA	2,316,065,006,133
277	2020	SRSN	906,846,895,000
278	2020	TALF	1,474,472,516,166

279	2020	TRST	4,223,302,387,771
280	2020	WTON	8,509,017,299,594
281	2020	AALI	27,781,231,000,000
282	2020	ADES	958,791,000,000
283	2020	AMRT	25,970,743,000,000
284	2020	BISI	2,914,979,000,000
285	2020	BUDI	2,963,007,000,000
286	2020	CEKA	1,566,673,828,068
287	2020	CINT	498,020,612,974
288	2020	CPIN	31,159,291,000,000
289	2020	DSNG	14,151,383,000,000
290	2020	DVLA	1,986,711,872,000
291	2020	EPMT	9,211,731,059,218
292	2020	GGRM	78,191,409,000,000
293	2020	HMSP	49,674,030,000,000
294	2020	ICBP	103,588,325,000,000
295	2020	INDF	163,136,516,000,000
296	2020	JPFA	25,951,760,000,000
297	2020	KLBF	22,564,300,317,374
298	2020	LSIP	10,922,788,000,000
299	2020	MERK	929,901,046,000
300	2020	MIDI	5,923,693,000,000
301	2020	MLBI	2,907,425,000,000
302	2020	MYOR	19,777,500,514,550
303	2020	ROTI	4,452,166,671,985
304	2020	SIDO	3,849,516,000,000
305	2020	SIPD	2,592,850,000,000
306	2020	SKBM	1,768,660,546,754
307	2020	SMAR	35,026,171,000,000
308	2020	SSMS	12,775,930,059,000
309	2020	STTP	3,448,995,059,882
310	2020	TGKA	3,361,956,197,960
311	2020	TSPC	9,104,657,533,366
312	2020	ULTJ	8,754,116,000,000
313	2020	UNVR	20,534,632,000,000
314	2020	WIIM	1,614,442,007,528
315	2020	APII	512,220,639,129

316	2020	ARNA	1,970,340,289,520
317	2020	ASGR	2,288,831,000,000
318	2020	ASII	338,203,000,000,000
319	2020	BHIT	59,484,422,000,000
320	2020	ICON	370,846,674,317
321	2020	JECC	1,513,949,141,000
322	2020	JTPE	1,038,097,010,616
323	2020	MFMI	341,169,168,581
324	2020	SCCO	3,743,659,818,718
325	2020	UNTR	99,800,963,000,000

3.6 Data Profitabilitas akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	LABA BERSIH SETELAH PAJAK	TOTAL ASET
1	2016	AKPI	52,393,857,000	2,615,909,190,000
2	2016	ALKA	516,167,000	136,618,855
3	2016	ANTM	64,806,188,000	29,981,535,812,000
4	2016	DPNS	10,009,391,103	296,129,565,784
5	2016	EKAD	90,685,821,530,000,000	702,508,630,708
6	2016	FASW	1,405,367,771,073	10,965,118,708,784
7	2016	IGAR	69,305,629,795	439,465,673,296
8	2016	INAI	35,552,975,244	1,339,032,413,455
9	2016	INCI	9,988,836,259	269,351,381,344
10	2016	INTP	3,870,319,000,000	30,150,580,000,000
11	2016	ISSP	102,925,000	6,041,811,000
12	2016	KDSI	47,127,349,067	1,142,273,020,550
13	2016	LTLS	115,337,000,000	5,658,360,000,000
14	2016	SMBR	259,090,525,000	4,368,876,996,000
15	2016	SMGR	4,535,036,823,000	44,226,895,982,000
16	2016	SPMA	81,063,430,679,000	2,158,852,415,950
17	2016	SRSN	11,056,051,000	717,149,704,000
18	2016	TALF	30,137,707,324	881,673,021,959
19	2016	TRST	33,794,866,940	3,290,596,224,286
20	2016	WTON	1,147,144,922,000	31,096,539,490,000
21	2016	AALI	2,114,299,000,000	24,226,122,000,000
22	2016	ADES	55,951,000,000	767,479,000,000

23	2016	AMRT	55,383,500,000	19,474,367,000,000
24	2016	BISI	3,362,200,000	2,416,177,000,000
25	2016	BUDI	38,624,000,000	2,931,807,000,000
26	2016	CEKA	249,697,013,626	1,425,964,152,418
27	2016	CINT	20,619,309,858	399,336,626,636
28	2016	CPIN	2,225,402,000,000	24,204,994,000,000
29	2016	DSNG	252,040,000,000	8,183,318,000,000
30	2016	DVLA	152,083,400,000	1,531,365,558,000
31	2016	EPMT	556,120,695,676	7,087,269,812,003
32	2016	GGRM	6,672,682,000,000	62,951,634,000,000
33	2016	HMSP	12,762,229,000,000	42,508,277,000,000
34	2016	ICBP	3,631,301,000,000	28,901,948,000,000
35	2016	INDF	5,266,906,000,000	82,174,515,000,000
36	2016	JPFA	2,171,608,000,000	19,251,026,000,000
37	2016	KLBF	2,350,884,933,551	15,226,009,210,657
38	2016	LSIP	69,549,000,000	10,922,788,000,000
39	2016	MERK	153,842,847,000	743,934,894,000
40	2016	MIDI	196,043,000,000	4,261,283,000,000
41	2016	MLBI	982,129,000,000	2,275,038,000,000
42	2016	MYOR	1,388,676,127,665	12,922,421,859,142
43	2016	ROTI	279,777,368,831	2,919,640,858,718
44	2016	SIDO	480,525,000,000	2,987,614,000,000
45	2016	SIPD	13,048,780,927	2,567,211,193,259
46	2016	SKBM	22,545,456,050	1,001,657,012,004
47	2016	SMAR	2,599,539,000,000	26,141,410,000,000
48	2016	SSMS	591,658,772,000	7,162,970,110,000
49	2016	STTP	174,176,717,866	2,336,411,494,941
50	2016	TGKA	211,153,019,175	2,686,030,338,104
51	2016	TSPC	545,493,536,262	6,585,807,349,438
52	2016	ULTJ	709,825,635,742	4,239,199,641,365
53	2016	UNVR	6,390,672,000,000	16,745,695,000,000
54	2016	WIIM	106,290,306,868	1,353,634,132,275
55	2016	APII	15,871,882,915	407,985,799,015
56	2016	ARNA	91,375,910,975	1,543,216,299,146
57	2016	ASGR	255,113,000,000	1,723,468,000,000
58	2016	ASII	18,302,000,000,000	261,855,000,000,000
59	2016	BHIT	847,943,000,000	55,292,949,000,000

60	2016	ICON	4,360,175,368	468,521,879,542
61	2016	JECC	125,823,130,775	2,276,031,922,082
62	2016	JTPE	79,580,165,369	1,052,131,760,706
63	2016	MFMI	20,907,078,837	215,487,521,382
64	2016	SCCO	340,593,630,534	2,449,935,491,586
65	2016	UNTR	5,104,477,000,000	63,991,229,000,000
66	2017	AKPI	13,333,970,000	2,745,325,833,000
67	2017	ALKA	15,406,256,000	305,208,703,000
68	2017	ANTM	136,503,269,000	30,014,273,452
69	2017	DPNS	5,963,420,071	308,491,173,960
70	2017	EKAD	76,195,665,729	796,767,646,172
71	2017	FASW	595,868,198,714	9,369,891,776,775
72	2017	IGAR	72,376,683,136	513,022,591,574
73	2017	INAI	38,651,704,520	1,213,916,545,120
74	2017	INCI	16,554,272,131	303,788,390,330
75	2017	INTP	1,859,818,000,000	28,863,676,000,000
76	2017	ISSP	8,634,000,000	6,269,365,000,000
77	2017	KDSI	68,965,208,549	1,328,291,727,616
78	2017	LTLS	183,621,000,000	5,769,332,000,000
79	2017	SMBR	2,043,025,914,000	5,060,337,247,000
80	2017	SMGR	2,043,025,914,000	48,963,502,966,000
81	2017	SPMA	92,280,117,234	2,175,660,855,114
82	2017	SRSN	17,698,567,000	652,726,454,000
83	2017	TALF	21,465,836,784	921,240,988,517
84	2017	TRST	38,199,681,742	3,332,905,936,010
85	2017	WTON	340,458,859,391	7,057,976,095,043
86	2017	AALI	2,113,629,000,000	24,935,426,000,000
87	2017	ADES	38,242,000,000	840,236,000,000
88	2017	AMRT	257,735,000,000	21,901,740,000,000
89	2017	BISI	257,735,000,000	21,901,740,000,000
90	2017	BUDI	45,619,000,000	2,939,456,000,000
91	2017	CEKA	107,420,886,839	1,392,636,444,501
92	2017	CINT	29,648,261,092	476,577,841,605
93	2017	CPIN	257,735,000,000	24,522,593,000,000
94	2017	DSNG	587,988,000,000	8,336,065,000,000
95	2017	DVLA	162,249,293,000	1,640,886,147,000

96	2017	EPMT	517,836,170,615	7,425,800,257,838
97	2017	GGRM	7,755,347,000,000	66,759,930,000,000
98	2017	HMSP	12,670,534,000,000	43,141,063,000,000
99	2017	ICBP	3,543,173,000,000	31,619,514,000,000
100	2017	INDF	5,145,063,000,000	87,939,488,000,000
101	2017	JPFA	1,107,810,000,000	21,088,870,000,000
102	2017	KLBF	2,453,251,410,604	16,616,239,416,335
103	2017	LSIP	1,107,810,000,000	21,088,870,000,000
104	2017	MERK	144,677,294,000	847,006,544,000
105	2017	MIDI	102,812,000,000	4,878,115,000,000
106	2017	MLBI	1,322,067,000,000	2,510,078,000,000
107	2017	MYOR	1,630,953,830,893	14,915,849,800,251
108	2017	ROTI	135,364,021,139	4,559,573,709,411
109	2017	SIDO	533,799,000,000	3,158,198,000,000
110	2017	SIPD	354,925,000,000	2,239,699,000,000
111	2017	SKBM	25,880,464,791	1,623,027,475,045
112	2017	SMAR	1,177,371,000,000	27,124,101,000,000
113	2017	SSMS	790,922,772,000	9,623,672,614,000
114	2017	STTP	216,024,079,834	2,342,432,443,196
115	2017	TGKA	254,951,562,937	2,924,962,977,878
116	2017	TSPC	557,339,581,996	7,434,900,309,021
117	2017	ULTJ	711,681,000,000	5,186,940,000,000
118	2017	UNVR	7,004,562,000,000	18,906,413,000,000
119	2017	WIIM	40,589,790,851	1,225,712,093,041
120	2017	APII	13,921,992,681	423,181,306,980
121	2017	ARNA	122,183,909,643	1,601,346,561,573
122	2017	ASGR	257,225,000,000	24,118,720,000,000
123	2017	ASII	23,165,000,000,000	295,646,000,000,000
124	2017	BHIT	524,708,000,000	5,652,381,100,000
125	2017	ICON	15,161,894,772	417,620,774,123
126	2017	JECC	91,303,491,940	1,927,985,352,000
127	2017	JTPE	81,951,350,420	1,015,271,044,216
128	2017	MFMI	23,129,521,063	244,722,928,696
129	2017	SCCO	269,730,298,809	4,014,244,589,706
130	2017	UNTR	7,673,322,000,000	82,262,093,000,000
131	2018	AKPI	64,226,271,000	3,070,410,492,000
132	2018	ALKA	22,943,498,000	648,968,295,000

133	2018	ANTM	874,426,593,000	33,306,390,807,000
134	2018	DPNS	9,380,137,352	322,185,012,261
135	2018	EKAD	74,045,187,763	853,267,454,400
136	2018	FASW	1,405,367,771,073	10,965,118,708,784
137	2018	IGAR	44,672,438,405	570,197,810,698
138	2018	INAI	40,463,141,352	1,400,683,598,096
139	2018	INCI	16,675,673,703	391,362,697,956
140	2018	INTP	1,145,937,000,000	27,788,562,000,000
141	2018	ISSP	48,741,000,000	6,494,070,000,000
142	2018	KDSI	76,761,902,211	1,391,416,464,512
143	2018	LTLS	233,141,000,000	6,318,441,000,000
144	2018	SMBR	247,502,029,000	5,538,079,503,000
145	2018	SMGR	3,085,704,236,000	51,155,890,227,000
146	2018	SPMA	82,232,722,269	2,282,845,632,924
147	2018	SRSN	38,735,092,000	686,777,211,000
148	2018	TALF	43,976,734,000	984,597,771,989
149	2018	TRST	63,193,899,099	4,284,901,587,126
150	2018	WTON	486,640,174,453	8,881,778,299,672
151	2018	AALI	1,520,723,000,000	26,856,967,000,000
152	2018	ADES	52,958,000,000	881,275,000,000
153	2018	AMRT	668,426,000,000	22,165,968,000,000
154	2018	BISI	40,387,000,000	2,765,010,000,000
155	2018	BUDI	50,467,000,000	3,392,980,000,000
156	2018	CEKA	92,649,656,775	1,168,956,042,706
157	2018	CINT	13,554,152,161	491,382,035,136
158	2018	CPIN	4,551,485,000,000	27,645,118,000,000
159	2018	DSNG	427,245,000,000	11,738,892,000,000
160	2018	DVLA	200,651,968,000	1,682,821,739,000
161	2018	EPMT	653,250,886,056	8,322,960,974,230
162	2018	GGRM	7,793,068,000,000	69,097,219,000,000
163	2018	HMSP	13,538,418,000,000	46,602,420,000,000
164	2018	ICBP	4,658,781,000,000	34,367,153,000,000
165	2018	INDF	4,961,851,000,000	96,537,796,000,000
166	2018	JPFA	2,253,201,000,000	23,038,028,000,000
167	2018	KLBF	2,497,261,964,757	18,146,206,145,369
168	2018	LSIP	329,426,000,000	10,037,294,000,000
169	2018	MERK	1,163,324,165,000	1,263,113,689,000

170	2018	MIDI	159,154,000,000	4,960,145,000,000
171	2018	MLBI	1,224,807,000,000	2,889,501,000,000
172	2018	MYOR	1,760,434,280,304	17,591,706,426,634
173	2018	ROTI	127,171,436,363	4,393,810,380,883
174	2018	SIDO	663,849,000,000	3,337,628,000,000
175	2018	SIPD	79,776,000,000	2,470,793,000,000
176	2018	SKBM	15,954,632,472	1,771,365,972,009
177	2018	SMAR	597,773,000,000	29,310,310,000,000
178	2018	SSMS	86,770,969,000	11,296,112,298,000
179	2018	STTP	255,088,886,019	2,631,189,810,030
180	2018	TGKA	318,607,055,495	3,485,510,411,961
181	2018	TSPC	540,378,145,887	7,869,975,060,326
182	2018	ULTJ	701,607,000,000	5,555,871,000,000
183	2018	UNVR	9,109,445,000,000	19,522,970,000,000
184	2018	WIIM	51,142,850,919	1,255,573,914,558
185	2018	APII	30,402,061,201	450,303,354,800
186	2018	ARNA	158,207,798,602	1,652,905,985,730
187	2018	ASGR	270,404,000,000	2,271,344,000,000
188	2018	ASII	27,372,000,000,000	344,711,000,000,000
189	2018	BHIT	945,195,000,000	56,421,973,000,000
190	2018	ICON	30,836,082,689	395,969,370,635
191	2018	JECC	105,523,929,164	2,081,620,993,000
192	2018	JTPE	120,550,064,804	1,087,169,297,635
193	2018	MFMI	26,510,126,801	273,775,760,725
194	2018	SCCO	253,995,332,656	4,165,196,478,857
195	2018	UNTR	11,498,409,000,000	116,281,017,000,000
196	2019	AKPI	54,355,268,000	2,776,775,756,000
197	2019	ALKA	7,354,721,000	604,824,614,000
198	2019	ANTM	193,852,031,000	30,194,907,730,000
199	2019	DPNS	3,937,685,121	318,141,387,900
200	2019	EKAD	77,402,572,552	968,234,349,565,000,000
201	2019	FASW	968,833,390,696	10,751,992,944,302
202	2019	IGAR	60,836,752,751	617,594,780,669
203	2019	INAI	33,558,115,185	1,212,894,403,676
204	2019	INCI	13,811,736,623	405,445,049,452
205	2019	INTP	1,835,305,000,000	27,707,749,000,000

206	2019	ISSP	185,694,000,000	6,424,507,000,000
207	2019	KDSI	64,090,904	1,253,650,408,375
208	2019	LTLS	225,747,000,000	5,863,204,000,000
209	2019	SMBR	30,073,855,000	5,571,270,204,000
210	2019	SMGR	2,371,233,000,000	79,807,067,000,000
211	2019	SPMA	131,005,670,940	2,372,130,750,775
212	2019	SRSN	42,829,128,000	779,246,858,000
213	2019	TALF	27,456,246,966	1,329,083,050,439
214	2019	TRST	38,911,968,283	4,349,022,887,699
215	2019	WTON	510,711,733,403	10,337,895,087,207
216	2019	AALI	243,629,000,000	26,974,124,000,000
217	2019	ADES	83,855,000,000	822,375,000,000
218	2019	AMRT	1,138,888,000,000	23,992,313,000,000
219	2019	BISI	1,138,888,000,000	23,992,313,000,000
220	2019	BUDI	64,021,000,000	2,999,767,000,000
221	2019	CEKA	215,459,200,242	1,393,079,542,074
222	2019	CINT	7,221,065,916	521,493,784,876
223	2019	CPIN	3,632,174,000,000	29,353,041,000,000
224	2019	DSNG	178,164,000,000	11,620,821,000,000
225	2019	DVLA	221,783,249,000	1,829,960,714,000
226	2019	EPMT	580,814,677,453	8,704,958,834,283
227	2019	GGRM	10,880,704,000,000	78,647,274,000,000
228	2019	HMSP	13,721,513,000,000	50,902,806,000,000
229	2019	ICBP	5,360,029,000,000	38,709,314,000,000
230	2019	INDF	5,902,729,000,000	96,198,559,000,000
231	2019	JPFA	1,883,857,000,000	25,185,009,000,000
232	2019	KLBF	2,537,601,823,645	20,264,726,862,584
233	2019	LSIP	25,263,000,000	10,225,322,000,000
234	2019	MERK	78,256,797,000	901,060,986,000
235	2019	MIDI	20,307,000,000	4,990,309,000,000
236	2019	MLBI	1,206,059,000,000	2,896,950,000,000
237	2019	MYOR	2,039,404,206,764	19,037,918,806,473
238	2019	ROTI	236,518,557,420	4,682,083,844,951
239	2019	SIDO	807,689,000,000	3,536,898,000,000
240	2019	SIPD	79,776,000,000	2,470,793,000,000
241	2019	SKBM	957,169,058	1,820,383,352,811
242	2019	SMAR	898,698,000,000	27,787,527,000,000

243	2019	SSMS	12,081,959,000	11,845,204,657,000,000
244	2019	STTP	482,590,522,840	2,881,563,083,954
245	2019	TGKA	428,418,484,105	2,995,872,438,975
246	2019	TSPC	595,154,912,874	8,372,769,580,743
247	2019	ULTJ	1,035,865,000,000	6,608,422,000,000
248	2019	UNVR	7,392,837,000,000	20,649,371,000,000
249	2019	WIIM	27,328,091,481	1,299,521,608,556
250	2019	APII	25,744,441,617	490,860,655,716
251	2019	ARNA	217,675,239,509	1,799,137,069,343
252	2019	ASGR	250,992,000,000	2,896,840,000,000
253	2019	ASII	26,621,000,000,000	351,958,000,000,000
254	2019	BHIT	2,087,823,000,000	57,613,499,000,000
255	2019	ICON	36,305,549,142	369,071,617,773
256	2019	JECC	93,145,200,039	1,888,753,850,000
257	2019	JTPE	182,442,649,410	1,152,696,526,641
258	2019	MFMI	133,446,664,847	421,902,495,547
259	2019	SCCO	303,593,922,331	4,400,655,628,146
260	2019	UNTR	11,134,641,000,000	111,713,375,000,000
261	2020	AKPI	66,005,547,000	2,644,267,716,000
262	2020	ALKA	6,684,414,000	418,630,902,000
263	2020	ANTM	1,149,353,693,000	31,729,512,995,000
264	2020	DPNS	2,400,715,154	317,310,718,779
265	2020	EKAD	95,929,070,814	1,081,979,820,386
266	2020	FASW	353,299,343,980	11,513,044,288,721
267	2020	IGAR	60,770,710,445	665,863,417,235
268	2020	INAI	3,991,581,552	1,395,969,637,457
269	2020	INCI	30,071,380,873	444,865,800,672
270	2020	INTP	1,806,337,000,000	27,344,672,000,000
271	2020	ISSP	175,835,000,000	6,076,604,000,000
272	2020	KDSI	60,178,290,460	1,245,707,236,962
273	2020	LTLS	118,196,000,000	5,524,302,000,000
274	2020	SMBR	10,981,673,000	5,737,175,560,000
275	2020	SMGR	2,674,343,000,000	78,006,244,000,000
276	2020	SPMA	162,524,650,713	2,316,065,006,133
277	2020	SRSN	44,152,245,000	906,846,895,000
278	2020	TALF	18,488,700,221	1,474,472,516,166

279	2020	TRST	73,277,742,422	4,223,302,387,771
280	2020	WTON	123,147,079,420	8,509,017,299,594
281	2020	AALI	893,779,000,000	27,781,231,000,000
282	2020	ADES	135,789,000,000	958,791,000,000
283	2020	AMRT	1,088,477,000,000	25,970,743,000,000
284	2020	BISI	275,667,000,000	2,914,979,000,000
285	2020	BUDI	67,093,000,000	2,963,007,000,000
286	2020	CEKA	181,812,593,992	1,566,673,828,068
287	2020	CINT	249,076,655	498,020,612,974
288	2020	CPIN	3,845,833,000,000	31,159,291,000,000
289	2020	DSNG	478,171,000,000	14,151,383,000,000
290	2020	DVLA	162,072,984,000	1,986,711,872,000
291	2020	EPMT	679,870,547,997	9,211,731,059,218
292	2020	GGRM	7,647,729,000,000	78,191,409,000,000
293	2020	HMSP	8,581,378,000,000	49,674,030,000,000
294	2020	ICBP	7,418,574,000,000	103,588,325,000,000
295	2020	INDF	8,752,066,000,000	163,136,516,000,000
296	2020	JPFA	1,221,904,000,000	25,951,760,000,000
297	2020	KLBF	2,799,622,515,814	22,564,300,317,374
298	2020	LSIP	69,549,000,000	10,922,788,000,000
299	2020	MERK	71,902,263,000	929,901,046,000
300	2020	MIDI	200,273,000,000	5,923,693,000,000
301	2020	MLBI	285,617,000,000	2,907,425,000,000
302	2020	MYOR	2,098,168,514,645	19,777,500,514,550
303	2020	ROTI	145,493,328,513	4,452,166,671,985
304	2020	SIDO	934,016,000,000	3,849,516,000,000
305	2020	SIPD	28,266,000,000	2,592,850,000,000
306	2020	SKBM	5,415,741,808	1,768,660,546,754
307	2020	SMAR	1,539,798,000,000	35,026,171,000,000
308	2020	SSMS	580,854,940,000	12,775,930,059,000
309	2020	STTP	628,628,879,549	3,448,995,059,882
310	2020	TGKA	478,561,152,411	3,361,956,197,960
311	2020	TSPC	834,369,751,682	9,104,657,533,366
312	2020	ULTJ	1,109,666,000,000	8,754,116,000,000
313	2020	UNVR	7,163,536,000,000	20,534,632,000,000
314	2020	WIIM	172,506,562,986	1,614,442,007,528
315	2020	APII	30,152,459,780	512,220,639,129

316	2020	ARNA	326,241,511,507	1,970,340,289,520
317	2020	ASGR	47,783,000,000	2,288,831,000,000
318	2020	ASII	18,571,000,000,000	338,203,000,000,000
319	2020	BHIT	1,525,889,000,000	59,484,422,000,000
320	2020	ICON	5,702,852,677	370,846,674,317
321	2020	JECC	115,805,324,362	1,513,949,141,000
322	2020	JTPE	74,172,914,384	1,038,097,010,616
323	2020	MFMI	18,175,143,820	341,169,168,581
324	2020	SCCO	238,152,486,485	3,743,659,818,718
325	2020	UNTR	5,632,425,000,000	99,800,963,000,000

3.7 Data Leverage akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	TOTAL HUTANG	TOTAL ASET
1	2016	AKPI	1,495,874,021,000	2,615,909,190,000
2	2016	ALKA	12,042,325,000	136,618,855
3	2016	ANTM	11,572,740,239,000	29,981,535,812,000
4	2016	DPNS	32,865,162,199	296,129,565,784
5	2016	EKAD	110,503,822,983	702,508,630,708
6	2016	FASW	6,676,781,411,219	10,965,118,708,784
7	2016	IGAR	65,716,637,766	439,465,673,296
8	2016	INAI	1,081,015,810,782	1,339,032,413,455
9	2016	INCI	26,524,918,593	269,351,381,344
10	2016	INTP	4,011,877,000,000	30,150,580,000,000
11	2016	ISSP	3,396,754,000	6,041,811,000
12	2016	KDSI	722,488,734,446	1,142,273,020,550
13	2016	LTLS	3,979,344,000,000	5,658,360,000,000
14	2016	SMBR	1,248,119,294,000	4,368,876,996,000
15	2016	SMGR	13,652,504,525,000	44,226,895,982,000
16	2016	SPMA	1,047,296,887,831	2,158,852,415,950
17	2016	SRSN	315,096,071,000	717,149,704,000
18	2016	TALF	129,777,537,129	881,673,021,959
19	2016	TRST	1,358,241,040,272	3,290,596,224,286
20	2016	WTON	18,597,824,186,000	31,096,539,490,000
21	2016	AALI	6,632,640,000,000	24,226,122,000,000
22	2016	ADES	187,625,000,000	767,479,000,000

23	2016	AMRT	14,179,604,000,000	19,474,367,000,000
24	2016	BISI	352,652,000,000	2,416,177,000,000
25	2016	BUDI	1,766,825,000,000	2,931,807,000,000
26	2016	CEKA	538,044,038,690	1,425,964,152,418
27	2016	CINT	72,906,787,680	399,336,626,636
28	2016	CPIN	10,047,751,000,000	24,204,994,000,000
29	2016	DSNG	5,478,977,000,000	8,183,318,000,000
30	2016	DVLA	451,785,946,000	1,531,365,558,000
31	2016	EPMT	2,467,288,584,337	7,087,269,812,003
32	2016	GGRM	23,387,406,000,000	62,951,634,000,000
33	2016	HMSF	8,333,263,000,000	42,508,277,000,000
34	2016	ICBP	10,401,125,000,000	28,901,948,000,000
35	2016	INDF	38,233,092,000,000	82,174,515,000,000
36	2016	JPFA	9,878,062,000,000	19,251,026,000,000
37	2016	KLBF	2,762,162,069,572	15,226,009,210,657
38	2016	LSIP	1,636,456,000,000	10,922,788,000,000
39	2016	MERK	161,262,425,000	743,934,894,000
40	2016	MIDI	3,366,178,000,000	4,261,283,000,000
41	2016	MLBI	1,454,398,000,000	2,275,038,000,000
42	2016	MYOR	6,657,165,872,077	12,922,421,859,142
43	2016	ROTI	1,476,889,086,692	2,919,640,858,718
44	2016	SIDO	229,729,000,000	2,987,614,000,000
45	2016	SIPD	1,424,380,421,256	2,567,211,193,259
46	2016	SKBM	633,267,725,358	1,001,657,012,004
47	2016	SMAR	15,941,975,000,000	26,141,410,000,000
48	2016	SSMS	3,709,172,838,000	7,162,970,110,000
49	2016	STTP	1,167,899,357,271	2,336,411,494,941
50	2016	TGKA	1,742,099,821,453	2,686,030,338,104
51	2016	TSPC	1,950,534,206,746	6,585,807,349,438
52	2016	ULTJ	749,966,146,582	4,239,199,641,365
53	2016	UNVR	12,041,437,000,000	16,745,695,000,000
54	2016	WIIM	362,540,740,471	1,353,634,132,275
55	2016	APII	168,731,948,348	407,985,799,015
56	2016	ARNA	595,128,097,887	1,543,216,299,146
57	2016	ASGR	557,158,000,000	1,723,468,000,000
58	2016	ASII	121,949,000,000,000	261,855,000,000,000
59	2016	BHIT	31,129,457,000,000	55,292,949,000,000

60	2016	ICON	309,737,600,921	468,521,879,542
61	2016	JECC	1,050,386,739,011	2,276,031,922,082
62	2016	JTPE	498,485,506,764	1,052,131,760,706
63	2016	MFMI	34,042,824,236	215,487,521,382
64	2016	SCCO	1,229,514,818,362	2,449,935,491,586
65	2016	UNTR	21,369,286,000,000	63,991,229,000,000
66	2017	AKPI	1,618,713,342,000	2,745,325,833,000
67	2017	ALKA	13,202,255,000	305,208,703,000
68	2017	ANTM	11,523,869,935,000	30,014,273,452
69	2017	DPNS	40,655,786,593	308,491,173,960
70	2017	EKAD	133,949,920,707	796,767,646,172
71	2017	FASW	6,081,574,204,386	9,369,891,776,775
72	2017	IGAR	71,075,842,431	513,022,591,574
73	2017	INAI	936,511,874,370	1,213,916,545,120
74	2017	INCI	35,408,565,186	303,788,390,330
75	2017	INTP	4,307,169,000,000	28,863,676,000,000
76	2017	ISSP	3,428,424,000,000	6,269,365,000,000
77	2017	KDSI	842,752,226,515	1,328,291,727,616
78	2017	LTLS	3,898,250,000,000	5,769,332,000,000
79	2017	SMBR	1,647,477,388,000	5,060,337,247,000
80	2017	SMGR	18,524,450,664,000	48,963,502,966,000
81	2017	SPMA	980,123,282,608	2,175,660,855,114
82	2017	SRSN	237,220,555,000	652,726,454,000
83	2017	TALF	155,076,156,734	921,240,988,517
84	2017	TRST	1,357,336,438,524	3,332,905,936,010
85	2017	WTON	4,320,040,750,958	7,057,976,095,043
86	2017	AALI	6,398,988,000,000	24,935,426,000,000
87	2017	ADES	172,337,000,000	840,236,000,000
88	2017	AMRT	16,651,570,000,000	21,901,740,000,000
89	2017	BISI	16,651,570,000,000	21,901,740,000,000
90	2017	BUDI	1,744,756,000,000	2,939,456,000,000
91	2017	CEKA	489,592,257,434	1,392,636,444,501
92	2017	CINT	94,304,081,659	476,577,841,605
93	2017	CPIN	16,651,570,000,000	24,522,593,000,000
94	2017	DSNG	5,086,326,000,000	8,336,065,000,000
95	2017	DVLA	524,586,078,000	1,640,886,147,000

96	2017	EPMT	2,295,030,839,866	7,425,800,257,838
97	2017	GGRM	24,572,266,000,000	66,759,930,000,000
98	2017	HMSP	9,028,078,000,000	43,141,063,000,000
99	2017	ICBP	11,295,184,000,000	31,619,514,000,000
100	2017	INDF	41,182,764,000,000	87,939,488,000,000
101	2017	JPFA	11,293,242,000,000	21,088,870,000,000
102	2017	KLBF	2,722,207,633,646	16,616,239,416,335
103	2017	LSIP	11,293,242,000,000	21,088,870,000,000
104	2017	MERK	231,569,103	847,006,544,000
105	2017	MIDI	3,955,245,000,000	4,878,115,000,000
106	2017	MLBI	1,445,173,000,000	2,510,078,000,000
107	2017	MYOR	7,561,503,434,179	14,915,849,800,251
108	2017	ROTI	1,739,467,993,982	4,559,573,709,411
109	2017	SIDO	262,333,000,000	3,158,198,000,000
110	2017	SIPD	144,838,700,000	2,239,699,000,000
111	2017	SKBM	599,790,014,646	1,623,027,475,045
112	2017	SMAR	15,824,122,000,000	27,124,101,000,000
113	2017	SSMS	5,570,625,174,000	9,623,672,614,000
114	2017	STTP	957,660,374,836	2,342,432,443,196
115	2017	TGKA	1,847,345,054,940	2,924,962,977,878
116	2017	TSPC	2,352,891,899,876	7,434,900,309,021
117	2017	ULTJ	978,185,000,000	5,186,940,000,000
118	2017	UNVR	13,733,025,000,000	18,906,413,000,000
119	2017	WIIM	247,620,731,930	1,225,712,093,041
120	2017	APII	175,788,682,046	423,181,306,980
121	2017	ARNA	571,946,769,034	1,601,346,561,573
122	2017	ASGR	1,090,688,000,000	24,118,720,000,000
123	2017	ASII	139,317,000,000,000	295,646,000,000,000
124	2017	BHIT	32,437,621,000,000	5,652,381,100,000
125	2017	ICON	244,118,030,782	417,620,774,123
126	2017	JECC	1,005,656,523,820	1,927,985,352,000
127	2017	JTPE	428,890,913,231	1,015,271,044,216
128	2017	MFMI	44,123,245,577	244,722,928,696
129	2017	SCCO	1,286,017,105,712	4,014,244,589,706
130	2017	UNTR	34,724,168,000,000	82,262,093,000,000
131	2018	AKPI	1,836,576,739,000	3,070,410,492,000
132	2018	ALKA	548,236,812,000	648,968,295,000

133	2018	ANTM	13,567,160,084,000	33,306,390,807,000
134	2018	DPNS	44,476,413,260	322,185,012,261
135	2018	EKAD	128,684,953,153	853,267,454,400
136	2018	FASW	6,676,781,411,219	10,965,118,708,784
137	2018	IGAR	87,283,567,361	570,197,810,698
138	2018	INAI	1,096,799,666,849	1,400,683,598,096
139	2018	INCI	71,410,278,158	391,362,697,956
140	2018	INTP	4,566,973,000,000	27,788,562,000,000
141	2018	ISSP	3,578,654,000,000	6,494,070,000,000
142	2018	KDSI	836,245,435,111	1,391,416,464,512
143	2018	LTLS	4,193,399,000,000	6,318,441,000,000
144	2018	SMBR	2,064,408,447,000	5,538,079,503,000
145	2018	SMGR	18,419,594,705,000	51,155,890,227,000
146	2018	SPMA	1,013,266,115,558	2,282,845,632,924
147	2018	SRSN	208,989,195,000	686,777,211,000
148	2018	TALF	176,218,785,183	984,597,771,989
149	2018	TRST	2,047,516,971,004	4,284,901,587,126
150	2018	WTON	5,744,966,289,467	8,881,778,299,672
151	2018	AALI	7,382,445,000,000	26,856,967,000,000
152	2018	ADES	399,361,000,000	881,275,000,000
153	2018	AMRT	16,148,410,000,000	22,165,968,000,000
154	2018	BISI	45,508,000,000	2,765,010,000,000
155	2018	BUDI	216,649,600,000	3,392,980,000,000
156	2018	CEKA	192,308,466,864	1,168,956,042,706
157	2018	CINT	102,703,457,308	491,382,035,136
158	2018	CPIN	8,253,944,000,000	27,645,118,000,000
159	2018	DSNG	8,079,930,000,000	11,738,892,000,000
160	2018	DVLA	482,559,876,000	1,682,821,739,000
161	2018	EPMT	2,535,106,096,057	8,322,960,974,230
162	2018	GGRM	23,963,934,000,000	69,097,219,000,000
163	2018	HMSP	11,244,167,000,000	46,602,420,000,000
164	2018	ICBP	11,660,003,000,000	34,367,153,000,000
165	2018	INDF	46,620,996,000,000	96,537,796,000,000
166	2018	JPFA	12,823,219,000,000	23,038,028,000,000
167	2018	KLBF	2,851,611,349,015	18,146,206,145,369
168	2018	LSIP	1,705,175,000,000	10,037,294,000,000
169	2018	MERK	744,833,288,000	1,263,113,689,000

170	2018	MIDI	3,879,324,000,000	4,960,145,000,000
171	2018	MLBI	1,721,965,000,000	2,889,501,000,000
172	2018	MYOR	9,049,161,944,940	17,591,706,426,634
173	2018	ROTI	1,476,909,260,772	4,393,810,380,883
174	2018	SIDO	435,014,000,000	3,337,628,000,000
175	2018	SIPD	1,554,580,000,000	2,470,793,000,000
176	2018	SKBM	730,789,419,438	1,771,365,972,009
177	2018	SMAR	17,061,105,000,000	29,310,310,000,000
178	2018	SSMS	7,226,929,956,000	11,296,112,298,000
179	2018	STTP	984,801,863,078	2,631,189,810,030
180	2018	TGKA	2,237,657,909,077	3,485,510,411,961
181	2018	TSPC	2,437,126,989,832	7,869,975,060,326
182	2018	ULTJ	780,915,000,000	5,555,871,000,000
183	2018	UNVR	11,944,837,000,000	19,522,970,000,000
184	2018	WIIM	250,337,111,893	1,255,573,914,558
185	2018	APII	174,710,728,270	450,303,354,800
186	2018	ARNA	556,309,556,626	1,652,905,985,730
187	2018	ASGR	787,113,000,000	2,271,344,000,000
188	2018	ASII	170,348,000,000,000	344,711,000,000,000
189	2018	BHIT	31,925,209,000,000	56,421,973,000,000
190	2018	ICON	191,132,298,398	395,969,370,635
191	2018	JECC	997,975,486,781	2,081,620,993,000
192	2018	JTPE	439,743,355,312	1,087,169,297,635
193	2018	MFMI	51,446,784,465	273,775,760,725
194	2018	SCCO	1,254,447,340,790	4,165,196,478,857
195	2018	UNTR	59,230,338,000,000	116,281,017,000,000
196	2019	AKPI	1,531,819,965,000	2,776,775,756,000
197	2019	ALKA	500,032,251,000	604,824,614,000
198	2019	ANTM	12,061,488,555,000	30,194,907,730,000
199	2019	DPNS	36,039,752,024	318,141,387,900
200	2019	EKAD	115,690,798,743	968,234,349,565,000,000
201	2019	FASW	6,059,395,120,910	10,751,992,944,302
202	2019	IGAR	80,669,409,164	617,594,780,669
203	2019	INAI	893,625,998,063	1,212,894,403,676
204	2019	INCI	65,323,258,479	405,445,049,452
205	2019	INTP	4,627,488,000,000	27,707,749,000,000

206	2019	ISSP	3,325,841,000,000	6,424,507,000,000
207	2019	KDSI	645,444,999,358	1,253,650,408,375
208	2019	LTLS	3,703,024,000,000	5,863,204,000,000
209	2019	SMBR	2,088,977,112,000	5,571,270,204,000
210	2019	SMGR	43,915,143,000,000	79,807,067,000,000
211	2019	SPMA	994,592,156,971	2,372,130,750,775
212	2019	SRSN	264,646,295,000	779,246,858,000
213	2019	TALF	320,791,791,518	1,329,083,050,439
214	2019	TRST	2,174,561,951,424	4,349,022,887,699
215	2019	WTON	6,829,449,147,200	10,337,895,087,207
216	2019	AALI	799,559,700,000	26,974,124,000,000
217	2019	ADES	254,438,000,000	822,375,000,000
218	2019	AMRT	17,108,006,000,000	23,992,313,000,000
219	2019	BISI	17,108,006,000,000	23,992,313,000,000
220	2019	BUDI	1,714,449,000,000	2,999,767,000,000
221	2019	CEKA	261,784,845,240	1,393,079,542,074
222	2019	CINT	131,822,380,207	521,493,784,876
223	2019	CPIN	8,281,441,000,000	29,353,041,000,000
224	2019	DSNG	7,889,229,000,000	11,620,821,000,000
225	2019	DVLA	523,881,726,000	1,829,960,714,000
226	2019	EPMT	2,575,650,387,235	8,704,958,834,283
227	2019	GGRM	27,716,516,000,000	78,647,274,000,000
228	2019	HMSP	15,223,076,000,000	50,902,806,000,000
229	2019	ICBP	12,038,210,000,000	38,709,314,000,000
230	2019	INDF	41,996,071,000,000	96,198,559,000,000
231	2019	JPFA	13,736,841,000,000	25,185,009,000,000
232	2019	KLBF	3,559,144,386,553	20,264,726,862,584
233	2019	LSIP	1,726,822,000,000	10,225,322,000,000
234	2019	MERK	307,049,328,000	901,060,986,000
235	2019	MIDI	3,769,310,000,000	4,990,309,000,000
236	2019	MLBI	1,750,943,000,000	2,896,950,000,000
237	2019	MYOR	9,137,978,611,155	19,037,918,806,473
238	2019	ROTI	1,589,486,465,854	4,682,083,844,951
239	2019	SIDO	472,191,000,000	3,536,898,000,000
240	2019	SIPD	1,554,580,000,000	2,470,793,000,000
241	2019	SKBM	784,562,971,811	1,820,383,352,811
242	2019	SMAR	16,854,470,000,000	27,787,527,000,000

243	2019	SSMS	7,776,637,385,000	11,845,204,657,000,000
244	2019	STTP	733,556,075,974	2,881,563,083,954
245	2019	TGKA	1,603,873,392,263	2,995,872,438,975
246	2019	TSPC	2,581,733,610,850	8,372,769,580,743
247	2019	ULTJ	953,283,000,000	6,608,422,000,000
248	2019	UNVR	15,367,509,000,000	20,649,371,000,000
249	2019	WIIM	266,351,031,079	1,299,521,608,556
250	2019	APII	189,495,952,658	490,860,655,716
251	2019	ARNA	622,355,306,743	1,799,137,069,343
252	2019	ASGR	1,270,830,000,000	2,896,840,000,000
253	2019	ASII	165,195,000,000,000	351,958,000,000,000
254	2019	BHIT	28,781,322,000,000	57,613,499,000,000
255	2019	ICON	129,953,534,558	369,071,617,773
256	2019	JECC	1,092,845,023,431	1,888,753,850,000
257	2019	JTPE	406,866,280,932	1,152,696,526,641
258	2019	MFMI	184,958,018,380	421,902,495,547
259	2019	SCCO	1,259,634,682,555	4,400,655,628,146
260	2019	UNTR	50,603,301,000,000	111,713,375,000,000
261	2020	AKPI	1,330,380,957,000	2,644,267,716,000
262	2020	ALKA	313,427,196,000	418,630,902,000
263	2020	ANTM	12,690,063,970,000	31,729,512,995,000
264	2020	DPNS	32,487,055,094	317,310,718,779
265	2020	EKAD	129,617,262,724	1,081,979,820,386
266	2020	FASW	6,930,049,292,233	11,513,044,288,721
267	2020	IGAR	72,281,042,223	665,863,417,235
268	2020	INAI	1,074,565,554,861	1,395,969,637,457
269	2020	INCI	75,990,820,673	444,865,800,672
270	2020	INTP	5,168,424,000,000	27,344,672,000,000
271	2020	ISSP	2,741,264,000,000	6,076,604,000,000
272	2020	KDSI	582,239,031,320	1,245,707,236,962
273	2020	LTLS	3,281,180,000,000	5,524,302,000,000
274	2020	SMBR	2,329,286,953,000	5,737,175,560,000
275	2020	SMGR	40,571,674,000,000	78,006,244,000,000
276	2020	SPMA	784,672,948,574	2,316,065,006,133
277	2020	SRSN	318,959,497,000	906,846,895,000
278	2020	TALF	454,287,199,938	1,474,472,516,166

279	2020	TRST	1,956,491,953,490	4,223,302,387,771
280	2020	WTON	5,118,444,300,470	8,509,017,299,594
281	2020	AALI	8,533,437,000,000	27,781,231,000,000
282	2020	ADES	258,283,000,000	958,791,000,000
283	2020	AMRT	18,334,415,000,000	25,970,743,000,000
284	2020	BISI	456,592,000,000	2,914,979,000,000
285	2020	BUDI	1,640,851,000,000	2,963,007,000,000
286	2020	CEKA	305,958,833	1,566,673,828,068
287	2020	CINT	112,663,245,901	498,020,612,974
288	2020	CPIN	7,809,608,000,000	31,159,291,000,000
289	2020	DSNG	7,920,634,000,000	14,151,383,000,000
290	2020	DVLA	660,424,729,000	1,986,711,872,000
291	2020	EPMT	2,652,274,698,711	9,211,731,059,218
292	2020	GGRM	19,668,941,000,000	78,191,409,000,000
293	2020	HMSF	19,432,604,000,000	49,674,030,000,000
294	2020	ICBP	53,270,272,000,000	103,588,325,000,000
295	2020	INDF	83,998,472,000,000	163,136,516,000,000
296	2020	JPFA	14,539,790,000,000	25,951,760,000,000
297	2020	KLBF	4,288,218,173,294	22,564,300,317,374
298	2020	LSIP	1,636,456,000,000	10,922,788,000,000
299	2020	MERK	317,218,021,000	929,901,046,000
300	2020	MIDI	4,524,990,000,000	5,923,693,000,000
301	2020	MLBI	1,474,019,000,000	2,907,425,000,000
302	2020	MYOR	8,506,032,464,592	19,777,500,514,550
303	2020	ROTI	1,224,495,624,254	4,452,166,671,985
304	2020	SIDO	627,776,000,000	3,849,516,000,000
305	2020	SIPD	1,662,175,000,000	2,592,850,000,000
306	2020	SKBM	806,678,887,419	1,768,660,546,754
307	2020	SMAR	2,250,249,000,000	35,026,171,000,000
308	2020	SSMS	7,905,143,639,000	12,775,930,059,000
309	2020	STTP	775,696,860,738	3,448,995,059,882
310	2020	TGKA	1,763,283,969,693	3,361,956,197,960
311	2020	TSPC	2,727,421,825,611	9,104,657,533,366
312	2020	ULTJ	3,972,379,000,000	8,754,116,000,000
313	2020	UNVR	15,597,264,000,000	20,534,632,000,000
314	2020	WIIM	428,590,166,019	1,614,442,007,528
315	2020	APII	178,999,604,014	512,220,639,129

316	2020	ARNA	665,401,637,797	1,970,340,289,520
317	2020	ASGR	726,053,000,000	2,288,831,000,000
318	2020	ASII	142,749,000,000,000	338,203,000,000,000
319	2020	BHIT	28,070,486,000,000	59,484,422,000,000
320	2020	ICON	125,712,975,552	370,846,674,317
321	2020	JECC	1,231,192,233,990	1,513,949,141,000
322	2020	JTPE	267,681,176,266	1,038,097,010,616
323	2020	MFMI	227,028,634,994	341,169,168,581
324	2020	SCCO	469,705,217,664	3,743,659,818,718
325	2020	UNTR	36,653,823,000,000	99,800,963,000,000

3.8 Data Capital intensity akhir tahun 2016-2020

NO	TAHUN	KODE	ASET TETAP BERSIH	TOTAL ASET
1	2016	AKPI	1,622,384,162,000	2,615,909,190,000
2	2016	ALKA	24,056,278,000	136,618,855
3	2016	ANTM	12,958,946,013,000	29,981,535,812,000
4	2016	DPNS	11,927,709,719	296,129,565,784
5	2016	EKAD	354,771,515,162	702,508,630,708
6	2016	FASW	7,263,839,935,749	10,965,118,708,784
7	2016	IGAR	70,591,030,568	439,465,673,296
8	2016	INAI	240,067,780,723	1,339,032,413,455
9	2016	INCI	128,538,899,975	269,351,381,344
10	2016	INTP	14,643,695,000,000	30,150,580,000,000
11	2016	ISSP	1,984,343,000	6,041,811,000
12	2016	KDSI	387,738,747,365	1,142,273,020,550
13	2016	LTLS	1,844,071,000,000	5,658,360,000,000
14	2016	SMBR	3,480,075,405,000	4,368,876,996,000
15	2016	SMGR	30,846,750,207,000	44,226,895,982,000
16	2016	SPMA	1,430,164,650,247	2,158,852,415,950
17	2016	SRSN	220,066,270,000	717,149,704,000
18	2016	TALF	546,284,875,130	881,673,021,959
19	2016	TRST	2,025,462,701,661	3,290,596,224,286
20	2016	WTON	3,465,843,202,000	31,096,539,490,000
21	2016	AALI	10,027,968,000,000	24,226,122,000,000
22	2016	ADES	374,177,000,000	767,479,000,000

23	2016	AMRT	5,743,768,000,000	19,474,367,000,000
24	2016	BISI	318,022,000,000	2,416,177,000,000
25	2016	BUDI	1,771,780,000,000	2,931,807,000,000
26	2016	CEKA	215,976,492,549	1,425,964,152,418
27	2016	CINT	181,812,363,868	399,336,626,636
28	2016	CPIN	11,233,847,000,000	24,204,994,000,000
29	2016	DSNG	2,084,892,000,000	8,183,318,000,000
30	2016	DVLA	404,599,316,000	1,531,365,558,000
31	2016	EPMT	1,017,625,048,185	7,087,269,812,003
32	2016	GGRM	20,498,950,000,000	62,951,634,000,000
33	2016	HMSF	6,895,483,000,000	42,508,277,000,000
34	2016	ICBP	7,114,288,000,000	28,901,948,000,000
35	2016	INDF	25,701,913,000,000	82,174,515,000,000
36	2016	JPFA	7,512,091,000,000	19,251,026,000,000
37	2016	KLBF	4,555,756,101,580	15,226,009,210,657
38	2016	LSIP	6,313,300,000,000	10,922,788,000,000
39	2016	MERK	129,991,953,000	743,934,894,000
40	2016	MIDI	1,428,451,000,000	4,261,283,000,000
41	2016	MLBI	1,278,015,000,000	2,275,038,000,000
42	2016	MYOR	3,859,420,029,792	12,922,421,859,142
43	2016	ROTI	1,842,722,492,525	2,919,640,858,718
44	2016	SIDO	1,051,227,000,000	2,987,614,000,000
45	2016	SIPD	835,515,581,680	2,567,211,193,259
46	2016	SKBM	436,018,707,335	1,001,657,012,004
47	2016	SMAR	11,165,271,000,000	26,141,410,000,000
48	2016	SSMS	1,749,108,382,000	7,162,970,110,000
49	2016	STTP	1,133,722,474,056	2,336,411,494,941
50	2016	TGKA	116,907,028,886	2,686,030,338,104
51	2016	TSPC	1,806,744,212,273	6,585,807,349,438
52	2016	ULTJ	1,042,072,476,333	4,239,199,641,365
53	2016	UNVR	9,529,476,000,000	16,745,695,000,000
54	2016	WIIM	330,448,090,705	1,353,634,132,275
55	2016	APII	173,059,344,587	407,985,799,015
56	2016	ARNA	858,698,468,313	1,543,216,299,146
57	2016	ASGR	392,325,000,000	1,723,468,000,000
58	2016	ASII	43,237,000,000,000	261,855,000,000,000
59	2016	BHIT	15,924,923,000,000	55,292,949,000,000

60	2016	ICON	9,264,658,214	468,521,879,542
61	2016	JECC	699,965,839,974	2,276,031,922,082
62	2016	JTPE	462,474,609,333	1,052,131,760,706
63	2016	MFMI	175,066,865,093	215,487,521,382
64	2016	SCCO	322,517,672,904	2,449,935,491,586
65	2016	UNTR	12,072,399,000,000	63,991,229,000,000
66	2017	AKPI	1,588,222,494,000	2,745,325,833,000
67	2017	ALKA	22,603,493,000	305,208,703,000
68	2017	ANTM	14,092,994,799,000	30,014,273,452
69	2017	DPNS	11,011,716,195	308,491,173,960
70	2017	EKAD	364,850,961,596	796,767,646,172
71	2017	FASW	6,434,772,710,208	9,369,891,776,775
72	2017	IGAR	86,389,049,329	513,022,591,574
73	2017	INAI	226,998,517,718	1,213,916,545,120
74	2017	INCI	135,918,981,861	303,788,390,330
75	2017	INTP	14,979,453,000,000	28,863,676,000,000
76	2017	ISSP	2,199,589,000,000	6,269,365,000,000
77	2017	KDSI	440,422,767,236	1,328,291,727,616
78	2017	LTLS	1,952,808,000,000	5,769,332,000,000
79	2017	SMBR	3,844,488,329,000	5,060,337,247,000
80	2017	SMGR	32,523,309,598,000	48,963,502,966,000
81	2017	SPMA	1,393,421,919,181	2,175,660,855,114
82	2017	SRSN	211,756,440,000	652,726,454,000
83	2017	TALF	557,421,928,580	921,240,988,517
84	2017	TRST	1,992,196,958,293	3,332,905,936,010
85	2017	WTON	2,679,459,038,772	7,057,976,095,043
86	2017	AALI	10,152,225,000,000	24,935,426,000,000
87	2017	ADES	478,184,000,000	840,236,000,000
88	2017	AMRT	6,042,904,000,000	21,901,740,000,000
89	2017	BISI	6,042,904,000,000	21,901,740,000,000
90	2017	BUDI	1,863,833,000,000	2,939,456,000,000
91	2017	CEKA	212,312,805,803	1,392,636,444,501
92	2017	CINT	234,751,563,051	476,577,841,605
93	2017	CPIN	6,042,904,000,000	24,522,593,000,000
94	2017	DSNG	2,050,834,000,000	8,336,065,000,000
95	2017	DVLA	395,989,095,000	1,640,886,147,000

96	2017	EPMT	1,195,707,318,399	7,425,800,257,838
97	2017	GGRM	21,408,575,000,000	66,759,930,000,000
98	2017	HMSP	6,890,750,000,000	43,141,063,000,000
99	2017	ICBP	8,120,254,000,000	31,619,514,000,000
100	2017	INDF	29,787,303,000,000	87,939,488,000,000
101	2017	JPFA	8,346,028,000,000	21,088,870,000,000
102	2017	KLBF	5,342,659,713,054	16,616,239,416,335
103	2017	LSIP	8,346,028,000,000	21,088,870,000,000
104	2017	MERK	177,729,098,000	847,006,544,000
105	2017	MIDI	1,625,214,000,000	4,878,115,000,000
106	2017	MLBI	1,364,086,000,000	2,510,078,000,000
107	2017	MYOR	3,988,757,428,380	14,915,849,800,251
108	2017	ROTI	1,993,663,314,016	4,559,573,709,411
109	2017	SIDO	1,215,176,000,000	3,158,198,000,000
110	2017	SIPD	915,679,000,000	2,239,699,000,000
111	2017	SKBM	485,558,490,029	1,623,027,475,045
112	2017	SMAR	11,512,960	27,124,101,000,000
113	2017	SSMS	1,937,014,303,000	9,623,672,614,000
114	2017	STTP	1,125,768,977,479	2,342,432,443,196
115	2017	TGKA	104,124,558,258	2,924,962,977,878
116	2017	TSPC	1,984,179,208,981	7,434,900,309,021
117	2017	ULTJ	1,336,398,000,000	5,186,940,000,000
118	2017	UNVR	10,422,133,000,000	18,906,413,000,000
119	2017	WIIM	312,881,022,672	1,225,712,093,041
120	2017	APII	173,517,072,505	423,181,306,980
121	2017	ARNA	833,704,877,050	1,601,346,561,573
122	2017	ASGR	408,200,000,000	24,118,720,000,000
123	2017	ASII	48,402,000,000,000	295,646,000,000,000
124	2017	BHIT	12,801,851,000,000	5,652,381,100,000
125	2017	ICON	9,328,705,932	417,620,774,123
126	2017	JECC	742,160,252,895	1,927,985,352,000
127	2017	JTPE	459,867,266,199	1,015,271,044,216
128	2017	MFMI	199,899,529,870	244,722,928,696
129	2017	SCCO	1,687,349,407,527	4,014,244,589,706
130	2017	UNTR	16,374,852,000,000	82,262,093,000,000
131	2018	AKPI	1,675,087,492,000	3,070,410,492,000
132	2018	ALKA	20,228,835,000	648,968,295,000

133	2018	ANTM	20,128,155,732,000	33,306,390,807,000
134	2018	DPNS	10,910,763,194	322,185,012,261
135	2018	EKAD	371,559,780,027	853,267,454,400
136	2018	FASW	7,263,839,935,749	10,965,118,708,784
137	2018	IGAR	129,189,294,974	570,197,810,698
138	2018	INAI	227,489,647,951	1,400,683,598,096
139	2018	INCI	174,915,334,612	391,362,697,956
140	2018	INTP	14,637,185,000,000	27,788,562,000,000
141	2018	ISSP	2,197,050,000,000	6,494,070,000,000
142	2018	KDSI	524,053,587,271	1,391,416,464,512
143	2018	LTLS	1,901,953,000,000	6,318,441,000,000
144	2018	SMBR	4,012,558,978,000	5,538,079,503,000
145	2018	SMGR	32,748,895,968,000	51,155,890,227,000
146	2018	SPMA	1,367,186,114,023	2,282,845,632,924
147	2018	SRSN	224,257,888,000	686,777,211,000
148	2018	TALF	570,873,765,937	984,597,771,989
149	2018	TRST	2,535,555,929,013	4,284,901,587,126
150	2018	WTON	2,947,961,042,010	8,881,778,299,672
151	2018	AALI	10,219,013,000,000	26,856,967,000,000
152	2018	ADES	447,249,000,000	881,275,000,000
153	2018	AMRT	5,497,240,000,000	22,165,968,000,000
154	2018	BISI	498,764,000,000	2,765,010,000,000
155	2018	BUDI	1,871,467,000,000	3,392,980,000,000
156	2018	CEKA	200,024,117,988	1,168,956,042,706
157	2018	CINT	256,898,006,885	491,382,035,136
158	2018	CPIN	11,685,261,000,000	27,645,118,000,000
159	2018	DSNG	2,998,657,000,000	11,738,892,000,000
160	2018	DVLA	394,751,573,000	1,682,821,739,000
161	2018	EPMT	1,215,546,692,942	8,322,960,974,230
162	2018	GGRM	22,758,558,000,000	69,097,219,000,000
163	2018	HMSP	7,288,435,000,000	46,602,420,000,000
164	2018	ICBP	10,741,622,000,000	34,367,153,000,000
165	2018	INDF	42,388,236,000,000	96,537,796,000,000
166	2018	JPFA	7,935,353,000,000	23,038,028,000,000
167	2018	KLBF	6,252,801,150,475	18,146,206,145,369
168	2018	LSIP	6,234,540,000,000	10,037,294,000,000
169	2018	MERK	186,743,248,000	1,263,113,689,000

170	2018	MIDI	1,598,162,000,000	4,960,145,000,000
171	2018	MLBI	1,524,061,000,000	2,889,501,000,000
172	2018	MYOR	4,258,300,525,120	17,591,706,426,634
173	2018	ROTI	2,222,133,112,899	4,393,810,380,883
174	2018	SIDO	1,553,362,000,000	3,337,628,000,000
175	2018	SIPD	85,623,000,000	2,470,793,000,000
176	2018	SKBM	582,660,258,194	1,771,365,972,009
177	2018	SMAR	11,862,973,000,000	29,310,310,000,000
178	2018	SSMS	4,579,445,684,000	11,296,112,298,000
179	2018	STTP	1,096,143,561,950	2,631,189,810,030
180	2018	TGKA	94,064,002,067	3,485,510,411,961
181	2018	TSPC	2,271,379,683,420	7,869,975,060,326
182	2018	ULTJ	1,453,135,000,000	5,555,871,000,000
183	2018	UNVR	10,627,387,000,000	19,522,970,000,000
184	2018	WIIM	319,990,859,164	1,255,573,914,558
185	2018	APII	174,283,415,905	450,303,354,800
186	2018	ARNA	795,547,807,911	1,652,905,985,730
187	2018	ASGR	407,595,000,000	2,271,344,000,000
188	2018	ASII	57,733,000,000,000	344,711,000,000,000
189	2018	BHIT	14,211,194,000,000	56,421,973,000,000
190	2018	ICON	9,848,624,923	395,969,370,635
191	2018	JECC	757,379,485,281	2,081,620,993,000
192	2018	JTPE	437,901,244,110	1,087,169,297,635
193	2018	MFMI	218,310,160,923	273,775,760,725
194	2018	SCCO	1,683,305,229,385	4,165,196,478,857
195	2018	UNTR	24,584,551,000,000	116,281,017,000,000
196	2019	AKPI	1,521,317,226,000	2,776,775,756,000
197	2019	ALKA	16,739,396,000	604,824,614,000
198	2019	ANTM	18,865,691,270,000	30,194,907,730,000
199	2019	DPNS	10,075,298,217	318,141,387,900
200	2019	EKAD	912,760,500	968,234,349,565,000,000
201	2019	FASW	7,847,119,795,753	10,751,992,944,302
202	2019	IGAR	144,745,920,744	617,594,780,669
203	2019	INAI	222,336,962,991	1,212,894,403,676
204	2019	INCI	177,352,798,369	405,445,049,452
205	2019	INTP	14,080,158,000,000	27,707,749,000,000

206	2019	ISSP	2,128,844,000,000	6,424,507,000,000
207	2019	KDSI	586,699,930,470	1,253,650,408,375
208	2019	LTLS	1,880,861,000,000	5,863,204,000,000
209	2019	SMBR	4,171,966,909,000	5,571,270,204,000
210	2019	SMGR	56,601,702,000	79,807,067,000,000
211	2019	SPMA	1,438,907,503,522	2,372,130,750,775
212	2019	SRSN	228,818,788,000	779,246,858,000
213	2019	TALF	840,773,505,144	1,329,083,050,439
214	2019	TRST	2,720,377,238,742	4,349,022,887,699
215	2019	WTON	3,012,075,396,737	10,337,895,087,207
216	2019	AALI	9,841,623,000,000	26,974,124,000,000
217	2019	ADES	405,448,000,000	822,375,000,000
218	2019	AMRT	5,453,229,000,000	23,992,313,000,000
219	2019	BISI	480,957,000,000	23,992,313,000,000
220	2019	BUDI	1,808,968,000,000	2,999,767,000,000
221	2019	CEKA	195,283,411,192	1,393,079,542,074
222	2019	CINT	249,614,390,323	521,493,784,876
223	2019	CPIN	13,521,979,000,000	29,353,041,000,000
224	2019	DSNG	3,151,121,000,000	11,620,821,000,000
225	2019	DVLA	392,923,654,000	1,829,960,714,000
226	2019	EPMT	1,433,166,129,304	8,704,958,834,283
227	2019	GGRM	25,373,983,000,000	78,647,274,000,000
228	2019	HMSP	7,297,912,000,000	50,902,806,000,000
229	2019	ICBP	11,342,412,000,000	38,709,314,000,000
230	2019	INDF	43,072,504,000,000	96,198,559,000,000
231	2019	JPFA	10,062,592,000,000	25,185,009,000,000
232	2019	KLBF	7,666,314,692,908	20,264,726,862,584
233	2019	LSIP	6,311,102,000,000	10,225,322,000,000
234	2019	MERK	190,284,730,000	901,060,986,000
235	2019	MIDI	1,558,154,000,000	4,990,309,000,000
236	2019	MLBI	1,559,289,000,000	2,896,950,000,000
237	2019	MYOR	4,674,963,819,225	19,037,918,806,473
238	2019	ROTI	2,540,413,874,692	4,682,083,844,951
239	2019	SIDO	1,593,059,000,000	3,536,898,000,000
240	2019	SIPD	85,623,000,000	2,470,793,000,000
241	2019	SKBM	602,802,562,379	1,820,383,352,811
242	2019	SMAR	12,017,963,000,000	27,787,527,000,000

243	2019	SSMS	4,642,393,712,000	11,845,204,657,000,000
244	2019	STTP	1,124,520,287,704	2,881,563,083,954
245	2019	TGKA	86,888,676,915	2,995,872,438,975
246	2019	TSPC	2,370,214,050,251	8,372,769,580,743
247	2019	ULTJ	1,556,666,000,000	6,608,422,000,000
248	2019	UNVR	10,715,376,000,000	20,649,371,000,000
249	2019	WIIM	329,061,638,626	1,299,521,608,556
250	2019	APII	187,217,815,781	490,860,655,716
251	2019	ARNA	799,758,119,934	1,799,137,069,343
252	2019	ASGR	432,950,000,000	2,896,840,000,000
253	2019	ASII	13,831,000,000,000	351,958,000,000,000
254	2019	BHIT	14,973,966,000,000	57,613,499,000,000
255	2019	ICON	11,646,436,416	369,071,617,773
256	2019	JECC	851,624,396,191	1,888,753,850,000
257	2019	JTPE	501,238,262,227	1,152,696,526,641
258	2019	MFMI	108,408,848,317	421,902,495,547
259	2019	SCCO	1,663,655,512,779	4,400,655,628,146
260	2019	UNTR	27,469,005,000,000	111,713,375,000,000
261	2020	AKPI	1,555,991,249,000	2,644,267,716,000
262	2020	ALKA	9,929,636,000	418,630,902,000
263	2020	ANTM	18,248,068,325,000	31,729,512,995,000
264	2020	DPNS	8,801,944,541	317,310,718,779
265	2020	EKAD	474,173,694,707	1,081,979,820,386
266	2020	FASW	8,485,611,471,915	11,513,044,288,721
267	2020	IGAR	140,087,552,996	665,863,417,235
268	2020	INAI	261,608,342,068	1,395,969,637,457
269	2020	INCI	180,384,817,033	444,865,800,672
270	2020	INTP	14,397,092,000,000	27,344,672,000,000
271	2020	ISSP	2,197,790,000,000	6,076,604,000,000
272	2020	KDSI	552,917,461,644	1,245,707,236,962
273	2020	LTLS	1,828,809,000,000	5,524,302,000,000
274	2020	SMBR	4,242,524,144,000	5,737,175,560,000
275	2020	SMGR	56,053,483,000,000	78,006,244,000,000
276	2020	SPMA	1,659,143,550,952	2,316,065,006,133
277	2020	SRSN	319,819,738,000	906,846,895,000
278	2020	TALF	965,782,828,798	1,474,472,516,166

279	2020	TRST	2,662,486,993,594	4,223,302,387,771
280	2020	WTON	2,952,492,507,874	8,509,017,299,594
281	2020	AALI	9,242,161,000,000	27,781,231,000,000
282	2020	ADES	351,626,000,000	958,791,000,000
283	2020	AMRT	6,091,336,000,000	25,970,743,000,000
284	2020	BISI	492,340,000,000	2,914,979,000,000
285	2020	BUDI	1,699,087,000,000	2,963,007,000,000
286	2020	CEKA	204,186,009,945	1,566,673,828,068
287	2020	CINT	239,840,874,085	498,020,612,974
288	2020	CPIN	14,494,330,000,000	31,159,291,000,000
289	2020	DSNG	5,452,520,000,000	14,151,383,000,000
290	2020	DVLA	434,473,766,000	1,986,711,872,000
291	2020	EPMT	1,531,423,663,540	9,211,731,059,218
292	2020	GGRM	27,605,038,000,000	78,191,409,000,000
293	2020	HMSP	6,582,808,000,000	49,674,030,000,000
294	2020	ICBP	13,351,296,000,000	103,588,325,000,000
295	2020	INDF	45,862,919,000,000	163,136,516,000,000
296	2020	JPFA	11,143,803,000,000	25,951,760,000,000
297	2020	KLBF	8,157,762,093,280	22,564,300,317,374
298	2020	LSIP	6,313,300,000,000	10,922,788,000,000
299	2020	MERK	217,560,166,000	929,901,046,000
300	2020	MIDI	1,842,926,000,000	5,923,693,000,000
301	2020	MLBI	1,479,447,000,000	2,907,425,000,000
302	2020	MYOR	6,043,201,970,326	19,777,500,514,550
303	2020	ROTI	2,434,486,072,405	4,452,166,671,985
304	2020	SIDO	1,568,264,000,000	3,849,516,000,000
305	2020	SIPD	81,942,000,000	2,592,850,000,000
306	2020	SKBM	440,748,401,586	1,768,660,546,754
307	2020	SMAR	12,249,316,000,000	35,026,171,000,000
308	2020	SSMS	4,531,121,927,000	12,775,930,059,000
309	2020	STTP	1,538,988,540,784	3,448,995,059,882
310	2020	TGKA	75,635,303,975	3,361,956,197,960
311	2020	TSPC	2,418,932,619,330	9,104,657,533,366
312	2020	ULTJ	1,715,401,000,000	8,754,116,000,000
313	2020	UNVR	10,419,902,000,000	20,534,632,000,000
314	2020	WIIM	298,904,982,008	1,614,442,007,528
315	2020	APII	204,487,863,689	512,220,639,129

316	2020	ARNA	767,222,504,498	1,970,340,289,520
317	2020	ASGR	426,294,000,000	2,288,831,000,000
318	2020	ASII	12,960,000,000,000	338,203,000,000,000
319	2020	BHIT	15,498,028,000,000	59,484,422,000,000
320	2020	ICON	10,354,896,874	370,846,674,317
321	2020	JECC	907,748,683,255	1,513,949,141,000
322	2020	JTPE	510,514,957,020	1,038,097,010,616
323	2020	MFMI	266,539,636,330	341,169,168,581
324	2020	SCCO	1,666,509,653,242	3,743,659,818,718
325	2020	UNTR	24,319,373,000,000	99,800,963,000,000

3.9 Data Penghindaran Pajak akhir tahun 2016-2020

NO	TAHU N	KODE	LABA AKUNTANSI	LABA FISKAL	TOTAL ASET
1	2016	AKPI	75,952,611,000	6,718,519,500	2,615,909,190,000
2	2016	ALKA	276,648,000	4,369,500	136,618,855
3	2016	ANTM	237,291,595,000	504,184,000	29,981,535,812,000
4	2016	DPNS	12,288,056,506	768,832,688	296,129,565,784
5	2016	EKAD	118,449,029,979	7,059,117,710	702,508,630,708
6	2016	FASW	1,988,090,191,158	100,315,888,825	10,965,118,708,784
7	2016	IGAR	95,774,588,017	6,482,258,000	439,465,673,296
8	2016	INAI	58,097,472,991	5,146,440,874	1,339,032,413,455
9	2016	INCI	13,294,748,095	714,087,375	269,351,381,344
10	2016	INTP	4,146,379,000,000	186,750,000	30,150,580,000,000
11	2016	ISSP	139,149,000	10,586,250	6,041,811,000
12	2016	KDSI	63,697,916,133	4,176,072,625	1,142,273,020,550
13	2016	LTLS	141,243,000,000	16,254,750,000	5,658,360,000,000
14	2016	SMBR	349,280,550,000	24,311,741,000	4,368,876,996,000
15	2016	SMGR	5,084,621,543,000	158,443,474,750	44,226,895,982,000
16	2016	SPMA	111,358,495,242	2,880,643,750	2,158,852,415,950
17	2016	SRSN	1,688,362,000	-	717,149,704,000
18	2016	TALF	41,045,743,182	2,715,483,063	881,673,021,959
19	2016	TRST	23,194,967,133	6,463,218,874	3,290,596,224,286
20	2016	WTON	1,230,490,315,000	15,350,814,000	31,096,539,490,000
21	2016	AALI	2,208,778,000,000	211,695,250,000	24,226,122,000,000

22	2016	ADES	61,636,000,000	2,014,750,000	767,479,000,000
23	2016	AMRT	747,546,000,000	-	19,474,367,000,000
24	2016	BISI	454,095,000,000	11,105,750,000	2,416,177,000,000
25	2016	BUDI	52,832,000,000	817,000,000	2,931,807,000,000
26	2016	CEKA	285,827,837,455	17,263,378,403	1,425,964,152,418
27	2016	CINT	28,172,913,292	2,303,284,384	399,336,626,636
28	2016	CPIN	3,983,661,000,000	76,554,000,000	24,204,994,000,000
29	2016	DSNG	337,450,000,000	-	8,183,318,000,000
30	2016	DVLA	214,417,056,000	11,700,220,750	1,531,365,558,000
31	2016	EPMT	745,576,460,060	47,585,295,938	7,087,269,812,003
32	2016	GGRM	8,931,136,000,000	2,185,028,000,000	62,951,634,000,000
33	2016	HMSP	17,011,447,000,000	1,049,324,000,000	42,508,277,000,000
34	2016	ICBP	4,989,254,000,000	367,849,750,000	28,901,948,000,000
35	2016	INDF	7,385,228,000,000	602,511,250,000	82,174,515,000,000
36	2016	JPFA	2,766,591,000,000	154,714,750,000	19,251,026,000,000
37	2016	KLBF	3,091,188,460,230	187,711,103,015	15,226,009,210,657
38	2016	LSIP	860,439,000,000	39,784,000,000	10,922,788,000,000
39	2016	MERK	214,916,161,000	16,884,080,750	743,934,894,000
40	2016	MIDI	248,497,000,000	144,500,000	4,261,283,000,000
41	2016	MLBI	1,320,186,000,000	57,615,750,000	2,275,038,000,000
42	2016	MYOR	1,845,683,269,238	118,820,777,063	12,922,421,859,142
43	2016	ROTI	369,416,841,698	15,062,507,645	2,919,640,858,718
44	2016	SIDO	629,082,000,000	36,592,750,000	2,987,614,000,000
45	2016	SIPD	8,516,631,209	-	2,567,211,193,259
46	2016	SKBM	30,809,950,308	4,127,022,896	1,001,657,012,004
47	2016	SMAR	1,430,802,000,000	53,598,500,000	26,141,410,000,000
48	2016	SSMS	847,387,716,000	53,177,122,000	7,162,970,110,000
49	2016	STTP	217,746,308,540	11,218,977,100	2,336,411,494,941
50	2016	TGKA	247,273,473,816	16,939,808,774	2,686,030,338,104
51	2016	TSPC	718,958,200,369	43,582,893,919	6,585,807,349,438
52	2016	ULTJ	932,482,782,652	56,675,389,063	4,239,199,641,365
53	2016	UNVR	8,571,885,000,000	540,572,500,000	16,745,695,000,000
54	2016	WIIM	136,662,997,252	-	1,353,634,132,275
55	2016	APII	22,606,142,434	1,748,558,813	407,985,799,015
56	2016	ARNA	123,838,299,924	8,766,954,301	1,543,216,299,146
57	2016	ASGR	340,105,000,000	17,627,250,000	1,723,468,000,000
58	2016	ASII	22,253,000,000,000	1,255,500,000,000	261,855,000,000,000

59	2016	BHIT	1,598,840,000,000	187,724,250,000	55,292,949,000,000
60	2016	ICON	6,898,976,134	1,186,828,378	468,521,879,542
61	2016	JECC	164,796,167,232	6,703,227,688	2,276,031,922,082
62	2016	JTPE	98,552,704,713	5,754,056,543	1,052,131,760,706
63	2016	MFMI	27,531,412,922	1,183,118,813	215,487,521,382
64	2016	SCCO	439,602,100,346	25,089,087,246	2,449,935,491,586
65	2016	UNTR	6,730,030,000,000	2,387,250,000	63,991,229,000,000
66	2017	AKPI	31,813,498,000	1,796,371,000	2,745,325,833,000
67	2017	ALKA	16,063,389,000	-	305,208,703,000
68	2017	ANTM	454,396,524,000	13,181,415,250	30,014,273,452
69	2017	DPNS	7,568,252,565	520,172,625	308,491,173,960
70	2017	EKAD	102,649,309,681	7,115,532,888	796,767,646,172
71	2017	FASW	824,530,694,900	35,915,475,284	9,369,891,776,775
72	2017	IGAR	95,764,791,063	6,275,139,375	513,022,591,574
73	2017	INAI	52,292,073,203	2,928,969,132	1,213,916,545,120
74	2017	INCI	22,077,467,345	1,424,844,875	303,788,390,330
75	2017	INTP	2,287,989,000,000	178,750,000	28,863,676,000,000
76	2017	ISSP	20,430,000,000	4,719,750,000	6,269,365,000,000
77	2017	KDSI	93,363,070,902	5,854,861,250	1,328,291,727,616
78	2017	LTLS	254,816,000,000	757,000,000	5,769,332,000,000
79	2017	SMBR	208,947,154,000	16,969,000,500	5,060,337,247,000
80	2017	SMGR	2,746,546,363,000	52,128,789,000	48,963,502,966,000
81	2017	SPMA	121,308,934,629	624,316,475	2,175,660,855,114
82	2017	SRSN	18,969,208,000	980,616,250	652,726,454,000
83	2017	TALF	31,954,151,234	2,441,540,188	921,240,988,517
84	2017	TRST	12,513,681,277	-	3,332,905,936,010
85	2017	WTON	419,501,620,158	23,661,287,253	7,057,976,095,043
86	2017	AALI	2,938,505,000,000	189,269,500,000	24,935,426,000,000
87	2017	ADES	51,095,000,000	1,753,500,000	840,236,000,000
88	2017	AMRT	318,873,000,000	19,614,750,000	21,901,740,000,000
89	2017	BISI	78,459,000,000	19,614,750,000	21,901,740,000,000
90	2017	BUDI	61,016,000,000	1,000,750,000	2,939,456,000,000
91	2017	CEKA	143,195,939,366	8,437,393,006	1,392,636,444,501
92	2017	CINT	38,318,872,398	2,118,531,175	476,577,841,605
93	2017	CPIN	3,255,705,000,000	189,729,500,000	24,522,593,000,000
94	2017	DSNG	946,757,000,000	-	8,336,065,000,000

95	2017	DVLA	226,147,921,000	15,092,359,000	1,640,886,147,000
96	2017	EPMT	684,757,751,310	42,124,620,908	7,425,800,257,838
97	2017	GGRM	10,436,512,000,000	656,860,500,000	66,759,930,000,000
98	2017	HMSF	16,894,806,000,000	1,049,271,750,000	43,141,063,000,000
99	2017	ICBP	5,206,561,000,000	391,745,000,000	31,619,514,000,000
100	2017	INDF	7,658,554,000,000	603,327,750,000	87,939,488,000,000
101	2017	JPFA	1,740,595,000,000	84,955,250,000	21,088,870,000,000
102	2017	KLBF	3,241,186,725,992	194,340,291,643	16,616,239,416,335
103	2017	LSIP	1,006,236,000,000	59,879,250,000	21,088,870,000,000
104	2017	MERK	205,784,642,000	16,717,055,000	847,006,544,000
105	2017	MIDI	123,249,000,000	6,454,750,000	4,878,115,000,000
106	2017	MLBI	1,780,020,000,000	112,979,250,000	2,510,078,000,000
107	2017	MYOR	2,186,884,603,474	143,931,944,625	14,915,849,800,251
108	2017	ROTI	186,147,334,530	8,166,781,125	4,559,573,709,411
109	2017	SIDO	681,889,000,000	5,133,000,000	3,158,198,000,000
110	2017	SIPD	237,482,000,000	28,003,000,000	2,239,699,000,000
111	2017	SKBM	31,761,022,154	3,127,435,933	1,623,027,475,045
112	2017	SMAR	1,198,394,000,000	45,710,500,000	27,124,101,000,000
113	2017	SSMS	1,093,697,928,000	79,325,617,000	9,623,672,614,000
114	2017	STTP	288,545,819,603	16,617,734,938	2,342,432,443,196
115	2017	TGKA	325,696,478,507	18,695,020,216	2,924,962,977,878
116	2017	TSPC	744,090,262,873	44,413,880,952	7,434,900,309,021
117	2017	ULTJ	1,026,231,000,000	61,222,250,000	5,186,940,000,000
118	2017	UNVR	9,371,661,000,000	575,124,000,000	18,906,413,000,000
119	2017	WIIM	54,491,308,212	335,296,125	1,225,712,093,041
120	2017	APII	19,161,807,863	1,452,423,438	423,181,306,980
121	2017	ARNA	166,203,941,034	10,991,945,514	1,601,346,561,573
122	2017	ASGR	349,439,000,000	16,398,750,000	24,118,720,000,000
123	2017	ASII	29,196,000,000,000	1,550,250,000,000	295,646,000,000,000
124	2017	BHIT	1,205,454,000,000	170,186,500,000	5,652,381,100,000
125	2017	ICON	17,107,599,605	957,142,307	417,620,774,123
126	2017	JECC	111,423,979,247	1,429,951,063	1,927,985,352,000
127	2017	JTPE	110,555,734,896	7,098,147,140	1,015,271,044,216
128	2017	MFMI	30,384,378,457	1,255,562,875	244,722,928,696
129	2017	SCCO	345,230,356,594	20,809,518,834	4,014,244,589,706
130	2017	UNTR	10,522,657,000,000	141,905,750,000	82,262,093,000,000
131	2018	AKPI	91,686,890,000	3,839,307,250	3,070,410,492,000

132	2018	ALKA	22,922,823,000	12,766,500	648,968,295,000
133	2018	ANTM	1,265,501,806,000	73,435,074,000	33,306,390,807,000
134	2018	DPNS	12,347,569,714	705,521,500	322,185,012,261
135	2018	EKAD	101,455,415,901	7,363,064,685	853,267,454,400
136	2018	FASW	1,988,090,191,158	100,315,888,825	10,965,118,708,784
137	2018	IGAR	61,747,960,127	4,543,529,250	570,197,810,698
138	2018	INAI	64,757,097,094	2,922,334,137	1,400,683,598,096
139	2018	INCI	22,040,417,272	1,545,723,000	391,362,697,956
140	2018	INTP	1,400,822,000,000	148,500,000	27,788,562,000,000
141	2018	ISSP	59,640,000,000	5,437,500,000	6,494,070,000,000
142	2018	KDSI	103,955,745,914	6,417,010,563	1,391,416,464,512
143	2018	LTLS	30,545,000,000	21,303,250,000	6,318,441,000,000
144	2018	SMBR	145,356,709,000	316,167,500	5,538,079,503,000
145	2018	SMGR	4,104,959,323,000	180,842,953,500	51,155,890,227,000
146	2018	SPMA	109,673,317,782	2,529,417,149	2,282,845,632,924
147	2018	SRSN	50,845,763,000	2,807,109,750	686,777,211,000
148	2018	TALF	60,866,228,487	4,041,036,250	984,597,771,989
149	2018	TRST	36,216,675,439	62,479,302	4,284,901,587,126
150	2018	WTON	619,251,303,685	34,044,753,748	8,881,778,299,672
151	2018	AALI	2,207,080,000,000	9,710,750,000	26,856,967,000,000
152	2018	ADES	7,006,000,000	249,500,000	881,275,000,000
153	2018	AMRT	831,658,000,000	43,550,250,000	22,165,968,000,000
154	2018	BISI	505,499,000,000	22,958,500,000	2,765,010,000,000
155	2018	BUDI	71,781,000,000	475,500,000	3,392,980,000,000
156	2018	CEKA	123,394,812,359	6,806,574,670	1,168,956,042,706
157	2018	CINT	22,090,078,956	1,638,349,051	491,382,035,136
158	2018	CPIN	5,907,351,000,000	154,604,250,000	27,645,118,000,000
159	2018	DSNG	611,264,000,000	57,204,250,000	11,738,892,000,000
160	2018	DVLA	272,843,904,000	18,009,746,250	1,682,821,739,000
161	2018	EPMT	868,232,230,796	53,208,132,671	8,322,960,974,230
162	2018	GGRM	10,479,242,000,000	666,478,750,000	69,097,219,000,000
163	2018	HMSP	17,961,269,000,000	1,115,032,500,000	46,602,420,000,000
164	2018	ICBP	644,685,000,000	447,154,250,000	34,367,153,000,000
165	2018	INDF	7,446,966,000,000	608,742,750,000	96,537,796,000,000
166	2018	JPFA	3,089,839,000,000	147,617,250,000	23,038,028,000,000
167	2018	KLBF	3,306,399,669,021	198,506,450,580	18,146,206,145,369

168	2018	LSIP	417,052,000,000	24,464,500,000	10,037,294,000,000
169	2018	MERK	50,208,396,000	3,283,747,250	1,263,113,689,000
170	2018	MIDI	197,098,000,000	12,622,250,000	4,960,145,000,000
171	2018	MLBI	1,671,912,000,000	121,319,250,000	2,889,501,000,000
172	2018	MYOR	2,381,942,198,855	161,206,072,563	17,591,706,426,634
173	2018	ROTI	186,936,324,915	11,869,856,813	4,393,810,380,883
174	2018	SIDO	867,837,000,000	4,803,500,000	3,337,628,000,000
175	2018	SIPD	33,989,000,000	-	2,470,793,000,000
176	2018	SKBM	20,887,453,647	2,369,363,063	1,771,365,972,009
177	2018	SMAR	701,504,000,000	2,116,750,000	29,310,310,000,000
178	2018	SSMS	340,868,812,000	45,343,207,750	11,296,112,298,000
179	2018	STTP	324,694,650,175	14,842,198,000	2,631,189,810,030
180	2018	TGKA	426,291,444,535	26,402,867,852	3,485,510,411,961
181	2018	TSPC	727,700,178,905	45,553,202,391	7,869,975,060,326
182	2018	ULTJ	949,018,000,000	58,025,250,000	5,555,871,000,000
183	2018	UNVR	12,148,087,000,000	777,103,750,000	19,522,970,000,000
184	2018	WIIM	70,730,637,719	4,199,887,313	1,255,573,914,558
185	2018	APII	40,586,253,153	2,656,570,188	450,303,354,800
186	2018	ARNA	211,729,940,176	14,127,511,689	1,652,905,985,730
187	2018	ASGR	361,128,000,000	18,234,250,000	2,271,344,000,000
188	2018	ASII	34,995,000,000,000	1,936,500,000,000	344,711,000,000,000
189	2018	BHIT	1,522,284,000,000	163,385,750,000	56,421,973,000,000
190	2018	ICON	35,426,069,491	664,491,999	395,969,370,635
191	2018	JECC	117,459,959,119	-	2,081,620,993,000
192	2018	JTPE	160,136,680,625	9,808,117,303	1,087,169,297,635
193	2018	MFMI	34,539,454,566	1,361,582,563	273,775,760,725
194	2018	SCCO	343,024,583,828	21,897,423,313	4,165,196,478,857
195	2018	UNTR	15,708,719,000,000	176,072,250,000	116,281,017,000,000
196	2019	AKPI	78,501,405,000	8,404,473,500	2,776,775,756,000
197	2019	ALKA	9,944,133,000	28,366,500	604,824,614,000
198	2019	ANTM	687,034,053,000	106,716,000,250	30,194,907,730,000
199	2019	DPNS	5,302,563,264	435,105,438	318,141,387,900
200	2019	EKAD	111,834,501,956	8,830,659,310	968,234,349,565,000,000
201	2019	FASW	1,220,595,729,710	75,705,749,085	10,751,992,944,302
202	2019	IGAR	83,534,447,014	6,299,944,875	617,594,780,669
203	2019	INAI	48,116,436,880	3,457,606,734	1,212,894,403,676

204	2019	INCI	18,037,062,772	1,280,397,750	405,445,049,452
205	2019	INTP	2,274,833,000,000	82,799,750,000	27,707,749,000,000
206	2019	ISSP	233,293,000,000	14,782,750,000	6,424,507,000,000
207	2019	KDSI	94,926,825,515	7,849,288,295	1,253,650,408,375
208	2019	LTLS	302,147,000,000	22,297,000,000	5,863,204,000,000
209	2019	SMBR	86,572,265,000	66,472,250	5,571,270,204,000
210	2019	SMGR	3,195,775,000	245,884,250	79,807,067,000,000
211	2019	SPMA	176,640,361,124	5,450,080,966	2,372,130,750,775
212	2019	SRSN	57,029,659,000	3,233,078,250	779,246,858,000
213	2019	TALF	39,529,863,107	3,325,670,938	1,329,083,050,439
214	2019	TRST	17,514,074,859	4,378,518,715	4,349,022,887,699
215	2019	WTON	626,270,544,710	25,581,406,806	10,337,895,087,207
216	2019	AALI	660,860,000,000	4,714,000,000	26,974,124,000,000
217	2019	ADES	110,179,000,000	4,937,750,000	822,375,000,000
218	2019	AMRT	1,414,137,000,000	63,692,000,000	23,992,313,000,000
219	2019	BISI	404,771,000,000	14,968,250,000	23,992,313,000,000
220	2019	BUDI	83,905,000,000	2,051,250,000	2,999,767,000,000
221	2019	CEKA	285,132,249,695	16,528,570,556	1,393,079,542,074
222	2019	CINT	13,896,350,693	934,153,722	521,493,784,876
223	2019	CPIN	4,595,238,000,000	247,601,750,000	29,353,041,000,000
224	2019	DSNG	280,084,000,000	40,236,500,000	11,620,821,000,000
225	2019	DVLA	301,250,035,000	20,940,987,750	1,829,960,714,000
226	2019	EPMT	801,391,256,095	54,731,101,661	8,704,958,834,283
227	2019	GGRM	14,487,736,000,000	883,232,250,000	78,647,274,000,000
228	2019	HMSP	18,259,423,000,000	1,117,800,250,000	50,902,806,000,000
229	2019	ICBP	7,436,972,000,000	508,770,000,000	38,709,314,000,000
230	2019	INDF	8,749,397,000,000	693,914,250,000	96,198,559,000,000
231	2019	JPFA	2,572,708,000,000	125,613,000,000	25,185,009,000,000
232	2019	KLBF	3,402,616,824,533	208,165,657,609	20,264,726,862,584
233	2019	LSIP	352,743,000,000	14,901,250,000	10,225,322,000,000
234	2019	MERK	125,899,182,000	9,367,691,000	901,060,986,000
235	2019	MIDI	270,473,000,000	16,579,750,000	4,990,309,000,000
236	2019	MLBI	1,626,612,000,000	106,762,500,000	2,896,950,000,000
237	2019	MYOR	2,704,466,581,011	168,326,612,375	19,037,918,806,473
238	2019	ROTI	347,098,820,613	24,769,210,500	4,682,083,844,951
239	2019	SIDO	1,073,835,000,000	6,155,750,000	3,536,898,000,000
240	2019	SIPD	110,041,000,000	5,190,500,000	2,470,793,000,000

241	2019	SKBM	5,163,201,735	1,238,311,000	1,820,383,352,811
242	2019	SMAR	1,166,053,000,000	61,250,000	27,787,527,000,000
243	2019	SSMS	154,592,621,000	38,744,953,000	11,845,204,657,000,000
244	2019	STTP	607,043,293,422	29,779,890,100	2,881,563,083,954
245	2019	TGKA	553,046,935,019	31,960,059,324	2,995,872,438,975
246	2019	TSPC	796,220,911,472	45,725,134,870	8,372,769,580,743
247	2019	ULTJ	1,375,359,000,000	79,815,000,000	6,608,422,000,000
248	2019	UNVR	9,901,772,000,000	607,153,250,000	20,649,371,000,000
249	2019	WIIM	42,874,167,628	3,821,897,125	1,299,521,608,556
250	2019	APII	34,186,846,636	2,430,935,085	490,860,655,716
251	2019	ARNA	291,607,365,374	18,547,292,950	1,799,137,069,343
252	2019	ASGR	337,894,000,000	19,092,000,000	2,896,840,000,000
253	2019	ASII	34,054,000,000,000	1,930,000,000,000	351,958,000,000,000
254	2019	BHIT	2,713,548,000,000	160,851,500,000	57,613,499,000,000
255	2019	ICON	41,729,110,241	912,888,801	369,071,617,773
256	2019	JECC	133,973,045,799	2,165,078,500	1,888,753,850,000
257	2019	JTPE	242,552,261,337	14,866,395,753	1,152,696,526,641
258	2019	MFMI	141,858,190,209	2,614,128,375	421,902,495,547
259	2019	SCCO	413,405,348,304	26,626,523,129	4,400,655,628,146
260	2019	UNTR	15,476,885,000,000	113,255,750,000	111,713,375,000,000
261	2020	AKPI	40,676,936,000	2,900,942,440	2,644,267,716,000
262	2020	ALKA	8,177,691,000	20,848,740	418,630,902,000
263	2020	ANTM	1,641,178,012,000	104,822,523,520	31,729,512,995,000
264	2020	DPNS	4,461,029,495	382,892,785	317,310,718,779
265	2020	EKAD	123,522,654,770	6,306,495	1,081,979,820,386
266	2020	FASW	362,806,757,676	21,386,426,740	11,513,044,288,721
267	2020	IGAR	83,166,786,329	4,761,826,300	665,863,417,235
268	2020	INAI	26,221,826,142	2,562,531,277	1,395,969,637,457
269	2020	INCI	38,393,758,749	1,987,427,759	444,865,800,672
270	2020	INTP	2,148,328,000,000	74,431,940,000	27,344,672,000,000
271	2020	ISSP	155,068,000,000	9,115,920,000	6,076,604,000,000
272	2020	KDSI	82,952,707,385	4,072,042,260	1,245,707,236,962
273	2020	LTLS	197,745,000,000	15,023,140,000	5,524,302,000,000
274	2020	SMBR	36,467,602,000	-	5,737,175,560,000
275	2020	SMGR	3,488,650,000,000	199,752,300,000	78,006,244,000,000
276	2020	SPMA	195,503,438,222	5,072,244,873	2,316,065,006,133

277	2020	SRSN	61,027,867,000	2,618,642,620	906,846,895,000
278	2020	TALF	28,621,059,866	2,292,516,420	1,474,472,516,166
279	2020	TRST	46,317,333,298	78,628,250	4,223,302,387,771
280	2020	WTON	130,504,809,969	-	8,509,017,299,594
281	2020	AALI	1,462,635,000,000	-	27,781,231,000,000
282	2020	ADES	167,919,000,000	7,858,840,000	958,791,000,000
283	2020	AMRT	1,352,466,000,000	54,409,960,000	25,970,743,000,000
284	2020	BISI	36,493,800,000	1,616,340,000	2,914,979,000,000
285	2020	BUDI	69,312,000,000	799,480,000	2,963,007,000,000
286	2020	CEKA	232,864,791,126	9,925,864,559	1,566,673,828,068
287	2020	CINT	6,564,977,193	478,069,921	498,020,612,974
288	2020	CPIN	4,767,698,000,000	214,898,640,000	31,159,291,000,000
289	2020	DSNG	695,296,000,000	10,410,840,000	14,151,383,000,000
290	2020	DVLA	214,069,167,000	13,734	1,986,711,872,000
291	2020	EPMT	873,612,121,925	39,141,366,964	9,211,731,059,218
292	2020	GGRM	9,663,133,000,000	423,259,320,000	78,191,409,000,000
293	2020	HMSF	11,161,466,000,000	569,186,640,000	49,674,030,000,000
294	2020	ICBP	9,958,647,000,000	558,567,020,000	103,588,325,000,000
295	2020	INDF	12,426,334,000,000	752,968,700,000	163,136,516,000,000
296	2020	JPFA	1,679,091,000,000	6,798,440,000	25,951,760,000,000
297	2020	KLBF	3,627,632,574,744	173,229,688,172	22,564,300,317,374
298	2020	LSIP	860,439,000,000	35,009,920,000	10,922,788,000,000
299	2020	MERK	105,999,860,000	7,086,295,920	929,901,046,000
300	2020	MIDI	261,024,000,000	14,250,720,000	5,923,693,000,000
301	2020	MLBI	396,470,000,000	19,819,800,000	2,907,425,000,000
302	2020	MYOR	2,683,890,279,936	126,812,044,014	19,777,500,514,550
303	2020	ROTI	160,357,537,779	286,015,928	4,452,166,671,985
304	2020	SIDO	1,199,548,000,000	6,078,820,000	3,849,516,000,000
305	2020	SIPD	46,806,000,000	5,092,560,000	2,592,850,000,000
306	2020	SKBM	13,568,762,041	1,383,671,881	1,768,660,546,754
307	2020	SMAR	2,087,780,000,000	32,609,280,000	35,026,171,000,000
308	2020	SSMS	899,545,934,000	66,184,780,420	12,775,930,059,000
309	2020	STTP	773,607,195,121	33,423,601,860	3,448,995,059,882
310	2020	TGKA	625,284,763,496	26,733,587,395	3,361,956,197,960
311	2020	TSPC	1,064,448,534,874	45,548,452,686	9,104,657,533,366
312	2020	ULTJ	1,421,517,000,000	62,691,420,000	8,754,116,000,000
313	2020	UNVR	9,206,869,000,000	458,914,940,000	20,534,632,000,000

314	2020	WIIM	215,214,468,586	8,932,271,691	1,614,442,007,528
315	2020	APII	38,984,987,175	1,895,044,153	512,220,639,129
316	2020	ARNA	420,626,406,830	20,044,215,365	1,970,340,289,520
317	2020	ASGR	63,720,000,000	3,251,160,000	2,288,831,000,000
318	2020	ASII	21,741,000,000,000	930,160,000,000	338,203,000,000,000
319	2020	BHIT	2,187,197,000,000	145,487,760,000	59,484,422,000,000
320	2020	ICON	8,096,796,384	355,903,194	370,846,674,317
321	2020	JECC	175,476,928,095	5,055,627,562	1,513,949,141,000
322	2020	JTPE	97,672,912,335	4,842,191,529	1,038,097,010,616
323	2020	MFMI	20,661,479,556	1,483,412,520	341,169,168,581
324	2020	SCCO	304,057,871,487	13,394,693,871	3,743,659,818,718
325	2020	UNTR	7,011,186,000,000	25,782,240,000	99,800,963,000,000

LAMPIRAN 4

Data Input SPSS

NO	TAHUN	KODE	K. Audit (X1)	INST (X2)	DIV_WOMEN (X3)	BIND (X4)	ROA (X5)	LEV (X6)	SIZE (X7)	CIR (X8)	BTD (Y)
1	2016	AKPI	1	58.6394	0.0000	0.6000	2.0029	57.1837	28.5926	62.0199	2.6467
2	2016	ALKA	0	20.0000	0.0000	1.0000	0.3778	8.8145	18.7327	17.6083	0.1993
3	2016	ANTM	1	65.0000	0.0000	1.0000	0.2162	38.5996	31.0316	43.2231	0.7898
4	2016	DPNS	0	59.8665	0.0000	0.2500	3.3801	11.0982	26.4141	4.0279	3.8899
5	2016	EKAD	0	75.4464	0.3333	0.3333	12.9089	15.7299	27.2779	50.5007	0.0000
6	2016	FASW	1	87.0800	0.1667	0.1667	12.8167	60.8911	30.0257	66.2450	17.2162
7	2016	IGAR	0	84.8188	0.2000	0.2000	15.7704	14.9538	26.8088	16.0629	20.3184
8	2016	INAI	0	77.9789	0.0000	0.4000	2.6551	80.7311	27.9230	17.9285	3.9544
9	2016	INCI	0	20.8025	0.0000	1.0000	3.7085	9.8477	26.3193	47.7216	4.6707
10	2016	INTP	1	64.0334	0.0000	0.4444	12.8366	13.3061	31.0372	48.5685	13.7516
11	2016	ISSP	0	55.9431	0.0000	0.2000	1.7035	56.2208	22.5220	32.8435	2.1279
12	2016	KDSI	0	75.6762	0.0000	0.3333	4.1258	63.2501	27.7640	33.9445	5.2108
13	2016	LTLS	1	54.0533	0.0000	0.3333	2.0383	70.3268	29.3642	32.5902	2.2089
14	2016	SMBR	0	76.2375	0.2000	1.0000	5.9304	28.5684	29.1055	79.6561	7.4383
15	2016	SMGR	1	51.0056	0.0000	0.4286	10.2540	30.8692	31.4204	69.7466	11.1384
16	2016	SPMA	0	75.6541	0.2500	0.5000	3.7549	48.5117	28.4006	66.2465	0.0050
17	2016	SRSN	0	68.0042	0.0000	0.1667	1.5417	43.9373	27.2986	30.6862	0.2354

18	2016	TALF	0	99.3840	0.0000	0.2000	3.4182	14.7195	27.5051	61.9600	4.3474
19	2016	TRST	1	56.6903	0.0000	0.3333	1.0270	41.2764	28.8221	61.5531	0.5085
20	2016	WTON	0	65.0488	0.0000	1.0000	3.6890	59.8067	31.0681	11.1454	3.9076
21	2016	AALI	1	73.0369	0.0000	0.1667	8.7274	27.3781	30.8185	41.3932	8.2435
22	2016	ADES	0	91.5239	0.0000	0.3333	7.2902	24.4469	27.3664	48.7540	7.7685
23	2016	AMRT	1	52.5408	0.0000	0.1429	0.2844	72.8116	30.6001	29.4940	3.8386
24	2016	BISI	1	54.0781	0.0000	0.2000	0.1392	14.5955	28.5132	13.1622	18.3343
25	2016	BUDI	0	53.4023	0.1429	0.1429	1.3174	60.2640	28.7066	60.4330	1.7742
26	2016	CEKA	1	92.0119	0.2500	0.2500	17.5107	37.7319	27.9859	15.1460	18.8339
27	2016	CINT	0	69.6500	0.0000	0.2000	5.1634	18.2570	26.7131	45.5286	6.4782
28	2016	CPIN	1	55.5357	0.1429	0.1429	9.1940	41.5111	30.8176	46.4113	16.1417
29	2016	DSNG	1	55.0214	0.2500	0.2500	3.0799	66.9530	29.7331	25.4773	4.1236
30	2016	DVLA	1	92.1251	0.3750	0.1250	9.9312	29.5022	28.0572	26.4208	13.2377
31	2016	EPMT	1	91.8026	0.3333	0.3333	7.8468	34.8130	29.5893	14.3585	9.8485
32	2016	GGRM	1	75.5469	0.1429	0.1429	10.5997	37.1514	31.7734	32.5630	10.7163
33	2016	HMSP	1	92.5000	0.1250	0.1250	30.0229	19.6039	31.3807	16.2215	37.5506
34	2016	ICBP	1	80.5329	0.1111	0.1111	12.5642	35.9876	30.9949	24.6153	15.9899
35	2016	INDF	1	50.0671	0.1000	0.1000	6.4094	46.5267	32.0399	31.2772	8.2540
36	2016	JPFA	0	246.8068	0.0000	0.2000	11.2805	51.3119	30.5886	39.0218	13.5675
37	2016	KLBF	1	56.5091	0.2000	0.2000	15.4399	18.1411	30.3540	29.9209	19.0692
38	2016	LSIP	1	59.5937	0.0000	0.3333	0.6367	14.9820	30.0219	57.7993	7.5132
39	2016	MERK	1	221.0486	0.2000	0.2000	20.6796	21.6770	27.3352	17.4736	26.6195
40	2016	MIDI	1	86.7192	0.2000	0.2000	4.6006	78.9945	29.0806	33.5216	5.8281
41	2016	MLBI	1	81.7822	0.0000	0.2500	43.1698	63.9285	28.4530	56.1755	55.4967
42	2016	MYOR	0	59.0708	0.0000	0.4000	10.7463	51.5164	30.1900	29.8661	13.3633

43	2016	ROTI	1	69.3671	0.2000	0.2000	9.5826	50.5846	28.7025	63.1147	12.1369
44	2016	SIDO	0	40.5000	0.2000	0.2000	16.0839	7.6894	28.7255	35.1862	19.8315
45	2016	SIPD	0	100.0000	0.2000	0.2000	0.5083	55.4836	28.5738	32.5457	0.3317
46	2016	SKBM	0	80.6337	0.2500	0.1250	2.2508	63.2220	27.6327	43.5297	2.6639
47	2016	SMAR	0	97.2044	0.0000	0.1667	9.9441	60.9836	30.8945	42.7111	5.2683
48	2016	SSMS	1	67.4016	0.0000	0.3333	8.2600	51.7826	29.5999	24.4188	11.0877
49	2016	STTP	0	56.7634	0.0000	1.0000	7.4549	49.9869	28.4796	48.5241	8.8395
50	2016	TGKA	1	99.3248	0.2500	0.7500	7.8612	64.8578	28.6191	4.3524	8.5752
51	2016	TSPC	0	78.4187	0.3000	0.1000	8.2829	29.6172	29.5159	27.4339	10.2550
52	2016	ULTJ	0	44.5127	0.0000	0.3333	16.7443	17.6912	29.0754	24.5818	20.6597
53	2016	UNVR	1	84.9918	0.4000	0.1000	38.1631	71.9077	30.4492	56.9070	47.9605
54	2016	WIIM	0	27.6216	0.1667	0.1667	7.8522	26.7828	27.9338	24.4119	10.0960
55	2016	APII	0	16.5265	0.0000	0.3333	3.8903	41.3573	26.7345	42.4180	5.1123
56	2016	ARNA	1	13.9680	0.0000	0.3333	5.9211	38.5641	28.0649	55.6434	7.4566
57	2016	ASGR	1	76.8659	0.0000	0.2500	14.8023	32.3277	28.1754	22.7637	18.7110
58	2016	ASII	1	50.1148	0.0000	0.0909	6.9894	46.5712	33.1988	16.5118	8.0188
59	2016	BHIT	1	55.5911	0.5000	0.1667	1.5335	56.2991	31.6437	28.8010	2.5521
60	2016	ICON	0	31.7677	0.0000	1.0000	0.9306	66.1095	26.8728	1.9774	1.2192
61	2016	JECC	0	67.3711	0.1667	0.1667	5.5282	46.1499	28.4535	30.7538	6.9460
62	2016	JTPE	0	65.6738	0.0000	0.3333	7.5637	47.3786	27.6818	43.9560	8.8201
63	2016	MFMI	0	65.9891	0.3333	0.3333	9.7022	15.7980	26.0962	81.2422	12.2273
64	2016	SCCO	0	71.1515	0.0000	0.2500	13.9021	50.1856	28.5271	13.1643	16.9193
65	2016	UNTR	1	59.4970	0.0000	0.1429	7.9768	33.3941	31.7898	18.8657	10.5134
66	2017	AKPI	1	70.0259	0.0000	0.6000	0.4857	58.9625	28.6409	57.8519	1.0934
67	2017	ALKA	0	94.8224	0.0000	1.0000	5.0478	4.3256	26.4443	7.4059	5.2631

68	2017	ANTM	1	65.0000	0.0000	1.0000	0.4548	38.3946	24.1249	46.9543	1.4700
69	2017	DPNS	0	59.8665	0.0000	0.2500	1.9331	13.1789	26.4550	3.5695	2.2847
70	2017	EKAD	0	76.8076	0.3333	0.3333	9.5631	16.8117	27.4038	45.7914	11.9902
71	2017	FASW	1	86.2129	0.1667	0.1667	6.3594	64.9055	29.8685	68.6750	8.4165
72	2017	IGAR	1	84.8188	0.2000	0.2000	14.1079	13.8543	26.9636	16.8392	17.4436
73	2017	INAI	0	77.9876	0.0000	0.4000	3.1840	77.1480	27.8249	18.6997	4.0664
74	2017	INCI	0	15.2912	0.0000	1.0000	5.4493	11.6557	26.4396	44.7413	6.7984
75	2017	INTP	1	51.0014	0.0000	0.4444	6.4435	14.9225	30.9936	51.8972	7.9263
76	2017	ISSP	0	55.9431	0.0000	0.2000	0.1377	54.6853	29.4667	35.0847	0.2506
77	2017	KDSI	0	83.9425	0.0000	0.3333	5.1920	63.4463	27.9149	33.1571	6.5880
78	2017	LTLS	1	53.4379	0.0000	0.3333	3.1827	67.5685	29.3836	33.8481	4.4036
79	2017	SMBR	0	75.5683	0.0000	1.0000	40.3733	32.5567	29.2525	75.9730	3.7938
80	2017	SMGR	1	51.0056	0.0000	1.0000	4.1725	37.8332	31.5221	66.4236	5.5029
81	2017	SPMA	0	83.4571	0.2500	0.5000	4.2415	45.0495	28.4084	64.0459	5.5470
82	2017	SRSN	0	32.7940	0.0000	0.1667	2.7115	36.3430	27.2044	32.4418	2.7559
83	2017	TALF	0	99.3840	0.0000	0.2000	2.3301	16.8334	27.5490	60.5077	3.2036
84	2017	TRST	1	57.7695	0.0000	0.2500	1.1461	40.7253	28.8349	59.7736	0.3755
85	2017	WTON	0	91.4935	0.0000	1.0000	4.8237	61.2079	29.5852	37.9636	5.6084
86	2017	AALI	1	39.5381	0.0000	0.1667	8.4764	25.6622	30.8473	40.7141	11.0254
87	2017	ADES	0	9.1524	0.0000	0.3333	4.5513	20.5105	27.4569	56.9107	5.8723
88	2017	AMRT	1	52.5408	0.0000	0.1429	1.1768	76.0285	30.7176	27.5910	1.3664
89	2017	BISI	1	54.0781	0.0000	0.2000	1.1768	76.0285	30.7176	27.5910	0.2687
90	2017	BUDI	0	53.4023	0.1429	0.1429	1.5520	59.3564	28.7092	63.4074	2.0417
91	2017	CEKA	1	92.0119	0.2500	0.2500	7.7135	35.1558	27.9622	15.2454	9.6765
92	2017	CINT	0	67.8400	0.0000	0.2000	6.2211	19.7878	26.8899	49.2578	7.5959
93	2017	CPIN	1	10.0000	0.1429	0.1429	1.0510	67.9030	30.8306	24.6422	12.5027
94	2017	DSNG	1	16.9283	0.2500	0.2500	7.0535	61.0159	29.7516	24.6019	11.3574

95	2017	DVLA	1	92.1251	0.3750	0.1250	9.8879	31.9697	28.1263	24.1326	12.8623
96	2017	EPMT	1	91.8026	0.3333	0.3333	6.9735	30.9062	29.6360	16.1021	8.6541
97	2017	GGRM	1	75.5469	0.1429	0.1429	11.6168	36.8069	31.8321	32.0680	14.6490
98	2017	HMSP	1	92.5000	0.1250	0.1250	29.3700	20.9269	31.3955	15.9726	36.7296
99	2017	ICBP	1	80.5329	0.1111	0.1111	11.2057	35.7222	31.0848	25.6811	15.2274
100	2017	INDF	1	50.0671	0.1000	0.1000	5.8507	46.8308	32.1077	33.8725	8.0228
101	2017	JPFA	1	246.8078	0.0000	0.2000	5.2531	53.5507	30.6798	39.5755	7.8508
102	2017	KLBF	1	56.5091	0.2000	0.2000	14.7642	16.3828	30.4414	32.1532	18.3366
103	2017	LSIP	1	15.3499	0.0000	0.3333	5.2531	53.5507	30.6798	39.5755	4.4875
104	2017	MERK	1	18.4866	0.2000	0.2000	17.0810	0.0273	27.4650	20.9832	22.3219
105	2017	MIDI	1	86.7192	0.2000	0.2000	2.1076	81.0814	29.2158	33.3164	2.3942
106	2017	MLBI	1	81.7822	0.0000	0.2500	52.6704	57.5748	28.5513	54.3444	66.4139
107	2017	MYOR	0	59.0708	0.0000	0.4000	10.9344	50.6944	30.3334	26.7417	13.6965
108	2017	ROTI	1	70.2826	0.2000	0.2000	2.9688	38.1498	29.1483	43.7248	3.9034
109	2017	SIDO	1	81.0000	0.2000	0.2000	16.9020	8.3064	28.7810	38.4769	21.4285
110	2017	SIPD	0	100.0000	0.2000	0.2000	15.8470	6.4669	28.4374	40.8840	9.3530
111	2017	SKBM	0	82.7939	0.2500	0.1250	1.5946	36.9550	28.1153	29.9168	1.7642
112	2017	SMAR	0	92.3997	0.0000	0.1667	4.3407	58.3397	30.9314	0.0000	4.2497
113	2017	SSMS	1	66.6049	0.0000	0.3333	8.2185	57.8846	29.8952	20.1276	10.5404
114	2017	STTP	0	56.7634	0.0000	1.0000	9.2222	40.8832	28.4822	48.0598	11.6088
115	2017	TGKA	1	97.8884	0.2500	0.7500	8.7164	63.1579	28.7043	3.5599	10.4959
116	2017	TSPC	0	78.9246	0.3000	0.1000	7.4963	31.6466	29.6372	26.6874	9.4107
117	2017	ULTJ	0	36.8596	0.0000	0.3333	13.7206	18.8586	29.2772	25.7647	18.6046
118	2017	UNVR	1	84.9918	0.4000	0.1000	37.0486	72.6369	30.5705	55.1249	46.5267
119	2017	WIIM	0	5.1432	0.1667	0.1667	3.3115	20.2022	27.8345	25.5265	4.4183
120	2017	APII	0	16.5265	0.0000	0.3333	3.2898	41.5398	26.7711	41.0030	4.1848

121	2017	ARNA	1	13.9775	0.0000	0.3333	7.6301	35.7166	28.1019	52.0627	9.6926
122	2017	ASGR	1	76.8659	0.0000	0.2500	1.0665	4.5222	30.8140	1.6925	1.3808
123	2017	ASII	1	50.1148	0.0000	0.1111	7.8354	47.1519	33.3202	16.3817	9.3510
124	2017	BHIT	0	56.5601	0.5000	0.1667	9.2830	57.3875	29.3631	22.6486	18.3156
125	2017	ICON	0	38.8218	0.0000	1.0000	3.6305	58.4545	26.7578	2.2338	3.8673
126	2017	JECC	0	89.3151	0.1667	0.1667	4.7357	52.1610	28.2875	38.4941	5.7051
127	2017	JTPE	0	65.6738	0.0000	0.2500	8.0719	42.2440	27.6462	45.2950	10.1901
128	2017	MFMI	0	93.2475	0.3333	0.3333	9.4513	18.0299	26.2234	81.6840	11.9028
129	2017	SCCO	0	71.1515	0.0000	0.2500	6.7193	32.0363	29.0209	42.0340	8.0817
130	2017	UNTR	1	59.4970	0.0000	0.1429	9.3279	42.2116	32.0409	19.9057	12.6191
131	2018	AKPI	1	70.2174	0.0000	1.0000	2.0918	59.8153	28.7528	54.5558	2.8611
132	2018	ALKA	0	94.8224	0.0000	1.0000	3.5354	84.4782	27.1986	3.1171	3.5302
133	2018	ANTM	1	65.0000	0.0000	1.0000	2.6254	40.7344	31.1368	60.4333	3.5791
134	2018	DPNS	0	66.6730	0.0000	0.2500	2.9114	13.8046	26.4984	3.3865	3.6135
135	2018	EKAD	0	77.5331	0.3333	0.3333	8.6778	15.0814	27.4723	43.5455	11.0273
136	2018	FASW	1	87.0800	0.1667	0.1667	12.8167	60.8911	30.0257	66.2450	17.2162
137	2018	IGAR	1	84.8188	0.2000	0.2000	7.8346	15.3076	27.0692	22.6569	10.0324
138	2018	INAI	0	77.9253	0.0000	0.4000	2.8888	78.3046	27.9680	16.2413	4.4146
139	2018	INCI	0	15.2913	0.0000	1.0000	4.2609	18.2466	26.6929	44.6939	5.2368
140	2018	INTP	1	51.0014	0.0000	0.4444	4.1238	16.4347	30.9556	52.6734	5.0405
141	2018	ISSP	0	55.9431	0.0000	0.2000	0.7505	55.1065	29.5019	33.8316	0.8346
142	2018	KDSI	0	83.9425	0.0000	0.3333	5.5168	60.1003	27.9613	37.6633	7.0100
143	2018	LTLS	1	53.4379	0.0000	0.3333	3.6899	66.3676	29.4745	30.1016	0.1463
144	2018	SMBR	0	75.5094	0.0000	1.0000	4.4691	37.2766	29.3427	72.4540	2.6190
145	2018	SMGR	1	51.0056	0.0000	1.0000	6.0320	36.0068	31.5659	64.0178	7.6709
146	2018	SPMA	0	92.3698	0.2500	0.5000	3.6022	44.3861	28.4564	59.8896	4.6934
147	2018	SRSN	0	55.5408	0.0000	0.1667	5.6401	30.4304	27.2553	32.6537	6.9948

148	2018	TALF	0	99.4297	0.0000	0.2500	4.4665	17.8975	27.6155	57.9804	5.7714
149	2018	TRST	0	13.2657	0.0000	0.2500	1.4748	47.7845	29.0861	59.1742	0.8438
150	2018	WTON	0	67.9186	0.0000	1.0000	5.4791	64.6826	29.8150	33.1911	6.5888
151	2018	AALI	1	79.6847	0.0000	0.1667	5.6623	27.4880	30.9215	38.0498	8.1817
152	2018	ADES	0	91.5239	0.0000	0.5000	6.0092	45.3163	27.5046	50.7502	0.7667
153	2018	AMRT	1	52.5408	0.0000	0.1667	3.0156	72.8523	30.7296	24.8004	3.5555
154	2018	BISI	1	54.0781	0.0000	0.2000	1.4606	1.6459	28.6481	18.0384	17.4517
155	2018	BUDI	0	53.4023	0.1429	0.1429	1.4874	6.3852	28.8527	55.1570	2.1016
156	2018	CEKA	1	92.0119	0.2500	0.2500	7.9258	16.4513	27.7871	17.1113	9.9737
157	2018	CINT	0	71.8991	0.0000	0.2000	2.7584	20.9009	26.9205	52.2807	4.1621
158	2018	CPIN	1	55.5335	0.1429	0.1429	16.4640	29.8568	30.9505	42.2688	20.8093
159	2018	DSNG	1	16.9283	0.2500	0.0000	3.6396	68.8304	30.0939	25.5446	4.7199
160	2018	DVLA	1	92.1251	0.3750	0.1250	11.9235	28.6756	28.1515	23.4577	15.1433
161	2018	EPMT	1	91.8026	0.3333	0.3333	7.8488	30.4592	29.7500	14.6047	9.7925
162	2018	GGRM	1	75.5469	0.1429	0.1429	11.2784	34.6815	31.8665	32.9370	14.2014
163	2018	HMSP	1	92.5000	0.1250	0.1250	29.0509	24.1279	31.4727	15.6396	36.1488
164	2018	ICBP	1	80.5329	0.1111	0.1111	13.5559	33.9278	31.1681	31.2555	0.5748
165	2018	INDF	1	50.0671	0.1000	0.1000	5.1398	48.2930	32.2010	43.9084	7.0835
166	2018	JPFA	1	357.8682	0.0000	0.2000	9.7804	55.6611	30.7682	34.4446	12.7712
167	2018	KLBF	1	56.5091	0.2000	0.2000	13.7619	15.7146	30.5295	34.4579	17.1270
168	2018	LSIP	1	59.5937	0.0000	0.3333	3.2820	16.9884	29.9373	62.1138	3.9113
169	2018	MERK	1	86.6507	0.2000	0.2000	92.0997	58.9680	27.8646	14.7844	3.7150
170	2018	MIDI	1	86.7192	0.2000	0.2000	3.2087	78.2099	29.2325	32.2201	3.7192
171	2018	MLBI	1	81.7822	0.0000	0.2500	42.3882	59.5939	28.6921	52.7448	53.6630
172	2018	MYOR	0	59.0708	0.0000	0.4000	10.0072	51.4399	30.4984	24.2063	12.6238
173	2018	ROTI	1	73.1114	0.2000	0.2000	2.8943	33.6134	29.1112	50.5742	3.9844

174	2018	SIDO	1	81.0000	0.2000	0.2000	19.8898	13.0336	28.8363	46.5409	25.8577
175	2018	SIPD	0	100.0000	0.2000	0.2000	3.2288	62.9183	28.5356	3.4654	1.3756
176	2018	SKBM	0	82.7939	0.2500	0.1250	0.9007	41.2557	28.2028	32.8933	1.0454
177	2018	SMAR	0	92.3997	0.0000	0.1667	2.0395	58.2085	31.0090	40.4737	2.3861
178	2018	SSMS	1	63.9757	0.0000	0.3333	0.7681	63.9771	30.0555	40.5400	2.6162
179	2018	STTP	0	56.7634	0.0000	1.0000	9.6948	37.4280	28.5985	41.6596	11.7761
180	2018	TGKA	1	97.9055	0.2500	0.7500	9.1409	64.1989	28.8796	2.6987	11.4729
181	2018	TSPC	0	85.2339	0.3000	0.1000	6.8663	30.9674	29.6941	28.8613	8.6677
182	2018	ULTJ	0	36.2949	0.0000	0.3333	12.6282	14.0557	29.3459	26.1549	16.0370
183	2018	UNVR	1	84.9918	0.4000	0.1000	46.6601	61.1835	30.6026	54.4353	58.2441
184	2018	WIIM	0	5.5241	0.1667	0.1667	4.0733	19.9381	27.8586	25.4856	5.2988
185	2018	APII	0	71.8878	0.0000	0.3333	6.7515	38.7985	26.8332	38.7036	8.4231
186	2018	ARNA	1	13.9808	0.0000	0.3333	9.5715	33.6565	28.1336	48.1303	11.9548
187	2018	ASGR	1	76.8659	0.0000	0.2500	11.9050	34.6541	28.4514	17.9451	15.0965
188	2018	ASII	1	50.1148	0.0000	0.1000	7.9406	49.4176	33.4737	16.7482	9.5902
189	2018	BHIT	0	60.3618	0.4286	0.1429	1.6752	56.5829	31.6639	25.1873	2.4085
190	2018	ICON	0	31.7677	0.0000	1.0000	7.7875	48.2695	26.7046	2.4872	8.7789
191	2018	JECC	0	89.8125	0.1667	0.1667	5.0693	47.9422	28.3642	36.3841	5.6427
192	2018	JTPE	0	65.6738	0.0000	0.2500	11.0884	40.4485	27.7146	40.2790	13.8275
193	2018	MFMI	0	93.2475	0.3333	0.3333	9.6832	18.7916	26.3356	79.7405	12.1186
194	2018	SCCO	0	71.1515	0.2000	0.2000	6.0980	30.1174	29.0578	40.4136	7.7098
195	2018	UNTR	1	59.4970	0.0000	0.1429	9.8885	50.9372	32.3870	21.1424	13.3579
196	2019	AKPI	1	70.2174	0.0000	1.0000	1.9575	59.8153	28.6523	49.5477	2.5244
197	2019	ALKA	0	94.8224	0.0000	1.0000	1.2160	84.4782	27.1282	2.5794	1.6394
198	2019	ANTM	1	65.0000	0.0000	1.0000	0.6420	40.7344	31.0387	56.6429	1.9219
199	2019	DPNS	0	66.6730	0.0000	0.3333	1.2377	13.8046	26.4858	3.1272	1.5300
200	2019	EKAD	0	78.4722	0.3333	0.3333	7.9942	15.0814	27.5987	0.1070	10.6383

201	2019	FASW	0	99.7112	0.1667	0.1667	9.0107	60.8911	30.0061	71.5644	10.6482
202	2019	IGAR	1	84.8188	0.2000	0.2000	9.8506	15.3076	27.1491	25.3852	12.5057
203	2019	INAI	0	77.9253	0.0000	0.4000	2.7668	78.3046	27.8240	15.8735	3.6820
204	2019	INCI	0	15.2913	0.0000	1.0000	3.4066	18.2466	26.7283	45.3167	4.1329
205	2019	INTP	1	51.0014	0.0000	0.4444	6.6238	16.4347	30.9527	50.6689	7.9113
206	2019	ISSP	0	55.9431	0.0000	0.2000	2.8904	55.1065	29.4911	32.7814	3.4012
207	2019	KDSI	0	83.9368	0.0000	0.3333	0.0051	60.1003	27.8571	42.1657	6.9459
208	2019	LTLS	1	53.4379	0.0000	0.3333	3.8502	66.3676	29.3997	29.7678	4.7730
209	2019	SMBR	0	75.5094	0.0000	1.0000	0.5398	37.2766	29.3486	75.3324	1.5527
210	2019	SMGR	1	51.0056	0.0000	1.0000	2.9712	36.0068	32.0106	0.1106	0.0037
211	2019	SPMA	0	92.3698	0.2500	0.5000	5.5227	44.3861	28.4948	63.0313	7.2167
212	2019	SRSN	0	50.5000	0.0000	0.1667	5.4962	30.4304	27.3816	33.3178	6.9037
213	2019	TALF	0	99.4296	0.0000	1.0000	2.0658	17.8975	27.9155	85.3926	2.7240
214	2019	TRST	0	57.7695	0.0000	0.2500	0.8947	47.7845	29.1010	63.4875	0.3020
215	2019	WTON	0	66.9957	0.0000	1.0000	4.9402	64.6826	29.9668	33.9130	5.8106
216	2019	AALI	1	79.6847	0.0000	1.0000	0.9032	27.4880	30.9259	36.6446	2.4325
217	2019	ADES	0	91.5239	0.0000	0.5000	10.1967	45.3163	27.4355	46.0070	12.7972
218	2019	AMRT	1	52.5408	0.0000	0.1667	4.7469	72.8523	30.8088	24.6018	5.6287
219	2019	BISI	1	7.4451	0.0000	0.2000	4.7469	1.6459	30.8088	17.3944	1.6247
220	2019	BUDI	0	57.8478	0.1429	0.1429	2.1342	6.3852	28.7296	53.3150	2.7287
221	2019	CEKA	1	92.0119	0.2500	0.2500	15.4664	16.4513	27.9625	16.7058	19.2813
222	2019	CINT	0	157.5730	0.0000	0.2000	1.3847	20.9009	26.9800	50.7984	2.4856
223	2019	CPIN	1	100.0000	0.1429	0.1429	12.3741	29.8568	31.0104	48.9127	14.8115
224	2019	DSNG	1	16.9451	0.2500	0.0000	1.5331	68.8304	30.0838	26.8434	2.0639
225	2019	DVLA	1	92.1251	0.3750	0.1250	12.1196	28.6756	28.2353	23.3491	15.3178
226	2019	EPMT	1	92.4745	0.3333	0.3333	6.6722	30.4592	29.7949	17.2194	8.5774
227	2019	GGRM	1	75.5469	0.1429	0.1429	13.8348	34.6815	31.9960	36.7221	17.2981

228	2019	HMSP	1	92.5000	0.1250	0.1250	26.9563	24.1279	31.5609	15.6599	33.6752
229	2019	ICBP	1	0.0805	0.1111	0.1111	13.8469	33.9278	31.2871	33.0036	17.8980
230	2019	INDF	1	50.0671	0.1000	0.1000	6.1360	48.2930	32.1974	44.6172	8.3738
231	2019	JPFA	1	211.1601	0.0000	0.2000	7.4801	55.6611	30.8573	43.6782	9.7165
232	2019	KLBF	1	56.5091	0.2000	0.2000	12.5223	15.7146	30.6399	42.2475	15.7636
233	2019	LSIP	1	59.5937	0.0000	0.3333	0.2471	16.9884	29.9559	62.8765	3.3040
234	2019	MERK	1	86.6507	0.2000	0.2000	8.6850	58.9680	27.5268	15.0647	12.9327
235	2019	MIDI	1	86.7192	0.2000	0.2000	0.4069	78.2099	29.2385	31.4135	5.0877
236	2019	MLBI	1	81.7822	0.0000	0.2500	41.6320	59.5939	28.6947	53.9640	52.4638
237	2019	MYOR	0	59.0708	0.0000	0.4000	10.7123	51.4399	30.5775	26.5748	13.3215
238	2019	ROTI	1	73.1114	0.2000	0.2000	5.0516	33.6134	29.1748	57.8180	6.8843
239	2019	SIDO	1	81.0000	0.2000	0.2000	22.8361	13.0336	28.8943	47.7303	30.1869
240	2019	SIPD	0	1.8297	0.2000	0.2000	3.2288	62.9183	28.5356	3.4654	4.2436
241	2019	SKBM	0	82.7939	0.2500	0.1250	0.0526	41.2557	28.2301	34.0304	0.2156
242	2019	SMAR	0	92.3997	0.0000	0.1667	3.2342	58.2085	30.9556	41.0025	4.1961
243	2019	SSMS	1	65.8055	0.0000	0.3333	0.1020	63.9771	37.0107	41.0973	0.9780
244	2019	STTP	0	56.7634	0.0000	1.0000	16.7475	37.4280	28.6894	42.7381	20.0330
245	2019	TGKA	1	97.9055	0.2500	0.7500	14.3003	64.1989	28.7283	2.4929	17.3935
246	2019	TSPC	0	80.4405	0.3000	0.1000	7.1082	30.9674	29.7560	30.1172	8.9635
247	2019	ULTJ	0	36.3814	0.0000	0.3333	15.6749	14.0557	29.5194	28.0184	19.6044
248	2019	UNVR	1	84.9918	0.4000	0.1000	35.8018	61.1835	30.6587	54.8860	45.0116
249	2019	WIIM	0	5.0975	0.1667	0.1667	2.1029	19.9381	27.8930	26.2081	3.0051
250	2019	APII	0	71.8878	0.0000	0.3333	5.2448	38.7985	26.9194	41.5759	6.4694
251	2019	ARNA	1	13.9911	0.0000	0.3333	12.0989	33.6565	28.2183	48.3850	15.1773
252	2019	ASGR	1	76.8659	0.0000	1.0000	8.6643	34.6541	28.6946	19.0614	11.0052
253	2019	ASII	1	50.1148	0.0909	0.0000	7.5637	49.4176	33.4945	4.0123	9.1272

254	2019	BHIT	0	50.6564	0.4286	0.0000	3.6238	56.5829	31.6848	26.5392	4.4307
255	2019	ICON	0	31.7677	0.0000	0.2500	9.8370	48.2695	26.6343	2.9412	11.0592
256	2019	JECC	0	89.8125	0.2857	1.0000	4.9316	47.9422	28.2669	40.9116	6.9786
257	2019	JTPE	0	65.6738	0.0000	0.2500	15.8275	40.4485	27.7731	46.1049	19.7525
258	2019	MFMI	0	93.2475	0.2500	0.2500	31.6297	18.7916	26.7680	39.5977	33.0038
259	2019	SCCO	0	71.1515	0.2000	0.2000	6.8988	30.1174	29.1128	39.9418	8.7891
260	2019	UNTR	1	59.4970	0.0000	0.3333	9.9672	50.9372	32.3470	23.6229	13.7527
261	2020	AKPI	0	77.9877	0.0000	1.0000	2.4962	50.3119	28.6034	58.8439	1.4286
262	2020	ALKA	0	94.8224	0.0000	1.0000	1.5967	74.8696	26.7603	2.3719	1.9485
263	2020	ANTM	1	65.0000	0.0000	1.0000	3.6223	39.9945	31.0883	57.5113	4.8420
264	2020	DPNS	0	66.6126	0.0000	0.5000	0.7566	10.2382	26.4831	2.7739	1.2852
265	2020	EKAD	0	79.5333	0.3333	0.3333	8.8661	11.9796	27.7098	43.8246	11.4158
266	2020	FASW	0	99.7112	0.0000	1.0000	3.0687	60.1930	30.0745	73.7043	2.9655
267	2020	IGAR	1	84.8188	0.2000	0.2000	9.1266	10.8552	27.2244	21.0385	11.7749
268	2020	INAI	0	77.9253	0.0000	0.4000	0.2859	76.9763	27.9646	18.7403	1.6948
269	2020	INCI	0	15.2912	0.0000	1.0000	6.7597	17.0817	26.8210	40.5481	8.1837
270	2020	INTP	1	51.0014	0.0000	0.4444	6.6058	18.9010	30.9395	52.6504	7.5843
271	2020	ISSP	0	55.9431	0.0000	1.0000	2.8936	45.1118	29.4355	36.1681	2.4019
272	2020	KDSI	0	78.4422	0.0000	0.3333	4.8309	46.7396	27.8507	44.3858	6.3322
273	2020	LTLS	1	54.7072	0.0000	0.4000	2.1396	59.3954	29.3402	33.1048	3.3076
274	2020	SMBR	0	75.5094	0.0000	1.0000	0.1914	40.5999	29.3780	73.9480	0.6356
275	2020	SMGR	1	51.0056	0.0000	1.0000	3.4284	52.0108	31.9878	71.8577	4.2162
276	2020	SPMA	0	92.3698	0.0000	0.2500	7.0173	33.8796	28.4709	71.6363	8.2222
277	2020	SRSN	0	50.5000	0.0000	0.1667	4.8688	35.1724	27.5332	35.2672	6.4409
278	2020	TALF	0	99.4296	0.0000	1.0000	1.2539	30.8102	28.0193	65.5002	1.7856
279	2020	TRST	0	57.7695	0.0000	0.2500	1.7351	46.3261	29.0716	63.0428	1.0948
280	2020	WTON	0	66.8601	0.0000	1.0000	1.4473	60.1532	29.7721	34.6984	1.5337

281	2020	AALI	1	79.6847	0.0000	1.0000	3.2172	30.7166	30.9554	33.2676	5.2648
282	2020	ADES	0	91.5239	0.0000	0.5000	14.1625	26.9384	27.5889	36.6739	16.6940
283	2020	AMRT	1	52.5472	0.0000	0.1667	4.1912	70.5964	30.8880	23.4546	4.9981
284	2020	BISI	1	541.4375	0.0000	0.2000	9.4569	15.6636	28.7009	16.8900	1.1965
285	2020	BUDI	0	57.8478	0.1429	0.1429	2.2644	55.3779	28.7172	57.3433	2.3123
286	2020	CEKA	1	91.9766	0.2500	0.2500	11.6050	0.0195	28.0800	13.0331	14.2301
287	2020	CINT	0	77.4615	0.0000	0.2000	0.0500	22.6222	26.9339	48.1588	1.2222
288	2020	CPIN	1	55.5335	0.1429	0.1429	12.3425	25.0635	31.0701	46.5169	14.6114
289	2020	DSNG	1	16.9451	0.2500	0.0000	3.3790	55.9707	30.2808	38.5299	4.8397
290	2020	DVLA	1	92.1251	0.3750	0.1250	8.1579	33.2421	28.3175	21.8690	10.7750
291	2020	EPMT	1	92.4745	0.3333	0.3333	7.3805	28.7924	29.8515	16.6247	9.0588
292	2020	GGRM	1	75.5469	0.1429	0.1429	9.7808	25.1549	31.9902	35.3044	11.8170
293	2020	HMSP	1	92.5000	0.1250	0.1250	17.2754	39.1202	31.5365	13.2520	21.3236
294	2020	ICBP	1	80.5329	0.1111	0.1111	7.1616	51.4250	32.2714	12.8888	9.0745
295	2020	INDF	1	50.0671	0.1000	0.1000	5.3649	51.4897	32.7256	28.1132	7.1556
296	2020	JPFA	1	219.3705	0.0000	0.2000	4.7084	56.0262	30.8873	42.9405	6.4439
297	2020	KLBF	1	57.0701	0.2000	0.2000	12.4073	19.0044	30.7474	36.1534	15.3092
298	2020	LSIP	1	100.0000	0.0000	0.3333	0.6367	14.9820	30.0219	57.7993	7.5569
299	2020	MERK	1	86.6507	0.2000	0.2000	7.7322	34.1131	27.5583	23.3961	10.6370
300	2020	MIDI	1	86.7192	0.2000	0.2000	3.3809	76.3880	29.4100	31.1111	4.1659
301	2020	MLBI	1	81.7822	0.0000	0.2500	9.8237	50.6984	28.6983	50.8851	12.9548
302	2020	MYOR	0	59.0708	0.0000	0.4000	10.6089	43.0086	30.6156	30.5559	12.9292
303	2020	ROTI	1	82.8075	0.2000	0.2000	3.2679	27.5034	29.1244	54.6809	3.5954
304	2020	SIDO	1	81.0000	0.2000	0.2000	24.2632	16.3079	28.9790	40.7393	31.0031
305	2020	SIPD	0	100.0000	0.2000	0.2000	1.0902	64.1061	28.5838	3.1603	1.6088
306	2020	SKBM	0	82.7939	0.2500	0.1250	0.3062	45.6096	28.2012	24.9199	0.6889

307	2020	SMAR	0	92.3997	0.0000	0.1667	4.3961	6.4245	31.1871	34.9719	5.8675
308	2020	SSMS	1	68.1723	0.0000	0.3333	4.5465	61.8753	30.1786	35.4661	6.5229
309	2020	STTP	0	56.7634	0.0000	1.0000	18.2264	22.4905	28.8691	44.6214	21.4608
310	2020	TGKA	1	97.9032	0.2500	0.7500	14.2346	52.4482	28.8435	2.2497	17.8037
311	2020	TSPC	0	81.6480	0.3000	0.1000	9.1642	29.9563	29.8398	26.5681	11.1910
312	2020	ULTJ	0	23.7763	0.0000	0.3333	12.6759	45.3773	29.8005	19.5954	15.5221
313	2020	UNVR	1	84.9918	0.4000	0.1000	34.8851	75.9559	30.6531	50.7431	42.6010
314	2020	WIIM	0	24.3103	0.1667	0.1667	10.6852	26.5473	28.1100	18.5144	12.7773
315	2020	APII	0	71.8878	0.0000	0.3333	5.8866	34.9458	26.9620	39.9218	7.2410
316	2020	ARNA	1	14.0300	0.0000	0.3333	16.5576	33.7709	28.3092	38.9386	20.3306
317	2020	ASGR	1	76.8659	0.0000	1.0000	2.0877	31.7216	28.4591	18.6250	2.6419
318	2020	ASII	1	50.1148	0.1111	0.0000	5.4911	42.2081	33.4547	3.8320	6.1534
319	2020	BHIT	0	46.4352	0.4286	0.0000	2.5652	47.1896	31.7167	26.0539	3.4323
320	2020	ICON	0	40.3232	0.3333	0.0000	1.5378	33.8989	26.6391	2.7922	2.0874
321	2020	JECC	0	89.9801	0.2500	0.7500	7.6492	81.3232	28.0457	59.9590	11.2567
322	2020	JTPE	0	65.6738	0.3333	0.8333	7.1451	25.7858	27.6684	49.1780	8.9424
323	2020	MFMI	0	93.2475	0.2500	0.2500	5.3273	66.5443	26.5556	78.1254	5.6213
324	2020	SCCO	0	71.1515	0.2000	0.2000	6.3615	12.5467	28.9511	44.5155	7.7641
325	2020	UNTR	1	59.4970	0.0000	1.0000	5.6437	36.7269	32.2342	24.3679	6.9993

LAMPIRAN 5

Hasil Pengujian SPSS

5.1 Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif (Sebelum Menghapus Data Outlier)

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kualitas Audit	325	.0000	1.0000	.513846	.5005790
Kepemilikan Institusional	325	.0805	541.4375	71.795549	43.7569901
Diversiti Gender dalam Dewan Direksi	325	.0000	.5000	.103146	.1290062
Independensi Dewan Direksi	325	.0000	1.0000	.360871	.3011465
Profitabilitas	325	.0051	92.0997	8.216395	9.3614988
Leverage	325	.0195	84.4782	40.380167	19.9053436
Ukuran Perusahaan	325	18.7327	37.0107	29.149646	1.8548440
Capital intensity	325	.1070	85.3926	35.937570	18.7763307
Penghindaran Pajak	325	.0037	66.4139	9.784835	9.9070297
Valid N (listwise)	325				

Sumber: Hasil olah data spss.25

Hasil Uji Statistik Deskriptif
(Setelah Menghapus Data Outlier)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualiatas Audit	281	-1.02650	.97118	-.0525425	1.00031495
Kepemilikan Institusional	281	-1.51453	.64457	-.1274207	.52551886
Diversiti Gender dalam dewan Direksi	281	-.79954	2.52278	-.0479820	.95127310
Independensi Dewan Direksi	281	-1.19833	2.12232	-.0019635	.98569518
Profitabilitas	281	-.87713	8.96046	-.1673698	.72306387
Leverage	281	-2.02763	2.21539	-.0133262	.98922241
Ukuran Perusahaan	281	-2.70899	2.34244	-.0127696	.91548961
Capital intensity	281	-1.91398	2.43639	-.0111397	1.00026641
Penghindaran Pajak	281	-.98767	1.26547	-.1897871	.55698198
Valid N (listwise)	281				

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.2 Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas (Sebelum Menghapus Data Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			325
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5.85309583
Most Extreme Differences	Absolute		.214
	Positive		.173
	Negative		-.214
Test Statistic			.214
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.000 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000
			.000
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 325 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil olah data spss.25

Hasil Uji Normalitas
(Setelah Menghapus Data Outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			281
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.76502500	
Most Extreme	Absolute	.080	
Differences	Positive	.061	
	Negative	-.080	
Test Statistic			.080
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.055 ^d	
	99% Confidence	Lower	.023
	Interval	Bound	
		Upper	.088
			Bound
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 325 sampled tables with starting seed 1873471395.			

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.3 Uji Multikolienaritas

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualits Audit	.719	1.391
	Kepemilikan Institusional	.872	1.147
	Diversiti Gender dalam dewan Direksi	.747	1.340
	Independensi Dewan Direksi	.798	1.253
	Profitabilitas	.898	1.113
	Leverage	.882	1.134
	Ukuran Perusahaan	.695	1.439
	Capital intensity	.936	1.068
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak			

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.4 Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.644 ^a	.415	.398	.43232598	1.887

a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas, , Ukuran Perusahaan, Independensi Dewan Direksi, Diversiti Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional , Kualits Audit

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.5 Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Sebelum Transformasi)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-6.616	.279		.000
	Kualiatas Audit	.067	.312	.015	.831
	Kepemilikan Institusional	-.818	.539	-.094	.131
	Diversiti Gender dalam dewan Direksi	-.376	.322	-.079	.244
	Independensi Dewan Direksi	-.114	.301	-.025	.705
	Profitabilitas	1.557	.386	.247	.000
	Leverage	-.211	.285	-.046	.460
	Ukuran Perusahaan	-.272	.347	-.055	.433
	Capital intensity	.125	.274	.027	.648
a. Dependent Variable: LnRes_2					

Sumber: Hasil olah data spss.25

**Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Setelah Transformasi)**

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.941	6.447		.456
	Ln_X1	-.160	.180	-.099	.376
	Ln_X2	.056	.181	.031	.756
	Ln_X3	-.280	.277	-.122	.315
	Ln_X4	.083	.170	.052	.627
	Ln_X5	-.220	.086	-.268	.012
	Ln_X6	.026	.072	.037	.722
	Ln_K1	-.768	1.985	-.050	.700
	Ln_K2	-.008	.090	-.009	.929
a. Dependent Variable: AbsRes					

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.6 Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Overall Model Fit Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24.066	16	1.504	12.162	.000 ^b
	Residual	11.873	96	.124		
	Total	35.939	112			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, ,Independensi Dewan Direksi, Diversiti Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kualiatas Audit						

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.670	.615	.35167540
a. Predictors: (Constant), Capital intensity, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Independensi Dewan Direksi, Diversiti Gender dalam dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kualiatas Audit				
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak				

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.8 Analisa Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.131	.027		-4.822	.000
	Kualiatas Audit	.070	.030	.127	2.314	.021
	Kepemilikan Institusional	-.016	.053	-.015	-.297	.767
	Diversiti Gender dalam dewan Direksi	.024	.031	.041	.761	.447
	Independensi Dewan Direksi	-.036	.029	-.063	-1.211	.227
	Profitabilitas	.346	.038	.450	9.185	.000
	Leverage	-.158	.028	-.281	-5.688	.000
	Ukuran Perusahaan	.034	.034	.055	.993	.322
	Capital intensity	-.047	.027	-.084	-1.752	.081
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

Sumber: Hasil olah data spss.25

5.9 Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.131	.027		-4.822	.000
	Kualiatas Audit	.070	.030	.127	2.314	.021
	Kepemilikan Institusional	-.016	.053	-.015	-.297	.767
	Diversiti Gender dalam dewan Direksi	.024	.031	.041	.761	.447
	Independensi Dewan Direksi	-.036	.029	-.063	-1.211	.227
	Profitabilitas	.346	.038	.450	9.185	.000
	Leverage	-.158	.028	-.281	-5.688	.000
	Ukuran Perusahaan	.034	.034	.055	.993	.322
	Capital intensity	-.047	.027	-.084	-1.752	.081
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						

Sumber: Hasil olah data spss.25